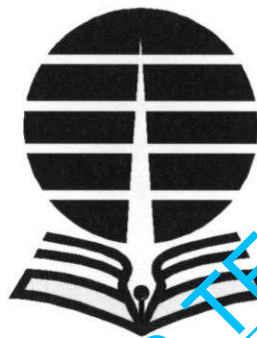


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DI KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG
STUDI KASUS : SDN 07 LUBUK NIBUNG**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Ilmu Administrasi
Bidang Ilmu Administrasi Publik

Disusun Oleh :

KRISTIANUS
NIM. 015534768

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

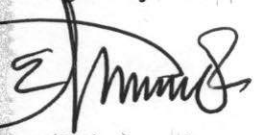
TAPM yang berjudul “Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang, Studi Kasus : SDN 07 Lubuk Nibung” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun rujukan telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pontianak, Desember 2011

Yang menyatakan




(Kristianus)

NIM : 015534768

ABSTRACT**Analysis of Implementation of School Operational Assistance (BOS)
in Subdistrict Central Ketungau, Sintang Regency
Case Study: SDN 07 Lubuk Nibung**

Kristianus

Open University

kristianussintang@yahoo.co.id

Keywords: Implementation, BOS

This research was conducted to determine the implementation of the School Operational Assistance (BOS) and identify the factors that influence the successful implementation of this program at SDN 07 Lubuk Nibung, Subdistrict Central Ketungau. This study uses four variables, namely the planning stages, stage distribution, use and results of the implementation phase.

This study used a qualitative approach. The subjects in this study amounted to 30 people, consisting of the Head of District Education Office Sintang, Head of Department and Section, principals, teachers, students, parents and school committee. The procedure of data collection is done by interviews, questionnaires, observation and documentation. Data analysis using descriptive analysis with the data presented in the form of tables

Analysis of the results of this study showed that at early stages of planning stages is an implementation of the BOS. This stage includes the activity of completing necessary administrative, RKS/RAPBS and making proposals. Furthermore, the distribution phase of the BOS funds held directly to school accounts. At the stage of BOS funds will see the suitability of the BOS funds with the needs and numbers of students, report format accountability, oversight and inspection.

At the final stage of the implementation shows that the implementation of BOS effect on decreasing students drop out of school, extracurricular activities, procurement of textbooks and teacher professional development. Analysis of factors affecting the implementation of BOS was found several factors that faktor communication, resources, disposition, and organizational structure

ABSTRAK**Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang
Studi Kasus : SDN 07 Lubuk Nibung**

Kristianus

Universitas Terbuka

kristianussintang@yahoo.co.id

Kata Kunci : Implementasi, BOS

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program tersebut di SDN 07 Lubuk Nibung, kecamatan Ketungau Tengah. Penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu tahapan perencanaan, tahapan penyaluran, tahapan penggunaan, pengawasan dan hasil pelaksanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini berjumlah 30 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Bagian dan Seksi, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa dan komite sekolah. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuisioner, observasi dan dokumentasi. Analisa data dengan menggunakan analisis deskriptif dengan sajian data berupa tabel-tabel.

Analisis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahapan perencanaan merupakan tahapan awal pelaksanaan BOS. Tahapan ini meliputi kegiatan melengkapi kelengkapan administrasi, RKS/RAPBS dan pembuatan proposal. Selanjutnya tahap penyaluran dana BOS yang dilaksanakan secara langsung ke rekening sekolah. Pada tahapan penggunaan dana BOS akan melihat kesesuaian dana BOS dengan kebutuhan dan jumlah siswa, format laporan pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan.

Pada tahapan akhir yaitu hasil pelaksanaan terlihat bahwa pelaksanaan BOS berpengaruh terhadap berkurangnya siswa putus sekolah, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan buku pelajaran dan pengembangan profesi guru. Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BOS ditemukan beberapa faktor yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.
Studi Kasus : SDN 07 Lubuk Nibung

Penyusun TAPM: Kristianus

NIM : 015534768

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

Menyetujui :

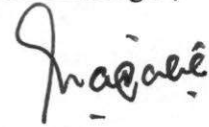
Pembimbing I,



Dr. Hernawan, SE, MS.Ak.

NIP : 19580815 198703 1 001

Pembimbing II,



Dr. Aria Djalil

NIP : 130364776

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Susanti, M.Si

NIP : 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc, Ph.D

NIP : 19520213 198503 2 001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Tel. 021.7415050, Fax. 021.7415588

Kepada

**Yth. Direktur PPs UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418**

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa.

Nama/NIM : Kristianus / 015534768

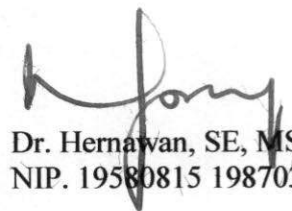
Judul TAPM : Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang
Studi Kasus : SDN 07 Lubuk Nibung

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari Mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru* selesai sekitar 90 % sehingga dinyatakan **sudah layak Uji/belum layak uji*** dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa

Pontianak, 26 September 2011

Pembimbing I,



Dr. Hernawan, SE, MS.Ak
NIP. 19580815 198703 1 001

Pembimbing II,



Dr. Aria Djalil
NIP. 130364776

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : KRISTIANUS
 NIM : 015534768
 PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI BIDANG MINAT
 ADMINISTRASI PUBLIK
 JUDUL TAPM : ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN
 OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KECAMATAN
 KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG
 STUDI KASUS : SDN 07 LUBUK NIBUNG

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Desember 2011
 Waktu : 10.15 - 12.15 WIB
 Dan telah dinyatakan : LULUS

Panitia Penguji TAPM


Ketua Komisi Penguji :
 Nama : Ir. Edward Zubir, MM


Penguji Ahli :
 Nama : Prof. Dr. Aries Djainuri, MA


Pembimbing I :
 Nama : Dr. Hernawan, SE, MS.Ak.

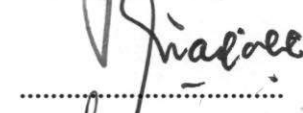
Pembimbing II :
 Nama : Dr. Aria Djailil

Sekretaris Komisi :
 Nama : Dra. Susanti, M.Si











KATA PENGANTAR

Seiring dengan luapan kegembiraan yang sangat besar atas selesainya penulisan tesis ini, saya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada saya dan keluarga, sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini dengan baik, meskipun harus diakui masih belum sempurna. Tesis yang diberi judul “Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. Studi Kasus : SDN 07 Lubuk Nibung “, suatu penelitian yang dilakukan untuk mencoba menemukan dan menganalisa sejauhmana perlu tidaknya dana BOS itu bagi kelangsungan pendidikan dan keinginan untuk melihat sejauhmana kontribusinya bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga tidak diberlakukan suatu rumus tertentu sebagaimana kalau peneliti melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui, wawancara, observasi, studi dokumentasi dan menyebarkan kuesioner, setelah itu dianalisis dengan berpedomankan pada aturan yang ditentukan dalam petunjuk dana BOS, kalau tidak sesuai peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa ada kekeliruan atau ada yang tidak wajar karena menyimpang dari yang diinginkan. Tapi kalau administrasinya bagus peneliti juga harus mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Dalam menyusun tesis ini penulis melakukan berbagai studi kepustakaan untuk menemukan teori-teori sebagai bahan pembanding agar dapat menarik kesimpulan yang tepat dan tidak hanya berdasarkan asumsi atau pendapat dari penulis saja.

Penyusun sadar bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Hernawan, SE, MS.Ak. selaku dosen pembimbing I dan Dr. Aria Djalil selaku dosen pembimbing II yang di sela-sela kesibukannya masih sempat meluangkan waktu yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis demi menuju proses kesempurnaan sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan.
2. Kepala sekolah dan rekan-rekan SMP Negeri 1 Ketungau Tengah yang telah memberikan saya cukup waktu sehingga saya dapat mengerjakan tesis ini tanpa ada rasa tertekan.
3. Para orang tua siswa dan para guru di SDN No. 7 Lubuk Nibung yang memberikan respon yang sangat baik dalam menyukseskan penelitian ini.
4. Isteri dan keempat anak yang tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Rektor Universitas Universitas Terbuka Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D.
6. Direktur Program Magister Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka Suciati, M.Sc, Ph.D
7. Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Dra. Susanti, M.Si.
8. Kepala UPBJJ-UT Pontianak Ir. Edward Zubir, MM dan jajarannya.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Drs. Senen Maryono, M.Si
10. Para dosen pengajar yang telah membina dan mentransfer ilmu kepada peneliti.
11. Pinarto, S.Pd, M, Si selaku pengelola S2 MAP di Dinas Pendidikan Sintang.

Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyusun tesis ini.

Penulis sadar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu kritik saran dan perbaikan yang bersifat konstruktif dan membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan tulisan ini ke depan.

Pontianak, Desember 2011

Penulis

Kristianus

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan.....	ii
Abstract	iii
Abstrak	iv
Lembar Persetujuan	v
Lembar TAPM Layak Uji	vi
Lembar Pengesahan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Bagan	xiv
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Perumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritik	15

1. Teori Analisis Kebijakan	15
2. Teori Implementasi Kebijakan	16
3. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	19
4. Indikator Implementasi Kebijakan	23
5. Perencanaan (<i>Planning</i>)	26
6. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	28
7. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	32
7.a. Pengertian BOS	32
7.b. Latar Belakang	32
7.c. Defenisi, Tujuan dan Sasaran.....	33
7.d. Program BOS dan Pendidikan Dasar 9 Tahun	34
7.e. Program BOS dan Kearifan Lokal	36
7.f. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah .	38
7.g. Program BOS dan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP)	43
7.h. Kebijakan Program BOS Kementerian Pendidikan Nasional	44
7.i. Sekolah Penerima BOS	45
7.j. Pelaksanaan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOS	46
B. Kerangka Berpikir	55
C. Definisi Konsep dan Operasional.....	55

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Desain Penelitian.....	59
	B. Subjek Penelitian.....	60
	C. Prosedur Pengumpulan Data	61
	D. Jenis dan Sumber Data	63
	E. Analisis Data dan Bentuk Sajian Data	64
	F. Operasionalisasi Penelitian	67
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
	1. Lokasi dan Kondisi SDN 07 Lubuk Nibung	68
	2. Pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.....	70
	B. Analisis Implementasi Program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.....	72
	1. Tahapan Pertencanaan.....	73
	2. Tahapan Penyaluran	86
	3. Tahapan Penggunaan.....	90
	4. Hasil Pelaksanaan.....	108
	C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung	122

BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan.....	126
	B. Saran-saran	130
	DAFTAR PUSTAKA	133

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi BOS Tingkat Pusat	47
Bagan 2.2 Struktur Organisasi BOS Tingkat Provinsi	49
Bagan 2.3 Struktur Organisasi BOS Tingkat Kabupaten	51
Bagan 2.4 Struktur Organisasi BOS Tingkat Sekolah.....	53
Bagan 2.5 Kerangka Berpikir Penelitian	55
Bagan 2.6 Mekanisme Penyaluran BOS Tahun 2005-2010	57
Bagan 3.1 Model Analisa Interaktif	65

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Operasionalisasi Parameter	67
Tabel 4.1	Data Penduduk Desa Swadaya Tahun 2010	68
Tabel 4.2	Keadaan Siswa SDN 07 Lubuk Nibung Th. 2009/2010	70
Tabel 4.3	Penggunaan Dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung Tahun 2009/2010.....	72
Tabel 4.4	Data Penyimpangan Penggunaan Dana BOS di Kab. Sintang	100

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	136
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	138
Lampiran 3	Hasil Pelaksanaan Wawancara	140
Lampiran 4	Lembar Kerja Individu Sekolah	159
Lampiran 5	Daftar Nilai rata-rata UASBN 2008/2009-2010/2011	160
Lampiran 5	Rekapitulasi Kuisioner	161

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan sumber daya manusia, pendidikan menjadi domain utama bagi setiap warga Negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap Negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa pengecualian, pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat 1 telah mengamanatkan bahwa setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Visi Pendidikan Nasional adalah mewujudkan pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warganegara agar berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain: (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia (2) Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional, regional dan internasional (3) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global (4) Membantu dan memfasilitasi

pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral (5) Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan (6) Mendorong peranserta warga masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara kesatuan Republik Indonesia.

Terpuruknya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh berbagai krisis yang menimpa bangsa Indonesia, antara lain pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi karena ketidakmampuan kita bersaing di pasar global dan negara kita juga terlilit oleh banyak utang. Secara regulasi yang mengatur tentang masalah pendidikan terutama dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, tidak pernah secara tegas mengatur berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan, dalam RAPBN juga dalam setiap tahun bahkan dalam setiap repelita anggaran untuk pendidikan masih sangat kurang.

Belum pulih krisis yang terjadi pada tahun 1998, terjadi krisis lagi yaitu melambungnya harga minyak dunia pada tahun 2004 berdampak terhadap mahalnya biaya pendidikan di berbagai jenjang. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyak anak yang harus tidak melanjutkan atau putus sekolah karena tidak mampu lagi membiayai pendidikan. Tahun 2005 Indonesia yang berada dalam dunia global dan salah satu anggota OPEC, menetapkan pilihan yang paling pahit yaitu melakukan penyesuaian harga minyak dengan pasaran dunia. Kenyataan ini semakin membuat masyarakat menjerit yang diwarnai dengan berbagai kritik dan gejolak yang menuntut pemerintah untuk segera mengatasi biaya pendidikan.

Pada Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan siswa dari iuran sekolah dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) Sembilan Tahun. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP. Dalam konteks ini, pada prinsipnya program BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal Tahun Ajaran 2005/2006.

Secara konseptual Program BOS berbeda dengan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan sebelumnya. Sampai dengan tahun anggaran 2004/2005, PKPS-BBM bidang pendidikan untuk tingkat SD dan SMP diberikan dalam bentuk beasiswa bagi siswa miskin, yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM). Jumlah siswa miskin yang mendapat BKM ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan indeks kemiskinan. Pada tahun ajaran 2004/2005, BKM diberikan kepada sekitar 20% siswa SD dan 24% siswa SMP, dengan nilai beasiswa Rp.60.000 per semester per siswa tingkat SD dan Rp.120.000 per semester per siswa tingkat SMP. Setiap sekolah yang mendapat kuota tertentu, melakukan

seleksi siswa yang berhak menerima. Selanjutnya dana BKM diberikan langsung kepada siswa terpilih melalui kantor pos yang ditunjuk.

Kehadiran Program BOS diharapkan akan mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua murid, dan bahkan agar murid miskin dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Walaupun tujuan program tidak secara spesifik menekankan pendidikan gratis bagi siswa miskin, hal ini ditekankan dalam aturan pelaksanaan program. Aturan pelaksanaan program mengharuskan penghapusan iuran siswa bagi sekolah yang sebelum menerima BOS memiliki iuran siswa lebih kecil dari dana BOS. Sedangkan sekolah yang sebelum menerima BOS iuran siswanya lebih besar dari dana BOS masih boleh menarik iuran siswa, tetapi harus membebaskan iuran bagi siswa miskin dan mengurangi iuran siswa lainnya. Selain mengatur mengenai iuran siswa, dalam aturan penggunaan dana juga disebutkan bahwa sekolah dapat menggunakan dana untuk memberikan bantuan khusus berupa uang transportasi kepada siswa miskin yang dianggap membutuhkan.

Program BOS mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan BKM karena dana tidak diberikan kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin / tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2009,

APK SMP telah mencapai 98,11% dan MTs/PPS Wustha telah berkontribusi di dalamnya sebesar 21,97% serta MI/PPS Ula sebesar 12,44%. Dengan APK sebesar ini, maka dapat dikatakan bahwa program Wajib Belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Mulai tahun 2009, pemerintah telah melakukan perubahan tujuan dan orientasi, sehingga program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, tetapi harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar untuk mewujudkan pendidikan yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat pada pendidikan dasar.

Besar dana BOS diperhitungkan berdasarkan jumlah murid. SD Rp. 254.000 per siswa/tahun sedangkan SMP/MTs Rp.354.000/persiswa/tahun jumlah tersebut sesuai dengan buku panduan BOS tahun 2007. Sedangkan Kebijakan BOS Departemen Pendidikan Tahun 2009, biaya satuan BOS, termasuk BOS buku persiswa/tahun, mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi SD di kota Rp. 400.000, SD di Kabupaten Rp. 397.000, SMP di kota Rp. 575.000 dan SMP di Kabupaten Rp. 570.000.

Peningkatan biaya satuan BOS tahun 2009 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah bersungguh-sungguh mengemban amanat konstitusi penganggaran biaya pendidikan 20 %. Selain itu terbitnya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan memberikan kejelasan tentang tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menanggung pembiayaan pendidikan. Demikian juga

kebijakan program buku murah Kementerian Pendidikan Nasional yang dimulai tahun 2008, akan menjadi salah satu acuan utama program BOS tahun 2010.

Secara konseptual, sekolah menempati posisi kunci dalam penentuan penggunaan dana BOS, termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan khusus untuk siswa miskin. Menurut ketentuan program, dana BOS dikelola oleh kepala sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara, yang selanjutnya disebut Bendahara BOS. Uang dikirimkan langsung ke rekening sekolah oleh lembaga penyalur yang ditentukan oleh Tim PKPS-BBM (Satker) Provinsi. Sekolah boleh menggunakan dana tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai juklak program dan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah. RAPBS, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menerima BOS, harus mendapat persetujuan ketua komite sekolah.

Permasalahan yang sering terjadi memperlihatkan dominasi kepala sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS di hampir semua sekolah. Guru dan orang tua murid hampir tidak pernah diikutsertakan dalam proses penyusunan RAPBS tersebut, sedangkan komite sekolah umumnya hanya ikut menandatangani RAPBS yang telah disusun sekolah. Sekolah tidak selalu menggunakan dana BOS sesuai aturan dalam juklak. Hal ini terjadi karena sebagian besar pelaksana program menilai ketentuan penggunaan dana dalam juklak terlalu membatasi pemanfaatan dana BOS dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ada beberapa pengeluaran sekolah yang harus dipenuhi dan biasa dibiayai dari iuran siswa, yang tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan dana BOS. Bagi sekolah yang memiliki

sumber penerimaan selain BOS, hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan, tetapi hal ini menimbulkan masalah di sekolah yang hanya mengandalkan BOS sebagai sumber penerimaan.

Pada implementasinya di lapangan, masih banyak pihak yang kurang memahami tentang siapa saja para pihak yang terkait dengan penyaluran, penggunaan, maupun pertanggungjawaban dana BOS ini, dan bagaimana peranan atau fungsinya dalam Program BOS tersebut. Masih banyak pihak yang hanya menyerahkan beban itu kepada kepala sekolah dan tidak melakukan pengawasan. Akibatnya tidak sedikit kepala sekolah selaku pengelola dana BOS yang menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang diamanatkan dari penggunaan dana BOS itu sendiri. Pemahaman tentang siapa saja yang terkait dalam Program BOS sangat diperlukan dalam rangka memperjelas tentang batas-batas pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS. Hal ini diperlukan, terutama apabila timbul permasalahan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya 'kesalahan' dalam pengelolaan dana BOS.

Berkaitan dengan pelaksanaan program BOS, di Kabupaten Sintang dan kecamatan-kecamatan disekitarnya sudah dimulai tahun 2006. Dana bantuan BOS diterima langsung oleh masing-masing lembaga pendidikan, Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama baik negeri/swasta melalui nomor rekening Kepala Sekolah.

Permasalahan Program BOS di kabupaten Sintang dan kecamatan-kecamatan disekitarnya, secara konsep program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan

Wajib Belajar yang memadai dan bermutu, akan tetapi kenyataan praktek dilapangan pelaksanaan program BOS belum dapat berjalan seperti yang kita harapkan, hal ini dapat kita buktikan masih terdapat siswa tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai sepertinya mereka tetap saja dalam memperoleh layanan pendidikan selalu dibebani biaya pendidikan. Seperti kostum dan seragam sekolah yang besarnya bervariasi tergantung dari keinginan sekolah. Padahal keberadaan program BOS seharusnya dapat membantu meringankan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin agar mereka bisa layanan pendidikan tanpa dibebani dengan biaya pendidikan.

Pelaksanaan BOS di kabupaten Sintang dan kecamatan-kecamatan disekitarnya juga terkendala masalah pengawasan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan. Sulitnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait semakin terlihat di daerah-daerah yang jauh dari kabupaten Sintang, salah satunya kecamatan Ketungau Tengah.

Kecamatan Ketungau Tengah salah satu bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat posisinya berada di pedalaman dan perbatasan. Jumlah penduduknya menurut sumber data statistik yang ada di kantor kecamatan pada tahun 2009 sebanyak 29.632 jiwa terdiri. Usia anak yang berpeluang mengikuti pendidikan di SD dan SMP sebanyak 12.413 orang. Jumlah anak yang berusia 7-12 tahun sebanyak 4095, siswa yang sedang belajar di sekolah dasar sebanyak 5018 orang. Jumlah anak yang berada pada umur 13-15 tahun sebanyak 4095 orang. Yang melanjutkan pendidikan di SMP baru 985 orang atau kalau diprosentasekan,

Angka Partisipasi Murni (APM) baru 23,41 % sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) baru mencapai 1084 atau 26,47 % yang mengikuti Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Kondisi kecamatan Ketungau Tengah ini sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena belum ada sarana dan prasarana yang memadai, jalan yang berkubang lumpur pada musim penghujan dan bermandikan debu pada musim kemarau karena belum pengerasan dan belum di aspal, di sungai dan rawa-rawa belum ada jembatan, dan dalam pelayanan umum dalam bidang kesehatan belum ada rumah sakit dan pelayanan medis yang memadai. Kualitas kesehatan masyarakat masih tergolong rendah dan kebutuhan pokok masyarakat mahal sehingga biaya hidup masih sangat tinggi.

Transportasi dari dusun, desa, dan kecamatan ditempuh dengan cara tradisional mulai dengan berjalan kaki, lewat jalur sungai seperti dengan sampan, speed dan speedboat selain itu ada juga yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat itupun sangat bergantung dengan musim. Perjalanan ke kota kecamatan sangat bergantung pada musim. Kalau musim kemarau berjalan kaki dan menggunakan kendaraan beroda dua bagi yang memiliki kendaraan dan kebetulan dekat dengan jalan. Sedangkan musim penghujan umumnya masyarakat perhuluan sungai menggunakan speed yang menelan biaya cukup besar, karena berbahan bakar premium. Untuk perjalanan ke kabupaten Sintang menggunakan speedboat harus mengeluarkan biaya tiga ratus ribu pulang pergi pada musim penghujan dan empat ratus ribu musim kemarau. Kalau menggunakan mobil harus mengeluarkan biaya dua ratus ribu pulang pergi ke kabupaten Sintang.

Kecamatan Ketungau Tengah memiliki lembaga pendidikan sebagai berikut: 31 sekolah dasar negeri, 1 sekolah dasar swasta, 4 sekolah menengah pertama negeri 2 sekolah menengah pertama swasta, 1 sekolah menengah atas negeri, 1 sekolah menengah kejuruan negeri, 1 sekolah menengah atas swasta. Dua sekolah dasar negeri berada dalam kota kecamatan selebihnya berada tersebar diseluruh dusun dan desa.

Sebanyak 32 SD yang ada di kecamatan Ketungau Tengah, seluruhnya sebagai penerima dan pengguna dana BOS. Peneliti memilih salah satu sekolah yang cukup menarik perhatian untuk dilakukan penelitian. Pertama sering terjadi masalah antara pihak sekolah dengan masyarakat. Guru yang pernah bertugas di sana lari atau pindah ke sekolah lain karena mendapat perlakuan yang kurang baik dari masyarakat setempat sehingga membuat mereka menjadi tidak betah. Contoh perlakuan yang tidak senonoh antara lain meja dan lemari guru di sekolah menjadi tempat membuang air besar. Ada kasus seorang kepala sekolah terpaksa lari dan pindah ke sekolah lain karena diusir paksa oleh masyarakat setempat dengan tuduhan tidak transparan dalam pengelolaan dana sekolah. Dampak dari peristiwa di atas menyebabkan para guru yang ditugaskan disana menjadi takut, sehingga sekolah tersebut pernah ditinggalkan dan tutup selama 9 bulan pada tahun 2005 yang lalu.

Sekolah itu dibuka kembali dengan menempatkan tiga orang guru, dua diantaranya pengangkatan baru, sementara kepala sekolah dimutasikan dari sekolah lain. Dengan penempatan tiga tenaga guru tersebut sekolah mulai beroperasi kembali, meskipun belum sepenuhnya normal, karena pada tahun-tahun pertama, banyak anak yang dinyatakan lulus oleh sekolah bersangkutan,

ketika melanjutkan ke SMP tidak mampu bertahan dan kebanyakan berhenti ditengah jalan. Kalaupun mereka bertahan, rata-rata mereka mengulang kelas.

Seiring perjalanan waktu sedikit demi sedikit sudah ada perbaikan, tetapi masalah yang mengindikasikan adanya ketidakterbukaan pihak sekolah berkaitan dengan pengelolaan dana yang diterima sekolah selalu didengungkan, mereka beranggapan bahwa komite sekolah dan masyarakat tidak dilibatkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan BOS di daerah tersebut. Pada penelitian ini, penulis memilih salah satu desa yang tepatnya berada dalam wilayah Kecamatan Ketungau Tengah yaitu desa Swadaya.dengan pusat desanya berada di Lubuk Nibung. Daerah ini boleh dibilang agak terisolir, karena agak jauh dari jalan utama. Untuk menjangkau daerah ini, pada musim penghujan bisa ditempuh dengan *speedboat*, jika kemarau dapat melewati jalan darat yang baru dikerjakan seadanya oleh masyarakat setempat. Sebagai lokus dari penelitian ini, peneliti memilih SDN 07 Lubuk Nibung yang merupakan salah satu penerima dana BOS.

Keterarikan untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan BOS adalah dana BOS tersebut tidak diberikan langsung kepada siswa akan tetapi diterima dan dikelola oleh sekolah dan program BOS belum pernah dievaluasi, baik oleh lembaga sekolah maupun lembaga lain sehingga sampai saat ini belum mengetahui seberapa manfaat dan cakupan, pemerataan BOS bagi siswa/siswi miskin atau kurang mampu.

Peneliti berpikir yang positif tentang penggunaan Dana BOS baik terhadap kepala sekolah, guru-guru, orang tua siswa dan komite sekolah di

sekolah bersangkutan karena dana BOS digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan walaupun pada kenyataan tidak selalu sesuai dengan yang dicitakan. Tidak jarang terdengar desas-desus yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan oleh orang-orang yang dianggap paling bertanggungjawab dengan masalah BOS ini. Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap masalah ini, karena dianggap relevan dan sangat menarik perhatian semua pihak yang peduli dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu untuk mengetahui proses pelaksanaan program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung, peneliti perlu mengadakan kajian secara mendalam dengan didukung oleh teori-teori terkait. Penelitian ini akan mengangkat judul "Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. Studi Kasus : SDN 07 Lubuk Nibung.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan pelaksanaan Program BOS bagi Wajar Sembilan (9) Tahun sangat kompleks, baik pada skala nasional, regional, maupun pada tingkat sekolah. Walaupun telah diterbitkan berbagai instrumen dan regulasi yang mengaturnya, tetapi kondisi secara umum menunjukkan pelaksanaan program BOS belum mampu memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat dan masyarakat miskin yang berada di wilayah perbatasan, pedalaman dan terisolir secara berkualitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan masalah sebagai berikut:

- a) Penggunaan dana BOS tidak melibatkan atau musyawarah dengan orang tua/wali dan komite sekolah

- b) Penggunaan dan BOS belum pernah dipublikasikan secara transparan baik dengan guru, komite dan orang tua siswa.
- c) Belum ada data yang menjelaskan tentang siswa miskin yang mendapat bantuan dari dana BOS.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang dilihat dari pelaksanaan, penyaluran, penggunaan, pengawasan dan hasilnya ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala keberhasilan pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung ?
3. Bagaimana permasalahan implementasi BOS dilihat dari sudut pandang kearifan lokal, MBS, RKS dan KTSP di SDN Nomor 07 Lubuk Nibung ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan pelaksanaan program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang
2. Mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala keberhasilan pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.
3. Mendiskripsikan permasalahan implementasi dilihat dari sudut pandang kearifan lokal, MBS, RKS dan KTSP

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik terutama kajian terhadap implementasi kebijakan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang melaksanakan penelitian dengan tema yang sama.
2. Secara praktis
 - a. Masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang untuk lebih memperhatikan kualitas pendidikan dan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan di daerah terpencil.
 - b. Masukan secara khusus kepada kepala sekolah SDN 07 Lubuk Nibung dan setiap sekolah penerima bantuan BOS secara umum untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan BOS secara optimal.
 - c. Masukan kepada seluruh anggota komite sekolah dan masyarakat agar berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan ambil bagian secara aktif dalam merencanakan dan mengawasi penggunaan dana BOS agar tepat guna dan tepat sasaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Teori Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan usaha untuk memperoleh data atau informasi untuk memberikan alternatif cara pemecahan suatu masalah, ataupun cara alternatif pencapaian tujuan (Wibawa, 1994). Tujuan analisis yang “bebas” berpindah dari satu tahapan ke tahapan lain ini adalah agar permasalahan dapat dipahami dengan lebih baik, informasi dapat bertambah, dan mungkin juga berbagai alternatif tambahan dapat diperoleh untuk pemecahan masalah. Atau juga yang lain, misalnya mengamati bahwa muncul banyak keluhan, protes atau tuntutan dari masyarakat tentang hal-hal tertentu. Akan tetapi, pertama-tama perlu diketahui apakah permasalahan yang sesungguhnya sehingga muncul suatu kondisi yang tidak memuaskan tersebut? Tujuan yang ingin dicapai adalah permasalahan tersebut dapat diurai, dicari penyebabnya, kemudian dicari cara pemecahannya dengan memperbaiki atau membuat sebuah kebijakan baru untuk mengatasinya.

Kondisi yang tidak memuaskan tersebut dapat saja terkait dengan banyak permasalahan, yang bahkan tidak ada satupun yang dapat didefinisikan dengan jelas. Beberapa masalah bahkan saling terkait erat sehingga sulit ditemukan inti permasalahannya. Suatu kondisi menurut Ackoff (1974) adalah *a mess*, kacau dan berantakan, suatu keadaan yang dapat jadi sangat membingungkan dan sulit diurai. Sulit ditemukan mana penyebab dan mana yang

merupakan akibat. Mana yang merupakan inti masalah dan mana yang merupakan gejala masalah atau dampak.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dunn (1994:24-25) menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan, penting dilakukan analisa. Analisa di sini tidak identik dengan evaluasi, karena dari tahapan penyusunan agenda hingga *Policy Evaluation* sudah harus dilakukan analisa. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu proses yang kompleks yang berangkat dari tahap pendefinisian masalah hingga evaluasi dampak kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap sejak dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan didalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain Terdapat beberapa teori implementasi antara lain:

Menurut pendapat Edward (2003: 12-13) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel adalah:

- a. Komunikasi, agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang bertanggungjawab adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan.
- b. Sumber daya, jika personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang sumberdaya untuk

- melakukan sebuah pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif pula.
- c. Disposisi, sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik.
 - d. Struktur birokrasi, jika sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi.

Sedangkan menurut Grindle dalam Subarsono (2005:93) Implementasi

dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu:

- a. Variabel isi kebijakan, mencakup: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, (siapa) pelaksana program dan sumberdaya yang dikerahkan
- b. Variabel lingkungan kebijakan, mencakup: Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Seterusnya menurut Meter dan Horn (Tangkilisan,2003:20)

menyatakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi 6 faktor, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.
- b. Sumberdaya kebijakan berupa dana pendukung implementasi.
- c. Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memaknai tujuan yang hendak dicapai.
- d. Karakteristik pelaksanaan, yaitu karakteristik organisasi yang merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program.
- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan.
- f. Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

Demikian juga menurut Mazmanian dan Sabatier (Eriza,2006:31) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- a. Variabel independent, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- b. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksanaan dan keterbukaan kepada pihak luar.
- c. Variabel dependent, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk kebijakan pelaksanaan, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata dan kebijakan yang bersifat mendasar.

Selanjutnya menurut teori Cheema dan Rondinelli (1983) Analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralisasi, ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni:

- a. Kondisi lingkungan.
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Sedangkan menurut Jones (1994:296) ada tiga pilar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Organisasi, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.
- b. Interpretasi, maka mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau

- ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Penerapan, peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Studi implementasi adalah studi perubahan yang terjadi dan perubahan bisa dimunculkan, juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik yaitu organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain dan motivasi yang membuat bertindak secara berbeda (Persons, 2005:463).

Setiap perumusan suatu tindakan apakah itu menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi, karena suatu kebijaksanaan tanpa diimplementasikan maka tidak akan banyak berarti.

Saluru (1996) mendefinisikan implementasi sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. Higgins dalam Wahab (2001) menyatakan bahwa implementasi adalah kegiatan itu menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan lini paling bawah.

Proses implementasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai tindakan-tindakan baik dari institusi pemerintah maupun swasta atau kelompok masyarakat yang diarahkan oleh keinginan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Sedangkan implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan mencakup kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah diberlakukannya kebijakan negara, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun akibat/dampak nyata pada masyarakat. Kebijakan ditransformasikan secara terus menerus melalui tindakan-tindakan implementasi sehingga secara simultan mengubah sumber-sumber dan tujuan-tujuan yang pada akhirnya fase implementasi akan berpengaruh pada hasil akhir kebijakan.

Proses implementasi kebijakan negara merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Implementasi program pemerintah melibatkan berbagai tingkatan struktur organisasi dan sekurang-kurangnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang (Wahab, 2001;63) yaitu:

- a. Penerakarsa kebijakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk dilaksanakan oleh lembaga-lembaga antar pejabat di tingkat yang lebih rendah. Penekanan utama terletak pada masalah sejauh mana sasaran-sasaran atau tujuan kebijakan telah tercapai dan apakah penyebab tujuan/sasaran tercapai atau tidak tercapai.
- b. Pejabat pelaksana di lapangan, fokusnya terletak pada upaya menanggulangi hambatan yang terjadi di wilayah kerjanya.
- c. Aktor perorangan di luar pemerintah kepada siapa proyek itu ditujukan, misalnya kelompok sasaran pengusaha kecil dan Koperasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pandangan/persepsi pejabat di pusat adalah sejauhmana pelayanan jasa yang direncanakan telah dilaksanakan. Dari sisi kelompok sasaran fokus perhatiannya adalah apakah

pelayanan jasa yang telah diberikan pemerintah dapat mengubah pola hidupnya.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (1989:146) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Standar dan sasaran kebijakan didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Faktor-faktor implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Menurut Edwards (2003:1), implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun

kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Selanjutnya Charles O'Jones dalam Harahap (2004:15) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Gustina (2008), menjelaskan lebih lanjut bahwa konsep implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Drucker (Eriza,2006) merumuskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan terlebih dahulu. Sedangkan Wibawa dalam Tangkilisan (2003:20) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi juga dikemukakan oleh Mclaughin dalam Nurdin dan Usman (2004). Adapun Schubert dalam Nurdin dan Usman (2002:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa”.

Berdasarkan pendapat para ahli dalam menentukan tahapan implementasi kebijakan tersebut, terlihat bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap sesuatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun implementasi kebijakan yang sesuai dengan penelitian ini adalah menggunakan teori Charles O’Jones dengan melalui tiga pilar yaitu organisasi, interpretasi dan pelaksanaan dikarenakan lokasi penelitian ini merupakan daerah yang berada di wilayah pedalaman, perbatasan dan terisolir masih sangat membutuhkan peraturan daerah, sarana, prasarana dan tenaga profesional untuk mendukung teori tersebut yaitu struktur organisasi, keahlian pelaksana, perlengkapan alat uji, qanun yang sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan petunjuk pelaksana dan teknis, prosedur kerja dan program kerja yang jelas serta jadwal kegiatan pelaksanaan yang tetap.

4. Indikator Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplemetasikan dilakukan penilaian terhadap keberhasilannya, apakah telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau belum, untuk itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut. Konsep kinerja kebijakan senantiasa diartikan sebagai apa yang dilihat dari

program yang telah dilaksanakan. Hal ini menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Cheema dan Rondinelli (1983:31), mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari performansi kebijakan yang mencakup pencapaian tujuan, peningkatan kemampuan pemerintah di unit-unit lokal guna merencanakan dan memobilisasi sumber daya, peningkatan produktivitas dan pendapatan, peningkatan partisipasi masyarakat serta peningkatan akses fasilitas pemerintah.

Berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat diketahui melalui evaluasi kebijakan dengan yang memiliki fungsi menurut Dent (1994) sebagai berikut :

- a. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemikiran tujuan dan target.
- c. Memberi sumbangan pada aplikasi dan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan tersebut. Namun kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2001) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam 2 (dua) kategori, yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccesfull implementation* (implementasi yang tak berhasil).

Kegagalan kebijakan publik menurut Andrew Dunsire dalam Wahab (2001) dinamakan sebagai *implementation gap*, yaitu suatu istilah yang

dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang disebut oleh Walter Williams dalam Wahab (2001) sebagai *implementation capacity* dari organisasi/ aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (dalam dokumen formal) dapat dicapai.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan sasaran merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan. Pengukuran dimaksud sebagaimana pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) adalah bahwa : Suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kegiatan kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dari sasaran tersebut.

Menurut Martin dan Kettner (1996) bahwa ukuran pelaksanaan kebijakan mengkombinasikan tiga perspektif pertanggungjawaban yaitu : (1) perspektif efisiensi (*efficiency perspective*), (2) Perspektif kualitas (*quality perspective*), (3) Perspektif efektifitas (*effectiveness perspective*).

Sebagai indikator dari ketiga pelaksanaan kebijakan tersebut (*output, quality output dan outcomes*) memiliki perbedaan antara satu sama lainnya. Lebih lanjut Martin dan Kettner (1996) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan terdiri atas *policy goal, policy outcomes* dan *policy performance (policy output + policy goals)*. Apabila *policy outcomes* jauh dibawah *policy goal*, maka *policy*

performancenya rendah. Akan tetapi bila *policy outcomes* jauh lebih tinggi dari *policy goals*, maka *policy performance* (pelaksanaan kebijakan) tinggi.

Secara lebih rinci dapat dikemukakan bahwa di dalam perpektif *policy outcomes* itu sendiri terdiri atas : (1) *economic benefit*, (2) *subject well being*, (3) *equity*, dan (4) *integration social*. Keempat perspektif indikator pengukuran tersebut perlu diperhatikan di dalam kebijakan publik. Namun bukan berarti keempat perspektif tersebut diukur atau digunakan secara bersamaan, akan tetapi dipilih sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian (Martin dan Kettner, 1996).

5. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi awal yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan bisa diartikan sebagai kegiatan atau kerja bisa diartikan juga suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Harold Koontz dan Cyril O. Donnell dalam Herry Suharyadi (2000:2.3) berpendapat bahwa : *Perencanaan adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan/mencapai tujuan atau tujuan-tujuan yang telah ditentukan*". Suatu perencanaan yang baik menurut Luther Gulick dalam Herry Suhardi (2000) memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tujuannya dirumuskan secara jelas.
- b. Sifatnya harus sederhana, dalam arti tidak muluk-muluk melainkan rasional sehingga mudah dipahami.

- c. Memuat analisa-analisa dan penjelasan serta penggolongan tindak usaha yang direncanakan untuk dilakukan dan pedoman kegiatan yang akan dilakukan.
- d. Mempunyai sifat *fleksibel*, dalam arti *planning* harus selalu dapat menyesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah.
- e. Adanya keseimbangan : *ke dalam* artinya keseimbangan bagian proyek pada rencana. *Keluar*, artinya keseimbangan antara tujuan dan syarat-syaratnya.
- f. Adanya kesan bahwa segala sesuatu yang tersedia (tenaga, biaya, sumber-sumber yang tersedia) digunakan secara efisien dan efektif. Wilson dalam Herry Suharyadi (2000:2.7) menemukan manfaat dari perencanaan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan itu penting karena di dalamnya digariskan secara jelas dan tepat tujuan-tujuan baik yang berjangka panjang maupun yang berjangka pendek dan digariskan pula apa saja yang harus dilakukan agar tercapai tujuan-tujuan itu.
 - b. Perencanaan itu merupakan petunjuk jalan (*guide*) bagi seluruh anggota organisasi yang ikut serta dalam pelaksanaan perencanaan itu. Dengan adanya perencanaan, arah usaha yang bersangkutan dapat selalu dipegang oleh segenap anggota, disamping itu memudahkan dilakukannya koordinasi atau hubungan kerjasama antar bagian atau anggota dalam organisasi.
 - c. Perencanaan bukan suatu karya yang sekaligus saja tetapi suatu proses yang terus-menerus, maka setiap *planning* diharapkan selalu dapat

memberi perhatian yang terus menerus untuk menunjukkan dan mempertinggi praktek dan cara-cara bekerja para anggota organisasinya.

- d. Perencanaan itu merupakan alat pengendalian (*=means of control*) untuk mengendalikan atau mengawasi pelaksanaan.
- e. Perencanaan yang baik menjamin penggunaan sumber-sumber yang tersedia (manusia, keuangan, alat-alat, dan lain-lain) secara efektif dan ekonomis dan dapat menghindarkan pemborosan-pemborosan yang tidak perlu.

6. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau mendapat hasil sesuai dengan yang dikehendaki. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan maka harus dilakukan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengendalian, dan pelbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan bilamana perlu mengatur dan mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, maupun ketidakcocokan agar dapat menempuh langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan. Henry Fayol dalam Herry Suharyadi (2000:2.26) dalam bukunya *General Industrial management* mengemukakan tentang pengawasan :

“ Dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah

ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal-hal lainnya”.

Harold Koontz dan Cyril O. Donnel dalam bukunya *Principles of Management* menulis bahwa “ Pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan”. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas mau mengatakan “ perencanaan dan pengawasan adalah kedua sisi dari sebuah mata uang”. Rencana tanpa pengawasan akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dengan tanpa alat untuk mencegahnya. Ataupun andaikata tujuan tercapai juga, tercapainya itu dengan pengorbanan yang besar karena dalam pelaksanaannya inefisiensi dan pemborosan tanpa ada pencegahan atau perbaikan. Mardiasmo (2004) dalam buku “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*” menyatakan bahwa pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kerja pemerintahan. Untuk tingkat sekolah ini berarti dilakukan oleh pihak-pihak di luar dinas pendidikan dan sekolah itu sendiri (masyarakat dan LSM). Cakupan pengawasan di tingkat sekolah meliputi kegiatan *reviu*, evaluasi, pemantauan (*monitoring*) dan bentuk kegiatan pengawasan lainnya. Yang merupakan fokus dari pengawasan adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi sekolah sehingga di dapat keyakinan yang memadai bahwa kegiatan di sekolah telah dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku dan tolok ukur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien. Di Indonesia kita mengenal beberapa jenis pengawasan antara lain sebagai berikut :

1. Pengawasan melekat (*built in control*)
2. Pengawasan fungsional
3. Pengawasan masyarakat
4. Pengawasan Legislatif

Sedangkan dalam buku panduan BOS (2007:44) pengawasan program BOS meliputi : 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya (pengawasan melekat). 2) Pengawasan Fungsional pengawasan BOS yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) , Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal serta Badan Pengawas Daerah (Bawasda). 3) Pengawasan dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS bisa diawasi oleh unsur masyarakat (Pengawasan Masyarakat).

Pengawasan juga dapat dilakukan oleh pihak yang berada diluar organisasi, dalam hal ini di luar sekolah, dalam bentuk yang beragam, antara lain:

1. DPRD melakukan pengawasan ke sekolah dalam bentuk monitoring, dengar pendapat dan kunjungan kerja.
2. Tim manajemen BOS Provinsi/kabupaten/kota melakukan pengawasan dalam bentuk melakukan *reviu*, monitoring dan evaluasi
3. Sekretaris Provinsi/kabupaten/kota, dewan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat melakukan monitoring terhadap sekolah.

Dalam buku Panduan BOS 2011, kegiatan pengawasan disebut dengan monitoring yang dibedakan menjadi:

1. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan Program BOS.
2. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga independen lainnya yang kompeten.

Komponen utama yang dimonitor antara lain: alokasi sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan dan pelaporan.

Secara teknis perbedaan mendasar dari pengawasan dan monitoring terletak pada fokusnya. Pengawasan memfokuskan pada orang-orang yang mengelola program atau melaksanakan kegiatan, sementara pada monitoring fokusnya adalah komponen-komponen program/kegiatan.

Pengawasan yang bermutu artinya bahwa pengawasan yang dilakukan tepat waktu, sesuai dengan peraturan, memberikan sumbangan berarti bagi instansi yang diawasi/diperiksa untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan dalam mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

7. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Pengertian BOS

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dapat dibaca pada buku panduan BOS itu sendiri.

b. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh

peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar.

c. Definisi, Tujuan dan Sasaran

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar. Namun demikian dana BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya investasi (Suyanto, 2009)

Lebih lanjut Suyanto (2009) mengatakan bahwa tujuan umum BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus BOS memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

- 1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta
- 2) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)
- 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta

Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP (termasuk SMPT), baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

d. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010), dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu.
- 2) Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
- 3) Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.
- 4) Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
- 5) Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
- 6) BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak ada intimidasi bagi yang tidak menyumbang.

e. **Program BOS dan Kearifan Lokal**

Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai 'kearifan/kebijaksanaan'.

Local secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut setting. *Setting* adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan *face to face* dalam lingkungannya. Sebuah setting kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah-laku mereka.

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Greertz dalam Nurma Ali Ridwan (2007) mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya

berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya.

Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Kearifan lokal lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas kelompok. Kearifan lokal ini menggambarkan cara bersikap dan bertindak kita untuk merespon perubahan-perubahan yang khas dalam lingkup lingkungan fisik maupun kultural.

Dalam kelompok masyarakat Dayak yang merupakan mayoritas di Kecamatan Ketungau Tengah dan di desa Swadaya Lubuk Nibung, musyawarah atau rapat untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak pada prinsipnya merupakan keharusan. Karena dengan demikian tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kurang mengenakan. Berkaitan dengan BOS yang menyangkut kepentingan banyak orang hendaklah juga tidak dilepaskan dari tradisi atau kebiasaan masyarakat yang sebelum melakukan sesuatu selalu bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat. Hal ini sejalan dengan program BOS yang selalu menekankan adanya transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi dari berbagai pihak.

f. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah membutuhkan kepemimpinan iklim sekolah yang kondusif. Betapa pentingnya iklim sekolah yang kondusif sehingga Caldwell dan Spink (1998) dalam Aria Djalil (2009:228) yang ditulis dalam buku : “ Meningkatkan Kinerja Ujian Akhir Nasional : *Saran bagi Kepala Sekolah, Guru Siswa, Orang Tua Siswa dan Komite Sekolah* “ menyuguhkan daftar yang panjang untuk kepemimpinan yang semestinya tercipta di sekolah:

1. Sekolah mempunyai seperangkat nilai etika moral dan etos yang dianggap penting;
2. Kepala sekolah, guru dan murid menunjukkan kepedulian dan loyalitas terhadap tujuan sekolah dan nilai nilai;
3. Sekolah menumbuhkembangkan lingkungan dan suasana yang menyenangkan, menggairahkan, dan menantang (*challenging*) bagi guru dan murid;
4. Adanya iklim saling menghargai dan saling mempercayai sesama di antara guru dan murid;
5. Adanya iklim saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka di sekolah;
6. Adanya iklim espektasi terhadap semua siswa bahwa mereka akan berperilaku dan bertindak sebaik-baiknya. Adanya komitmen yang kuat untuk belajar sungguh-sungguh.
7. Kepala Sekolah, guru dan siswa mempunyai semangat yang tinggi untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi;

8. Adanya *morale* (semangat juang) yang tinggi di kalangan siswa;
9. Para siswa saling menaruh respek terhadap sesamanya dan terhadap barang-barang milik mereka;
10. Adanya kesempatan bagi siswa untuk mengambil tanggung jawab di sekolah;
11. Adanya disiplin yang baik di sekolah;
12. Jarang sekali ada kejadian yang menuntut staf sekolah untuk turun tangan menertibkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa (karena tidak ada lagi pelanggaran yang mengganggu);
13. Adanya tingkat kemangkiran yang rendah di kalangan siswa;
14. Adanya tingkat mengulang kelas yang rendah;
15. Adanya tingkat kenakalan siswa yang rendah;
16. Adanya *morale* (semangat juang) yang tinggi di kalangan guru;
17. Adanya tingkat persatuan (*cohesiveness*) dan semangat yang tinggi di kalangan guru;
18. Adanya tingkat kemangkiran yang rendah di kalangan guru; dan
19. Sedikit sekali permohonan dari guru untuk pindah ke sekolah lain (karena mereka merasa nyaman dan aman).

Karena itu Aria Djalil (2009:229) terkait Manajemen Berbasis Sekolah menyarankan kepala sekolah dan guru untuk:

1. Menyediakan berbagai peluang bagi orang tua siswa untuk melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sekolah;

2. Mengembangkan sistem penghargaan sesuai dengan umur siswa sebagai tanda pengakuan dan pengukuhan atas prestasi istimewa yang mereka capai;
3. Mengelola sekolah dengan cara-cara yang merefleksikan keberlangsungan keterlaksanaan kurikulum; dan
4. Menciptakan cara-cara agar pemberian informasi kepada orang tua siswa mengenai hal-hal yang terkait dengan sekolah dan kemajuan siswa dapat berlangsung secara teratur. Ini hanya dapat tercapai jika prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam manajemen dan tatakelola (*governans*) pendidikan diterapkan.

Dalam pengertian umum manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari manajemen keuangan secara keseluruhan, pemisahan yang dilakukan untuk setiap tingkat bukanlah untuk membedakan pengelolaan keuangan di tingkat sekolah, melainkan sekedar memperlihatkan fokus pada kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan di masing-masing tahapan. Secara umum manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan dimana kemudian fungsi-fungsi ini diterjemahkan dalam kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki organisasi.

Pada dasarnya, manajemen keuangan di tingkat sekolah tidak berbeda dengan pengertian yang berlaku umum. Depdiknas (2010) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan kata lain manajemen keuangan sekolah rangkaian aktivitas

yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah merupakan hal penting dalam pengelolaan sekolah secara keseluruhan, sejalan dengan tugas dan tanggungjawab sekolah dalam mengelola secara langsung dana penyelenggaraan pendidikan melalui program BOS. Tujuan manajemen keuangan ditingkat sekolah adalah:

- a. Mengelola penggunaan dana sekolah secara transparan dan akuntabel,
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah,
- c. Mendorong pemanfaatan dana sekolah secara lebih ekonomis,
- d. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah,
- e. Memupuk kreativitas pencarian sumber pendanaan sekolah, dan
- f. Mendorong kompetensi penanggungjawab keuangan sekolah.

Berdasarkan pemaparan diatas, dengan mengutip pendapat Aria Djalil (2009:243) : “BOS diharapkan menaikkan harkat dan martabat sekolah jika dengan BOS sekolah tidak di miskinkan”. Karena dengan demikian memberdayakan masyarakat sekolah. Yang dimaksud masyarakat sekolah adalah kepala sekolah, guru, staf sekolah, siswa, orang tua siswa, dan komite sekolah. Yang memiliki hak tertinggi dalam mengambil keputusan, sehingga manajemen berbasis sekolah betul-betul berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010), dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara

umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan proses, mutu dan manajemen sekolah.
- 3) Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- 4) Sekolah harus menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral didalam RKAS tersebut.
- 5) Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). Seluruh peserta rapat ikut tanda tangan berita acara persetujuan. Secara rinci diatur dalam Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

g. Program BOS dan Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 butir 19 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

KTSP adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang merupakan kurikulum operasional yang di susun oleh satuan pendidikan dan dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan. Yang memuat Tujuan Satuan Pendidikan, Struktur dan Muatan Kurikulum, kalender dan silabus satuan pendidikan.

KTSP merupakan salah satu realisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah yang bersangkutan dimasa sekarang dan di masa datang dengan mempertimbangkan kepentingan global dan semangat manajemen berbasis sekolah. Menurut Aria Djalil (2009:245) “niat Kurikulum Satuan Pendidikan sejatinya dimaksudkan untuk memberi kewenangan sekolah dalam mengelola kurikulum, termasuk kurikulum muatan lokal”. Dalam keadaan mendekati ideal selain tentang kurikulum sebagaimana yang diangkat oleh Caldwell and Spink, 1998; juga Ismet, 1996 dalam Aria Djalil (2009:245) masyarakat sekolah hendaknya diberi hak untuk mengelola tujuh sumber daya yaitu: pengetahuan berupa keputusan yang berhubungan dengan kurikulum; teknologi berupa

keputusan yang terkait dengan alat pengajaran dan pembelajaran; *power* berupa kewenangan dalam membuat dan mengambil keputusan; material berupa keputusan yang terkait dengan penggunaan fasilitas; personel berupa keputusan dalam alokasi tenaga; waktu berupa keputusan yang terkait dengan waktu pengajaran dan pembelajaran; keuangan berupa keputusan yang terkait dengan alokasi dan penggunaan keuangan. Dalam lingkungan pendidikan Dasar 9 Tahun penggunaan yang dimaksud adalah bagaimana mengalokasikan dan menggunakan sumber dana yang berasal dari BOS dan Komite Sekolah.

h. Kebijakan Program BOS Kementerian Pendidikan Nasional

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010), kebijakan dasar pelaksanaan program BOS adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi: SD di kota Rp 400.000, SD di kabupaten Rp 397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp 570.000.
- 2) Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasi sekolah, kecuali RSBI dan SBI.
- 3) Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasi di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan pada siswa mampu.
- 4) Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta menyanksi kepada pihak yang melanggarnya.

- 5) Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasi sekolah dari APBD.
- 6) Pemda wajib menyediakan dana untuk pengelolaan dan monitoring program BOS bagi Tim Manajemen BOS provinsi/ kab/kota, serta pengawasan program BOS dari sumber APBD.

i. Sekolah Penerima BOS

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010), kriteria sekolah yang berhak menerima dana BOS adalah:

- 1) Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- 2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS.
- 3) Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
- 4) Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan

mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

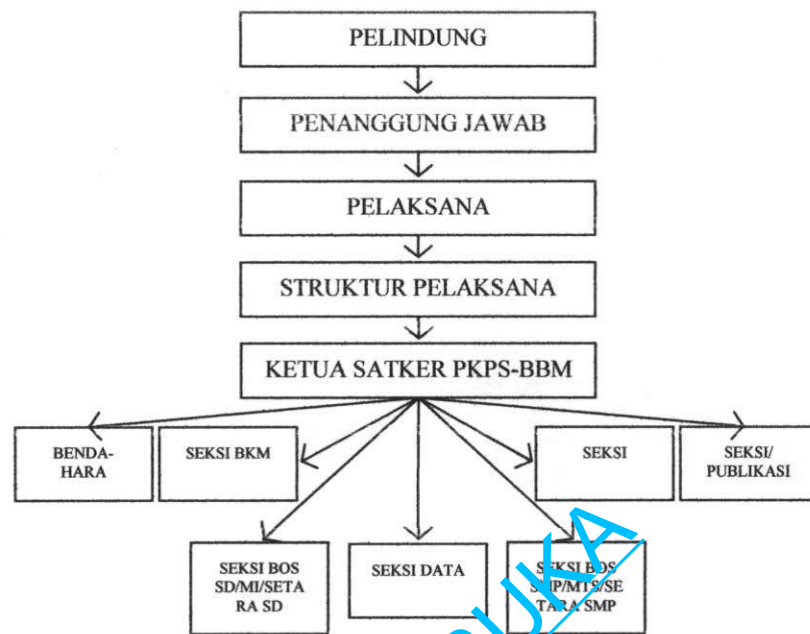
- 6) Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.

j. Pelaksanaan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOS

Pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan oleh organisasi pelaksana yang sebut Tim PKPS-BBM serta Sekolah/Madrasah yang memperoleh alokasi dana BOS. Tim PKPS-BBM dibentuk di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Organisasi Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1) Tingkat Pusat

Tim manajemen BOS ini berada di pemerintah pusat dengan penanggungjawab umum Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Berikut ini susunan organisasi tim manajemen BOS tingkat pusat.



Bagan 2.1. Struktur Organisasi BOS Tingkat Pusat
sumber : Kementerian Pendidikan Nasional, 2010

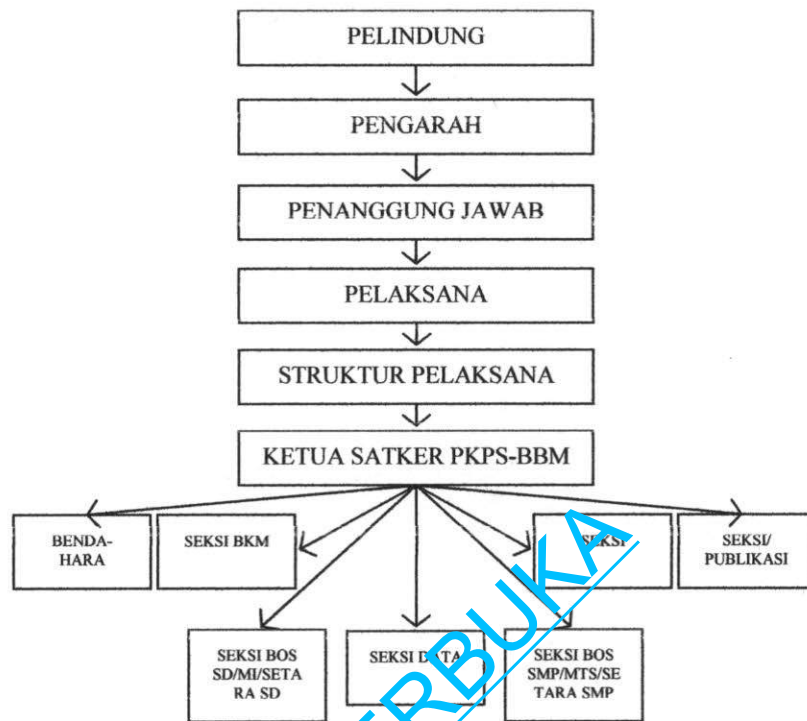
Tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS pusat ini adalah:

- Menyusun rancangan program.
- Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap provinsi.
- Merencanakan dan melakukan sosialisasi program.
- Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen BOS Provinsi.
- Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran buku panduan pelaksanaan program.
- Menyusun database sekolah tingkat nasional.
- Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi atau Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
- Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait.
- Menyusun laporan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tiap triwulan menggunakan dengan melampirkan laporan dari tiap provinsi.

2) Tingkat Provinsi

Tim manajemen BOS ini berada di pemerintah provinsi dengan penanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Berikut ini susunan organisasi tim manajemen BOS tingkat provinsi.



Bagan 2.2. Struktur Organisasi BOS Tingkat Provinsi

sumber : Kementerian Pendidikan Nasional, 2010

Tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS provinsi ini adalah:

- Menetapkan alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota.
- Mempersiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat provinsi.
- Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
- Melakukan pendataan penerima bantuan.

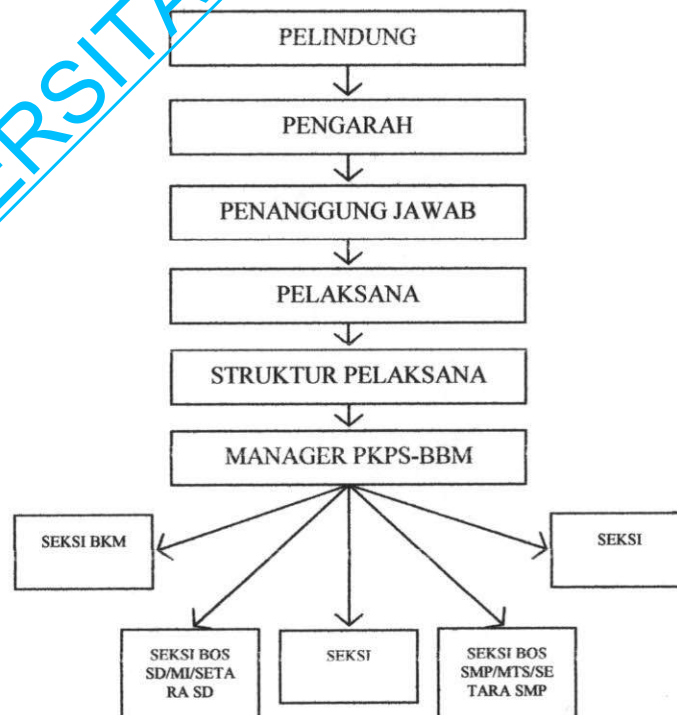
- Menyalurkan dana ke sekolah sesuai dengan haknya (jumlah siswa).
- Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajemen BOS Kab/Kota dalam penyaluran dana.
- Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat provinsi.
- Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Pusat dan instansi terkait.
- Menyusun laporan pencairan dan penyaluran dana BOS tiap triwulan menggunakan format FS-2 sesuai dengan format BOS-16.
- Dianjurkan untuk mengumumkan daftar sekolah penerima dana BOS dan besarnya di surat kabar, radio atau media lainnya, dengan menggunakan sumber dana dari APBD.
- Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen BOS dari sumber APBD.
- Jika ada, segera melakukan realokasi dana BOS dari sekolah yang kelebihan dan kekurangan dana yang disebabkan oleh kesalahan pendataan.
- Mengembalikan sisa dana yang ada di rekening penampung sebelum tahun anggaran berakhir ke kas negara. Kelebihan

dana yang dimaksud adalah kelebihan dana setelah seluruh hak sekolah penerima dana BOS terpenuhi.

- Menampung kelebihan dana dari sekolah yang disebabkan oleh kelebihan data jumlah siswa dan selanjutnya mengembalikan ke kas negara jika seluruh hak sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi.

3) Tingkat Kabupaten/Kota

Tim manajemen BOS ini berada di pemerintah kabupaten/kota dengan penanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Berikut ini susunan organisasi tim manajemen BOS tingkat provinsi.



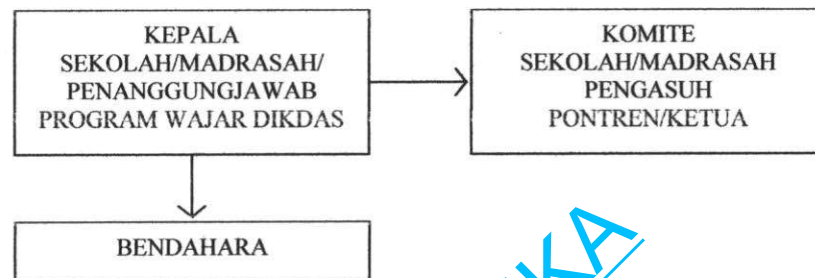
Bagan 2.3. Struktur Organisasi BOS Tingkat Kabupaten
sumber : Kementerian Pendidikan Nasional, 2010

Tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS provinsi ini adalah:

- Menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah.
- Melakukan pendataan sekolah.
- Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan lembaga penyalur dana, serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana.
- Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim Manajemen BOS Provinsi.
- Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah dan lembaga penyalur.
- Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen BOS dari sumber APBD.
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kab/kota.
- Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi dan instansi terkait.

4) Tingkat Sekolah

Tim manajemen BOS ini berada di sekolah penerima BOS dengan penanggungjawab Kepala sekolah. Berikut ini susunan organisasi tim manajemen BOS tingkat sekolah.



Bagan 2.4. Struktur Organisasi BOS Tingkat Sekolah
sumber : Kementerian Pendidikan Nasional, 2010

Tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS sekolah ini adalah:

- Menverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Prov dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
- Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, Tim Sekolah harus mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran.
- Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.

- Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.
- Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
- Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
- Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah tersebut di atas di papan pengumuman setiap 3 bulan.
- Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
- Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan pendahuluan dan tinjauan pustaka dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut ini:



Bagan 2.5. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber : Peneliti (2010)

C. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konsep

- a. Implementasi adalah kegiatan menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada lini paling bawah. Pada penelitian ini jajaran manajemen termasuk tim manajemen BOS pusat, provinsi, kota/kabupaten dan sekolah.

- b. Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar.

2. Definisi Operasional

Pada penelitian ini ada empat variabel yang akan dianalisis dan dibahas. Variabel tersebut antara lain :

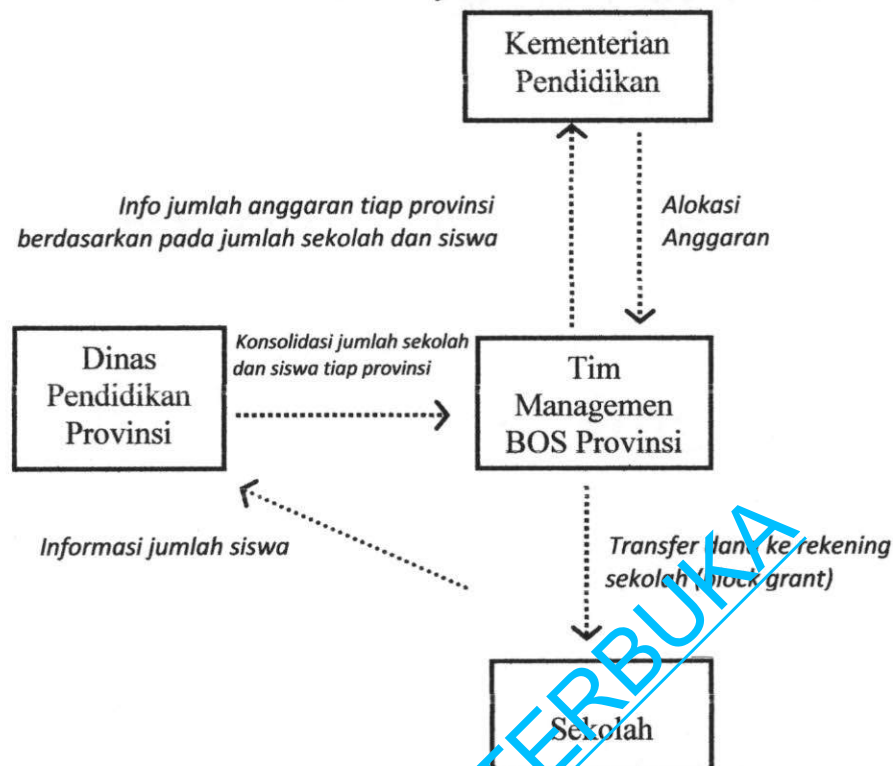
1) Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan ini merupakan tahapan awal dari pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung. Tahapan ini meliputi kegiatan melengkapi kelengkapan administrasi, RKS/RAPBS dan pembuatan proposal. Bagaimana dengan kelengkapan administrasi, apakah kepala sekolah ada membuat RKS/RAPBS dan menyusun proposal. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

2) Tahapan Penyaluran

Tahapan penyaluran merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah pihak sekolah melalui tahapan perencanaan dan telah mendapatkan persetujuan untuk mengelola dana BOS. Penggunaan BOS.

Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2005-2010



Bagan 2.6. Mekanisme Penyaluran BOS

Sumber : Kemendiknas 2010

3) Tahapan Penggunaan

Tahapan penggunaan dana BOS merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahapan penyaluran dilakukan. Pada tahapan ini akan dianalisis beberapa indikator terkait dengan penggunaan dana BOS. indikator seperti kesesuaian dengan kebutuhan/panduan yang ada, besarnya sesuai dengan data jumlah siswa, pertanggungjawaban dilengkapi dengan dokumen administrasi dan pengawasan dan pemeriksaan

4) Hasil Pelaksanaan BOS

Hasil pelaksanaan BOS pada penelitian ini akan melihat dampak pelaksanaan BOS terhadap kendala dan peningkatan kualitas pendidikan di SDN 07 Lubuk Nibung.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, terhadap pelaksanaan penggunaan Dana BOS dengan harapan terdapat peningkatan mutu pendidikan di SDN 07 Lubuk Nibung.

Menurut Sutopo (2002), penelitian kualitatif menekankan pada makna dan lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisa kualitatifnya. Terhadap data kuantitas, penelitian kualitatif tetap memandang sebagai kuantitas dan harus diolah dalam pola pikir kuantitatif (dengan hitungan angka), sama sekali tidak dipaksa untuk dianalisa secara kuantitatif. Data kuantitatif yang berbentuk tabel-tabel dan berupa angka-angka yang dikumpulkan akan ditampilkan dilakukan analisis dan pembahasan secara detail, digunakan untuk mendukung analisis secara keseluruhan sebagai pembuktian bagi fenomena-fenomena yang sedang diteliti, yang dalam hal ini tentang pelaksanaan Program bantuan dana BOS dengan sasaran utama adalah SDN 07 Lubuk Nibung selaku penerima bantuan dana.

Sementara itu juga, Moleong (2001) mengatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan; 1) menyesuaikan metode

kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, 2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, dan 3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Pada pelaksanaannya peneliti langsung masuk ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kebijakan Program pemberian bantuan dana BOS. Data yang dihimpun sesuai fokus penelitian berupa kata-kata, tindakan, situasi, dokumentasi dan peristiwa yang diobservasi. Pengumpulan data/informasi ini peneliti sekaligus sebagai instrumen yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Indepth interview*), oleh karenanya Peneliti akan mencatat, serta menggunakan dukungan alat perekam dan mengamati perilaku orang yang diwawancarai.

B. Subjek Penelitian

Menurut Amir (2000:93), pengertian subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Menurut Arikunto (1998:114), subyek penelitian adalah sumber data dalam penelitian darimana data dapat diperoleh. Jadi dapat disimpulkan sumber data adalah seseorang atau sesuatu yang menjadi sumber dari mana data atau informasi dapat diperoleh.

Penentuan subjek penelitian dipilih orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Subjek penelitian yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan program bantuan dana BOS antara lain Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sintang, Kepala Bagian dan Seksi yang menangani langsung pendistribusian dana bantuan BOS, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa dan komite sekolah. Berikut ini jumlah subjek penelitian.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang berjumlah 1 orang
2. Kepala Bidang dan Seksi berjumlah 2 orang
3. Kepala SDN 07 Lubuk Nibung berjumlah 1 orang
4. Guru SDN 07 Lubuk Nibung berjumlah 5 orang
5. Siswa SDN 07 Lubuk Nibung berjumlah 8 orang
6. Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung berjumlah 8 orang
7. Komite Sekolah berjumlah 1 orang

C. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi atau pengamatan

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang keberhasilan

implementasi kebijakan program BOS. disamping dilakukan pengamatan, informasi maupun data-data mengenai pelaksanaan Program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.

2. Wawancara

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena pelaksanaan dana BOS yang sedang diamati yaitu SDN 07 Lubuk Nibung.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari Lembaga/Organisasi yang telah melaksanakan Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selaku pihak yang telah menerima dana bantuan BOS sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan, rekaman tape recorder dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

4. Kuisisioner

Kuisisioner adalah suatu cara mengumpulkan dengan memberikan angket kepada sejumlah responden yang mewakili kelompok tertentu seperti

guru, siswa, orang tua dan komite sekolah tentang kedalaman pemahaman mereka berkaitan dengan dana BOS, mengenai manfaatnya, jumlahnya dan cara mengalokasikannya. Kuisioner diberikan langsung kepada responden terkait untuk memperoleh informasi yang memperkuat hasil wawancara.

D. Jenis dan Sumber Data

Hasil penelitian ini harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka diperlukan data-data yang valid. Pada penelitian ini dipergunakan dua jenis data yaitu

1. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan kuisioner.
2. Data sekunder yang bersumber dari hasil dokumentasi. Data ini terdiri dari :
 - a. Bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
 - 1) Data Statistik Penerima Bantuan, yang berisikan tentang penerima bantuan tiap sekolah berdasarkan jenjang, status dan jenis sekolah.
 - 2) Data Hasil Penyerapan Dana Bantuan
 - 3) Data Hasil Monitoring dan Evaluasi
 - 4) Data Penanganan Pengaduan Masyarakat

- b. Bersumber dari Sekolah Penerima BOS
 - 1) RAPBS
 - 2) Data lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran
 - 3) Data lembar pencatatan pengaduan

E. Analisis Data dan Bentuk Sajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik pengolahan data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengolahan data.

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pengolahan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Model pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model Interaktif dari Miles and Huberman yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data meliputi

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data seperti dilukiskan pada gambar berikut.



Bagan 3.1 Model Analisa Interaktif

Sumber : Matthew E. Miles & A.M.Huberman (1992)

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data (Triangulasi), yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi maupun dengan menggunakan angket. Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang didapat semakin bagus.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian data dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya.

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data berikutnya jika diperlukan. Data-data yang tidak terpakai dibuang, sehingga peneliti lebih fokus pada data yang telah tereduksi.

3. *Data display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data dapat dalam bentuk tabel, grafik, chart dan sejenisnya. Melalui penyajian data dalam bentuk display, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. *Verifying* (Verifikasi)

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya

F. Operasionalisasi Penelitian

Tabel 3.1.
Operasionalisasi Parameter

NO	ASPEK	RINCIAN/INDIKATOR	ALAT PENGUMPUL DATA	RESPONDEN	TEKNIK ANALISIS
1	PERENCANAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan Administrasi • RKS/RAPBS • Proposal 	Wawancara Kuisisioner Observasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas • Kabid/Kasi • Kepala Sekolah • Guru • Komite Sekolah 	Deskriptif
2	PENYALURAN	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui rek. sekolah 	Wawancara Kuisisioner Observasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas • Kabid/Kasi • Kepala Sekolah • Guru • Komite Sekolah 	Deskriptif
3	PENGGUNAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai kebutuhan/ panduan yang ada • Besarnya sesuai dengan data siswa • Pertanggungjawabannya dilengkapi dgn administrasi • Pengawasan dan pemeriksaan 	Wawancara Kuisisioner Observasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas • Kabid/Kasi • Kepala Sekolah • Siswa • Komite • Orang tua 	Deskriptif
4	PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran • Penggunaan 	Wawancara Kuisisioner Observasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas • Kabid/Kasi • Kepala Sekolah • Guru • Komite • Orang tua • Siswa 	Deskriptif
5	HASIL	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bantuan untuk siswa miskin • Berkurangnya siswa putus sekolah • Pengadaan buku pelajaran • Kegiatan ekstrakurikuler • Pengembangan profesi guru 	Wawancara Kuisisioner Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas • Kabid/Kasi • Kepala Sekolah • Guru • Komite • Orang tua • Siswa 	Deskriptif

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi dan Kondisi SDN 07 Lubuk Nibung

SDN No. 7 Lubuk Nibung adalah salah satu dari 32 SD yang ada di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1977 atau 32 tahun yang lalu. Siswa di sekolah ini datang dari dusun-dusun terdekat yaitu: Dusun Tabau, Dusun Merinjuh, Dusun Engketik, Lubuk Nibung, RT Lubuk Nyalang dan anak-anak dari desa tetangga terdekat seperti misalnya dari Kedembak Merakai.

Lokasi SDN Nomor 07 Lubuk Nibung berada di desa Swadaya dengan komposisi penduduk berdasarkan statistik yang bisa dilihat berdasarkan kelompok umur sebagai berikut.

**Tabel 4.1. DATA PENDUDUK DESA SWADAYA TAHUN 2010
BERDASARKAN KELOMPOK UMUR**

0-6		7-12		13-15		16-18		19-35		36-44		45-UP		KELAMIN		JUMLAH
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
61	79	74	81	81	84	63	76	71	97	70	76	70	78	490	571	1.061

Sumber data Statistik Kecamatan Ketungau Tengah

Berdasarkan data di atas menurut kelompok umur yang berusia antara 7 tahun – 12 tahun yang jumlahnya mencapai 155 orang bila dibandingkan dengan data jumlah siswa yang berada dibangku sekolah sesuai dengan data statistik pada SDN Nomor 07 Lubuk Nibung yang hanya 112 orang siswa bila diprosentasekan baru mencapai 72,25 % dan masih 27,75 % belum ikut ambil bagian dalam mengenyam pendidikan setingkat sekolah dasar. Demikian juga bila sejumlah 155 orang yang berusia 7 tahun – 12 tahun diambil rata-rata jumlah yang seharusnya mengenyam pendidikan dari kelas satu sampai kelas enam masing-masing kelas seharusnya diisi oleh 25 orang atau lebih. Dengan demikian kalau kita membandingkan siswa yang tamat setiap tahunnya dalam kurun tiga tahun terakhir yang rata-rata hanya 9 orang dapat diprosentasekan sebagai berikut: siswa yang menamatkan sekolah dasar baru 36 % dari jumlah anak berusia 7 tahun – 12 tahun dan masih tersisa 64 %.

SDN No. 7 Lubuk Nibung pernah terjadi kekosongan guru selama 9 bulan, karena tidak ada guru yang bersedia ditugaskan disana. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2005. Pada tahun ajaran 2009/2010, SDN 07 Lubuk Nibung telah memiliki guru berjumlah enam orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Tiga orang guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Dua orang berstatus Guru Tidak Tetap (GTT).
3. Satu orang berstatus Guru Kontrak (GK).

Jumlah siswa SDN 07 Lubuk Nibung pada tahun ajaran 2009/2010 tercatat 112 orang siswa. Perincian jumlah siswa ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.2. Keadaan Siswa SDN 07 Lubuk Nibung Tahun 2009/2010

NO	KELAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	I	15	15	30
2	II	13	9	22
3	III	10	6	16
4	IV	10	14	24
5	V	4	8	12
6	VI	3	5	8
JUMLAH SISWA		55	57	112

Sumber : Data SDN 07 Lubuk Nibung, 2010

2. Pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung

Pelaksanaan BOS merupakan suatu kegiatan estafet mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai ke masing-masing sekolah. Untuk masing-masing tingkatan memiliki tim manajemen yang mengelola pelaksanaan BOS. Pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung juga mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan oleh pusat. Adapun susunan tim manajemen BOS di SDN 07 Lubuk Nibung adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab adalah Kepala SDN 07 Lubuk Nibung
- b. Anggota terdiri dari bendahara dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah

Pemilihan unsur orang tua dipilih oleh Kepala SDN 07 Lubuk Nibung dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari

terjadinya konflik kepentingan. Tugas dan tanggungjawab tim manajemen BOS SDN

07 Lubuk Nibung adalah :

- a. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
- b. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
- c. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.
- d. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
- e. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
- f. Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah tersebut di atas di papan pengumuman setiap 3 bulan.
- g. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
- h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- i. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang
- j. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis

Pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dilaksanakan setiap triwulan selama satu tahun anggaran. Artinya selama satu tahun, penyaluran anggaran BOS akan dilakukan sebanyak empat kali. Pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung telah dilaksanakan mulai tahun 2007 dan sekarang memasuki tahun keempat. Penggunaan dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung disesuaikan dengan RAPBS yang telah direncanakan oleh pihak sekolah. Perincian penggunaan dana BOS tahun ajaran 2009/2010 di SDN 07 Lubuk Nibung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Penggunaan Dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung Tahun 2009/2010

RENCANA KEGIATAN/PENGGUNAAN		TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4
1		2	3	4	5
I	BELANJA PEGAWAI	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
II	BELANJA BARANG	3.939.000	4.450.500	3.837.500	4.507.000
III	BELANJA PEMELIHARAN	1.560.000	1.240.000	1.890.000	640.000
IV	BELANJA LAIN-LAIN	4.550.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
JUMLAH		11.399.000	11.190.500	11.227.500	10.647.000
GRAND TOTAL DANA BOS DARI TRIWULAN 1 SAMPAI DENGAN 4 ADALAH = RP. 44.464.000,00					

Sumber : Data SDN 07 Lubuk Nibung, 2010

B. Analisis Implementasi Program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung

Penelitian terhadap pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung ini menekankan pada mekanisme pelaksanaan BOS. Mekanisme pelaksanaan BOS tersebut terdiri dari perencanaan, penyaluran, penggunaan dan hasil. Setiap tahapan

mekanisme tersebut akan dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang terkait. Berikut ini analisa terhadap implementasi program BOS di SDN 07 Lubuk nibung.

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan ini merupakan tahapan awal dari pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung. Pada tahapan ini pihak sekolah penerima BOS diminta untuk merencanakan pengelolaan dana BOS yang akan diterima. Tahapan perencanaan ini akan terkait dengan beberapa indikator antara lain :

- a. Kelengkapan Administrasi
- b. RKS/RAPBS
- c. Proposal

Ketiga inidakor tersebut merupakan persyaratan/kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh sekolah penerima bantuan BOS. Perencanaan yang matang dan terorganisir terhadap kelengkapan tersebut dapat membantu kemudahan pelaksanaan BOS. Pada tahapan perencanaan ini yang menentukan layak tidaknya sekolah menerima program BOS, sehingga pada tahapan ini perlu direncanakan dengan sebaik mungkin dengan melibatkan semua pihak terkait baik kepala sekolah, guru maupun komite sekolah.

a. Kelengkapan Administrasi

Kelengkapan administrasi ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah penerima untuk pengajuan permohonan program

pelaksanaan BOS. Administrasi ini terkait dengan data-data tentang sekolah calon penerima program BOS. Data-data tersebut berupa data mengenai kondisi sekolah, indentifikasi jumlah siswa terutama siswa miskin, data mengenai kondisi fasilitas sekolah dan data-data tertulis yang diajukan oleh tim manajemen BOS tingkat pusat. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan masalah kelengkapan adminstrasi program BOS.

“Program BOS merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Program ini merupakan program berskala nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh daerah. Oleh karena itu, persyaratan dan kelengkapan yang harus disiapkan oleh calon sekolah penerima BOS sama untuk setiap daerahnya. Kelengkapan Administrasi awal sangat penting untuk menentukan layak tidaknya sekolah menerima bantuan tersebut. Saya selalu menekankan kepada setiap kepala sekolah untuk memperhatikan masalah kelengkapan administrasi dan saya menginginkan kelengkapan administrasi tersebut dibuat sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan.” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Kelengkapan administrasi merupakan persyaratan sekolah untuk pengajuan dan usulan untuk menerima BOS. Kelengkapan administrasi ini diajukan sebelum program BOS dilaksanakan. Informasi untuk melengkapi administrasi untuk pengajuan BOS akan disampaikan langsung oleh pihak sekolah melalui dinas pendidikan. Pihak sekolah diberi waktu untuk menyelesaikan kelengkapan administrasi tersebut. Kelengkapan adaministrasi tersebut berisikan mengenai gambaran dan kondisi sekolah, jumlah siswa dan beberapa formulir isian dari tim manajemen BOS” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Bagi sekolah calon penerima BOS yang pertama perlu disiapkan adalah masalah kelengkapan adaministrasi. Kelengkapan aministrasi ini merupakan persyaratan yang harus

disiapkan oleh pihak sekolah. Kepala sekolah, para guru dan komite dapat bermusyawarah dan bekerjasama untuk melengkapi semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Karena begitu pentingnya kelengkapan administrasi ini maka pihak sekolah harus serius dan benar-benar mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi ini. Kelengkapan administrasi ini biasanya terkait dengan form isian yang harus diisi dan dilengkapi oleh pihak sekolah. Biasanya waktu yang direncanakan untuk melengkapi administrasi ini relatif pendek kami selalu mengimbau kepada setiap sekolah untuk melengkapi administrasi tersebut tepat waktu.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa kelengkapan administrasi merupakan persyaratan yang harus dipersiapkan oleh sekolah calon penerima BOS. Lengkapi tidaknya administrasi tersebut menentukan layak tidaknya sekolah tersebut menerima bantuan BOS. Pentingnya kelengkapan administrasi ini menuntut kerjasama yang baik dari tim manajemen BOS sekolah untuk bekerjasama dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi tersebut. Berikut ini wawancara terkait dengan penyusunan kelengkapan administrasi di SDN 07 Lubuk Nibung.

Sebelum sekolah kami menerima dana BOS, kami diinformasikan untuk melengkapi persyaratan yang diajukan oleh tim manajemen BOS pusat. Salah satu persyaratan tersebut adalah terkait dengan kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi ini mencakup mengenai data tentang sekolah kami termasuk di dalamnya jumlah siswa, guru dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Antusias kami sangat tinggi terhadap program BOS ini sehingga kami bersama dewan guru selalu berusaha untuk memberikan data-data yang akurat dan kami saling bekerja sama untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan program BOS ini. Hal ini kami lakukan karena program BOS ini sangat penting untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kami yang berada di pelosok

Kalimantan ini.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Dana BOS di sekolah kami terima karena sekolah kami sangat layak untuk menerima bantuan dana tersebut untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah kami. Dana BOS yang kami terima melalui proses yang panjang, pertama kali kami dituntut untuk melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh dinas pendidikan. Kelengkapan administrasi tersebut kami kerjakan atas perintah kepala sekolah. Kami diberi tugas dan tanggungjawab untuk melengkapi administrasi tersebut karena lengkap tidaknya administrasi tersebut sangat berpengaruh terhadap bisa tidaknya sekolah kami menerima dana BOS tersebut. Oleh karena itu, kami selalu bekerja sama untuk menyelesaikan administrasi tersebut. kelengkapan administrasi tersebut berkaitan dengan data mengenai kondisi sekolah kami termasuk jumlah siswa dan guru.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa kelengkapan administrasi untuk memenuhi persyaratan penerimaan dana BOS dilakukan oleh tim manajemen BOS SDN 07 Lubuk Nibung yang dipimpin oleh kepala sekolah. Kelengkapan administrasi tersebut dikerjakan bersama-sama antara kepala sekolah dengan dewan guru. Hal ini dilakukan karena pentingnya dana BOS tersebut untuk peningkatan mutu pendidikan di SDN 07 Lubuk Nibung termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 100% responden setuju kelengkapan administrasi perlu diperlakukan untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh bantuan BOS.

b. RKS dan RAPBS

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) merupakan rencana anggaran yang dibuat oleh sekolah untuk merencanakan setiap kegiatan selama satu tahun anggaran. RAPBS ini juga memuat rencana alokasi penerimaan dan penyaluran dana BOS yang diterima sekolah, sehingga RAPBS ini penting sebagai acuan atau pedoman dalam pengalokasian dana BOS. RAPBS ini penting sebagai persyaratan awal sekolah untuk menerima dan melaksanakan program BOS. Rencana dana BOS yang diterima sekolah dibuat dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan RAPBS dengan harapan dana BOS yang diterima akan terencana dengan baik dan juga sebagai alat pertanggungjawaban terhadap pihak yang berkepentingan. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan pembuatan RKS/RAPBS untuk perencanaan dan pengalokasian dana BOS.

“Salah satu pertimbangan pemberian dana BOS ke setiap sekolah adalah adanya rencana penggunaan dana BOS tersebut untuk kepentingan sekolah. Rencana tersebut dapat dibuktikan dengan pembuatan RKS dan RAPBS yang diajukan oleh pihak sekolah. Melalui RKS dan RAPBS tersebut kita dapat melihat dan mengaudit seberapa penting pemberian dana BOS tersebut kepada sekolah tersebut. RAPBS tersebut merupakan informasi bagi kami tentang rencana pihak sekolah dalam memanfaatkan penggunaan dana BOS yang akan diterima sehingga kami memiliki gambaran dan dapat menilai layak tidaknya sekolah tersebut memperoleh bantuan. Pentingnya RAPBS tersebut terhadap kelayakan persyaratan penerimaan BOS mengharuskan setiap sekolah merencanakan dan membuat RAPBS dengan sebaik mungkin dan juga logis“ (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Penggunaan dana BOS akan dapat maksimal penggunaannya jika dalam penggunaannya sesuai dan mengacu terhadap RKS dan RAPBS yang telah dibuat pihak sekolah yang melibatkan pihak-pihak terkait. RKS dan RAPBS merupakan elemen penting dalam perencanaan dana BOS sehingga dalam perencanaannya harus mempertimbangkan skala prioritas kegiatan yang akan diwadahi. RKS dan RAPBS ini juga sebagai alat audit bagi pihak terkait untuk melihat pelaksanaan dan penggunaan dana BOS tersebut di setiap sekolah. Dalam RKS dan RAPBS akan menggambarkan secara detail alokasi dana untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut selama satu tahun anggaran.” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Langkah awal yang harus dilakukan sekolah penerima bantuan BOS adalah membuat perencanaan dan pengalokasian rencana penggunaan dan BOS. Perencanaan dan pengalokasian tersebut akan tertuang di dalam RKS dan RAPBS sekolah yang akan diajukan ke dinas sebagai tim penilai. Penilaian terhadap RKS dan RAPBS tersebut menentukan layak tidaknya sekolah tersebut menerima bantuan BOS tersebut. Jika tidak layak kami memerintahkan pihak sekolah untuk memperbaiki dan menyempurnakan RKS dan RAPBS tersebut. Kami berharap dengan adanya RKS dan RAPBS tersebut bantuan BOS yang diberikan pemerintah terhadap sekolah-sekolah tersalurkan sesuai dengan yang diinginkan dan dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana BOS tersebut oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, kami berharap pembuatan RKS dan RAPBS tersebut melibatkan pihak-pihak yang ada di sekolah seperti para dewan guru dan juga komite sekolah sehingga akan lebih bersifat terbuka.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa RKS dan RAPBS merupakan persyaratan yang penting dalam perencanaan dan pengelolaan dana BOS. RKS dan RAPBS ini dapat digunakan sebagai alat kontrol untuk menilai pelaksanaan dan penggunaan dana BOS oleh sekolah penerima karena di dalam RKS dan RAPBS akan tergambar dengan jelas alokasi

dana kegiatan yang mempergunakan dana BOS. RKS dan RAPBS yang dibuat sekolah penerima bantuan harus dibuat sebaik mungkin dengan mempertimbangkan kondisi sekolah. Berikut ini wawancara terkait dengan penyusunan RKS dan RAPBS di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Pembuatan RKS dan RAPBS yang kami lakukan selalu menyesuaikan dengan kondisi sekolah kami dan selalu melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah ini seperti guru dan komite sekolah. Dalam RKS dan RAPBS yang kami buat menggambarkan rencana penggunaan dana yang kami peroleh baik dari dana BOS maupun dana lainnya. Dalam kaitannya dengan penggunaan dan BOS kami mengalokasikan dan merencanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengalokasian dan penggunaan dana BOS kami selalu arahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan dan mendukung kualitas pendidikan di sekolah kami. Dana BOS yang kami terima harus habis terpakai sehingga dalam merencanakan kami harus mempertimbangkan kegiatan yang harus dan penting untuk dilaksanakan dan kami juga harus membuat skala prioritas mengingat kegiatan yang harus diakomodasi relatif banyak” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Dalam setiap penyusunan RKS dan RAPBS yang dilakukan pihak sekolah kami tidak dilibatkan dan pendapat dan usulan kami tidak selalu dipertimbangkan. RKS dan RAPBS yang dibuat pihak sekolah sebagai dasar untuk melakukan perencanaan dan penggunaan dan yang diperoleh oleh pihak sekolah termasuk dana BOS. Dana BOS yang masuk kepihak sekolah di buat dan di masukan dalam RKS dan RAPBS sehingga penggunaan dana BOS tersebut diharapkan dapat terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberi bantuan tersebut. Dalam perencanaan dan pembuatan RAPBS untuk bantuan dana BOS, secara administratif selalu mengacu sesuai dengan pedoman yang telah dibuat dengan membuat prioritas kegiatan dan keadaan dan kondisi sekolah, sehingga dana BOS tersebut dapat dengan optimal terealisasi” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Sebagai pihak yang seharusnya selalu berhubungan dengan pihak sekolah, kami tidak mendapatkan informasi tentang perencanaan setiap kegiatan yang tertuang di RAPBS sekolah. Seharusnya dalam perencanaan RAPBS tersebut sebagai wadah bagi kami untuk menyampaikan aspirasi orang tua murid dalam setiap kegiatan yang dilakukan pihak sekolah. Setelah ada program BOS perencanaan RABPS sangat penting karena dana tersebut dapat meningkatkan kualitas sekolah. Dana BOS sangat bermanfaat salah satunya untuk menyediakan buku bagi siswa, untuk perbaikan fasilitas sekolah yang tidak layak dan juga untuk membiayai kegiatan siswa di sekolah.” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa pembuatan RKS dan RAPBS belum melibatkan berbagai pihak seperti guru dan komite sekolah. Padahal keterlibatan pihak-pihak tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan masukan terhadap setiap alokasi kegiatan yang direncanakan. RKS dan RAPBS tersebut sangat penting dalam mengalokasikan setiap kegiatan di sekolah termasuk kegiatan yang didanai oleh BOS. Dana BOS harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah sehingga dalam setiap penyusunan RAPBS yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS harus selalu sesuai dengan panduan yang ada. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil kuisioner bahwa 85,71% responden menyatakan RKS dan RAPBS sebagai pedoman dalam perencanaan dan penggunaan dana bantuan BOS.

Berdasarkan data yang diperoleh dari RAPBS SDN 07 Lubuk Nibung, total anggaran yang diperoleh selama tahun anggaran 2009/2010 berjumlah Rp. 157.030.400,00 dengan rincian dana anggaran rutin dari dinas pendidikan berjumlah Rp. 104.233.600,00, dana BOS berjumlah Rp. 44.464.000,00 dan dana

BOSDA berjumlah Rp. 8.332.800,00. Berdasarkan data tersebut diperoleh bahwa sumber dana RAPBS SDN 07 Lubuk Nibung dari BOS hanya 28,31% sedangkan dana rutin mencapai 66,38%. Jumlah dana BOS yang relatif kecil dibanding dengan dana rutin harus dimaksimalkan dengan baik untuk fokus terhadap kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan di SDN 07 Lubuk Nibung. Penggunaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung antara lain untuk penerimaan murid baru, pembelian buku pelajaran, peningkatan mutu guru, pelaksanaan THB, Ulangan Umum, dan UAS serta belanja untuk kegiatan pendidikan dan ekstrakurikuler.

c. Pembuatan Proposal

Pengajuan dan permohonan untuk memperoleh dana BOS dapat diajukan oleh sekolah calon penerima dengan membuat proposal pengajuan kepada Dinas Pendidikan. Proposal tersebut dibuat sebagai prosedur untuk melengkapi persyaratan permohonan untuk memperoleh dana BOS. Proposal tersebut akan dipelajari oleh tim manajemen BOS kota atau kabupaten untuk ditindaklanjuti ke tim manajemen BOS provinsi untuk diolah dan divalidasi. Proposal yang layak dan sesuai dengan prosedur akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan pembuatan dan pengajuan proposal untuk permohonan memperoleh dana BOS.

“Sebagai bukti keseriusan sekolah untuk memperoleh bantuan BOS, setiap sekolah dipersilahkan untuk mengajukan proposal permohonan dana BOS. Proposal tersebut berisikan mengenai gambaran dan kondisi sekolah serta rencana penggunaan dana BOS tersebut jika dana tersebut diperoleh. Proposal yang

diajukan oleh pihak sekolah calon penerima BOS dilengkapi dengan administrasi pendukung seperti kondisi dan keadaan sekolah, jumlah murid dan guru serta RAPBS sekolah masing-masing. Proposal tersebut diajukan kepada tim manajemen kabupaten untuk dinilai dan selanjutnya ditindaklanjuti untuk segera diproses. Sebagai syarat permohonan dana BOS, proposal sangat penting sehingga harus dibuat dengan sebaik-baiknya untuk kemudahan dan kelancaran permohonan dana BOS“ (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Proposal pengajuan dan permohonan dana bantuan BOS merupakan persyaratan awal yang diperlukan setiap sekolah untuk mendapat bantuan BOS tersebut. Proposal tersebut menggambarkan keinginan sekolah untuk memperoleh BOS serta rencana penggunaan dan BOS tersebut. Proposal yang diajukan harus mendapat persetujuan oleh pihak-pihak terkait disekolah seperti dewan guru dan komite sekolah. Pengajuan proposal tersebut langsung diajukan kepada tim manajemen BOS yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Selanjutnya proposal tersebut dipelajari dan di nilai layak tidaknya sekolah tersebut menerima bantuan BOS. Jika sekolah tersebut layak maka proposal tersebut akan diajukan ke tim manajemen BOS provinsi” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Proposal permohonan dana BOS yang diajukan pihak sekolah merupakan permohonan dari pihak sekolah untuk menerima, merencanakan, mengelola dan menggunakan dana bantuan BOS untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran pemberian bantuan BOS tersebut. Setiap proposal yang diajukan oleh masing-masing sekolah dilengkapi dengan data-data dan dokumen-dokumen yang akurat termasuk keadaan jumlah siswa miskin dan rancangan penggunaan dana bantuan BOS yang terlampir di RAPBS setiap sekolah. Proposal yang diajukan setiap sekolah akan segera di tindaklanjuti oleh pihak yang berwenang untuk diambil keputusan.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa permohonan untuk memperoleh dana BOS, setiap sekolah dianjurkan untuk membuat pengajuan proposal permohonan dana BOS tersebut. Proposal tersebut berisikan gambaran mengenai kondisi sekolah dan dilengkapi data-data pendukung seperti jumlah siswa dan guru serta fasilitas yang ada. proposal tersebut juga berisikan rencana pengelolaan dan penggunaan dana BOS tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Berikut ini wawancara terkait dengan penyusunan dan pengajuan proposal permohonan dana bantuan BOS.

“Setelah ada informasi pemberian dana BOS kami sangat tertarik untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan BOS tersebut karena kami sangat membutuhkan dana tersebut untuk perbaikan dan peningkatan pendidikan di sekolah kami. Permohonan pengajuan dana BOS kami sampaikan melalui proposal yang kami buat bersama dewan guru dan juga pihak komite sekolah. Proposal tersebut merupakan gambaran kondisi sekolah kami saat ini dan dilengkapi oleh data-data pendukung seperti data tentang siswa miskin dan juga fasilitas di sekolah kami. Melalui proposal tersebut kami berharap dapat memperoleh bantuan dana tersebut. Proposal tersebut kami ajukan ke tim manajemen BOS di dinas pendidikan untuk diteliti lebih lanjut. Setelah disetujui kami tinggal mempersiapkan kelengkapan data-data lainnya.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Untuk mendapatkan bantuan BOS pihak sekolah diperintahkan untuk membuat pengajuan proposal permohonan. Untuk merespon hal tersebut pihak sekolah hendaknya mengadakan rapat untuk membahas proposal permohonan bantuan. Yang berisikan gambaran kondisi sekolah dan rencana pengelolaan dan penggunaan dana BOS. Pembuatan proposal tersebut seharusnya juga melibatkan pihak lain yaitu dari orang tua murid yang diwakili oleh komite sekolah tetapi di sekolah kami tidak lakukan seperti itu. Proposal tersebut segera diajukan kepada tim penilai yang ada di dinas pendidikan kabupaten Sintang” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Persyaratan dalam memperoleh bantuan BOS adalah dengan pengajuan permohonan berupa proposal permohonan kepada pemerintah. Di SDN 07 Lubuk Nibung ini kami sebagai komite sekolah tidak dilibatkan dalam pembuatan dan pengajuan proposal. Walaupun kami tidak diundang rapat dan tidak dimintai pendapat dan persetujuan terhadap proposal yang akan diajukan. Kami menyambut baik adanya proposal permohonan tersebut karena sebagai bukti keseriusan pihak sekolah untuk memperoleh dan mengelola bantuan BOS yang diterima nanti sehingga kami berharap kualitas pendidikan di SDN 07 Lubuk Nibung semakin membaik walaupun berada di daerah terpencil” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa pembuatan proposal permohonan bantuan BOS di SDN Lubuk Nibung belum melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, dewan guru dan juga komite sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa. Proposal tersebut dibuat dan ditandatangani kepala sekolah dan tidak melibatkan para guru serta komite sekolah. Proposal tersebut kemudian diajukan ke tim manajemen BOS Kabupaten untuk ditindaklanjuti. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil kuisisioner bahwa 35,71 % responden menyatakan pembuatan proposal yang dilakukan oleh pihak SDN 07 Lubuk Nibung adalah persyaratan awal untuk mengajukan permohonan dana BOS.

Berdasarkan analisis terhadap tahapan perencanaan awal BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BOS, yang merupakan salah satu kebijakan publik di bidang pendidikan, dapat berjalan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward (2003) yang

menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Variabel komunikasi dalam proses perencanaan ini tergambar dari adanya komunikasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah terhadap setiap sekolah mengenai program BOS. Komunikasi tersebut juga terjadi dua arah dengan adanya *feedback* dari pihak sekolah terkait dengan program tersebut.

Variabel sumber daya ini masih belum tergambar dari keseriusan pihak sekolah untuk memperoleh dana BOS dengan membentuk tim manajemen BOS di tingkat sekolah dengan dipimpin oleh kepala sekolah. Keterbatasan jumlah SDM di sekolah menjadi kendala pihak SDN 07 Lubuk Nibung, hal ini terlihat dari belum adanya keterlibatan seluruh dewan guru dan juga komite sekolah dalam perencanaan awal BOS. Variabel disposisi belum tergambar dari adanya persetujuan setiap pihak yang ada SDN 07 Lubuk Nibung termasuk dewan guru dan juga komite sekolah. Belum adanya persetujuan tersebut menggambarkan meskipun antusiasnya SDN 07 Lubuk Nibung untuk memperoleh dana BOS sangat tinggi harus ada mekanisme kerja yang perlu disempurnakan. Variabel selanjutnya adalah variabel struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini tergambar dari adanya prosedur yang harus dilalui oleh pihak SDN 07 Lubuk Nibung untuk memperoleh dana BOS. Pihak sekolah sebagai tim manajemen BOS sekolah mengajukan permohonan kepada tim manajemen BOS kabupaten selanjutnya diteruskan ke tingkat provinsi dan sampai ke pusat. Prosedur yang ada dalam permohonan BOS menggambarkan keseriusan pemerintah mulai dari pusat sampai daerah untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan BOS. Untuk SDN No. 07 Lubuk Nibung dari segi administrasi sudah

dilakukan namun dalam tataran implementasi hendaknya keterlibatan mereka yang ada dalam birokrasi betul-betul diberdayakan sebagaimana mestinya.

2. Tahapan Penyaluran

Tahap penyaluran merupakan tahapan selanjutnya setelah pihak sekolah melalui tahapan perencanaan dan telah mendapatkan persetujuan untuk mengelola dana BOS. Penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap selama empat periode yaitu:

- a. Periode Januari – Maret
- b. Periode April – Juni
- c. Periode Juli – September
- d. Periode Oktober – Desember

Penyaluran dana BOS ke setiap sekolah melalui rekening atas nama sekolah. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin atas nama sekolah diharapkan segera membuka rekening atas nama sekolah. Berikut ini hasil wawancara terkait penyaluran dana BOS melalui rekening sekolah di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Penyaluran dana BOS dilakukan beberapa periode melalui rekening atas nama sekolah bukan atas nama pribadi atau kepala sekolah. Prosedur yang harus dilakukan pihak sekolah adalah dengan mengirim nomor rekening sekolah kepada tim manajemen BOS kabupaten kemudian dilakukan verifikasi dan kompilasi dan selanjutnya dikirim kepada tim manajemen BOS provinsi. Tim manajemen provinsi kemudian mengajukan surat permohonan pembayaran langsung. Setelah dana BOS cair, dana tersebut selanjutnya disalurkan bank pemerintah atau kantor pos yang ditunjuk langsung ke rekening sekolah penerima dan tim manajemen BOS kabupaten akan mengecek kesesuaian dana yang disalurkan. Jika terdapat kelebihan maka

dana tersebut harus dikembalikan“ (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Penyaluran dana BOS harus dilakukan secara transparan sehingga penyaluran dilakukan melalui rekening atas nama sekolah bukan atas nama pribadi seperti kepala sekolah atau bendahara. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan terhadap dana BOS. Penyaluran dana BOS dilakukan secara langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah tanpa melalui perantara sehingga akan terjamin transparansinya. Pihak dinas dan tim manajemen kabupaten hanya sebagai pengawas yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian dana BOS yang diterima oleh sekolah penerima” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Penyaluran dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah dilakukan secara langsung ke rekening atas nama sekolah. Penyaluran tidak melalui perantara maupun pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dana BOS dan yang terpenting untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana BOS tersebut. Oleh karena itu, penyaluran dana BOS juga harus mendapat pengawasan dari berbagai pihak seperti tim manajemen BOS kabupaten dan provinsi serta dari dinas pendidikan. ” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa penyaluran dana BOS dilakukan secara langsung ke rekening atas nama sekolah bukan pribadi. Prosedur yang dilakukan oleh pihak sekolah penerima BOS adalah dengan menyerahkan rekening ke tim manajemen BOS kabupaten untuk kemudian di validasi dan dikompilasi. Selanjutnya diserahkan kepada tim manajemen BOS provinsi untuk di tindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keterangan pembayaran langsung. Setelah surat perintah keluar dana BOS dapat

langsung dikirim ke rekening sekolah penerima BOS melalui bank pemerintah atau kantor pos. Penyaluran dana BOS tersebut dilakukan secara bertahap.

Berikut ini wawancara terkait dengan penyaluran dana BOS.

“Dana bantuan BOS yang kami terima merupakan dana yang kami terima langsung dari rekening atas nama sekolah. Pada awalnya kami belum memiliki rekening sekolah kami dipersilahkan untuk membuat rekening atas nama sekolah. Setelah kami mempunyai rekening atas nama sekolah, rekening tersebut kami beritahukan ke tim manajemen BOS kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke pusat. Setelah dana BOS tersebut masuk kami bersama tim manajemen BOS kabupaten mengecek kesesuaian nominalnya sesuai dengan data yang kami ajukan. Jika terdapat kelebihan kami diharapkan segera mengembalikannya.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Dana BOS yang sekolah kami terima langsung dari pemerintah tanpa ada perantara. Dana tersebut masuk ke rekening sekolah bukan rekening kepala sekolah atau bendahara sekolah. Setelah dana tersebut masuk kami diinformasikan oleh kepala sekolah untuk melihat dan tidak ada unsur keterutupan dalam publikasi dana BOS semuanya bersifat transparan dan terbuka sehingga semua orang dapat mengetahui jumlah dana BOS yang diterima beserta perincian alokasi penggunaannya” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Penyaluran dana BOS dilakukan melalui rekening atas nama sekolah. Dana yang diperoleh tersebut dipublikasikan dan diumumkan oleh pihak sekolah supaya masyarakat dapat melihat dan mencocokkan sesuai dengan alokasi penggunaan. Dengan adanya keterbukaan tersebut memudahkan kami dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS yang diterima sekolah. Publikasi tersebut juga dilengkapi dengan rencana pengalokasiannya secara detail dan jelas sehingga mudah untuk dicermati. Penyaluran dana BOS dilakukan tanpa melalui perantara dan langsung ke rekening sekolah” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa penyaluran dana BOS melalui rekening sekolah tanpa melalui perantara. Setelah menerima dan tersebut pihak sekolah diwajibkan mempublikasikan kepada masyarakat umum dengan dilengkapi perincian alokasi penggunaan. hal ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil kuisioner bahwa 78,57 % responden menyatakan dana BOS yang di terima sekolah langsung masuk ke rekening sekolah tanpa perantara kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisa terhadap tahapan penyaluran BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana BOS dapat berjalan lancar karena dipengaruhi beberapa variabel seperti teori Edward (2003). Variabel pertama yaitu komunikasi antara pihak sekolah dengan tim manajemen kabupaten dan provinsi terkait dengan nomor rekening dan jumlah dana BOS yang akan disalurkan. Komunikasi juga terjadi antara pihak sekolah dengan masyarakat melalui publikasi rencana penggunaan dan BOS. Variabel yang kedua adalah adanya disposisi yang diberikan tim manajemen baik kabupaten maupun provinsi terkait dengan jumlah dana yang akan disalurkan. Variabel yang ketiga adalah struktur birokrasi. Permohonan pengajuan dana oleh pihak sekolah melalui tahapan birokrasi dari sekolah, tim manajemen kabupaten kemudian provinsi. Sedangkan untuk birokrasi penyaluran langsung dari tim manajemen provinsi ke pihak sekolah tanpa melalui perantara.

3. Tahapan Penggunaan

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah.

Tahapan penggunaan dana BOS merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahapan penyaluran dilakukan. Pada tahapan ini akan dianalisis beberapa indikator terkait dengan penggunaan dana BOS. indikator tersebut antara lain:

- a. Sesuai dengan kebutuhan/panduan yang ada
- b. Besarnya sesuai dengan data jumlah siswa
- c. Pertanggungjawaban dilengkapi dengan dokumen administrasi
- d. Pengawasan dan pemeriksaan

Indikator-indikator tersebut merupakan bagian yang penting dari pelaksanaan dan penggunaan dana BOS di sekolah penerima bantuan. Kesesuaian indikator tersebut dengan pelaksanaan di lapangan menggambarkan keberhasilan pelaksanaan bantuan BOS. Oleh karena itu, setiap sekolah dituntut untuk menyesuaikan dengan indikator-indikator tersebut.

a. Sesuai dengan kebutuhan/panduan yang ada

Penggunaan dana BOS telah diatur oleh pemerintah melalui buku panduan yang diterbitkan setiap tahun anggaran. Setiap penggunaan dana BOS harus sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penggunaan dana BOS diarahkan

untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah penerima. Kegiatan yang tidak berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tidak diperbolehkan menggunakan dana dari BOS. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan masalah kelengkapan administrasi program BOS.

“Penggunaan dana BOS untuk setiap sekolah penerima bantuan telah diatur. Kegiatan yang diperbolehkan untuk dibiayai oleh dana BOS adalah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan seperti pembiayaan dalam rangka penerimaan murid baru, pembelian buku pelajaran, pembiayaan kegiatan ulangan, pembiayaan perawatan sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan tidak diperkenankan untuk menggunakan dana bantuan BOS. Jika hal ini dilanggar pihak sekolah kami akan menindak tegas. Kami selalu mengawasi setiap penggunaan dana BOS yang dilakukan sekolah penerima bantuan, hal ini kami lakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana BOS” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Setiap penggunaan dana BOS yang diterima oleh masing-masing sekolah penerima bantuan, ketentuan penggunaannya telah diatur, kegiatan apa saja yang boleh dibiayai dana BOS dan kegiatan apa yang dilarang. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh dana BOS adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kependidikan lainnya. Sedangkan kegiatan yang cenderung bersifat untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu tidak diperkenankan untuk menggunakan dana BOS tersebut. Untuk kelancaran penggunaan dana BOS tersebut diharapkan setiap sekolah membuat laporan perencanaan anggaran dan laporan penggunaan anggaran BOS supaya dapat kita monitoring dan awasi sehingga setiap penggunaan dana BOS akan dapat sesuai dengan ketentuan yang ada pada panduan penggunaan dana BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan panduan yang telah tertuang dalam buku panduan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan RAPBS yang diajukan sekolah. RAPBS yang diajukan juga harus sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Setiap sekolah harus membuat laporan kegiatan penggunaan dana BOS. Laporan ini sebagai bukti tertulis dari pihak sekolah telah melaksanakan kegiatan yang didanai oleh BOS. ” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa penggunaan dana BOS untuk setiap sekolah penerima BOS telah diatur dalam buku panduan BOS. Kegiatan yang didanai oleh BOS merupakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah penerima bantuan. Kegiatan yang tidak berkaitan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tidak diperbolehkan menggunakan dana BOS. Setiap sekolah diwajibkan untuk membuat laporan perencanaan dan penggunaan dana BOS sebagai bukti administrasi. Berikut ini wawancara terkait dengan penggunaan dana BOS yang sesuai dengan kebutuhan atau panduan di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Penggunaan dana BOS di sekolah kami disesuaikan dengan panduan yang tertulis di buku panduan pelaksanaan BOS. Kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS kami cantumkan di RAPBS yang kami ajukan ke tim manajemen BOS kabupaten. Kegiatan yang dibiayai oleh BOS antara lain membayar honor guru, kegiatan penerimaan murid baru, pembelian buku pokok, peningkatan mutu guru, THB, ulangan harian, UAS, belanja habis pakai, pengadaan alat-alat olahraga, perawatan renovasi ringan, dan pembiayaan kegiatan siswa. Laporan terhadap setiap kegiatan tersebut kami laporkan kepada tim manajemen BOS kabupaten untuk dinilai” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Penggunaan dana BOS di sekolah kami disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada di buku panduan BOS yang dikeluarkan pemerintah. Kegiatan yang didanai oleh BOS adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan yang berkaitan dengan kependidikan seperti kegiatan kesiswaan, renovasi ringan sekolah, peningkatan mutu guru melalui KKG, K3S, pelatihan dan penataran serta pembelian buku pelajaran.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Setahu kami penggunaan dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung telah tertera di RAPBS sekolah yang telah diajukan ketika pengajuan permohonan dana BOS diucapkan. Penggunaan dana BOS sejauh ini masih sesuai dengan yang tercantum dalam panduan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan yang dibiayai merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Sebagai pihak yang mewakili orang tua murid di sekolah kami selalu diberi informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah.” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa penggunaan dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan telah sesuai dengan panduan pelaksanaan BOS yang ditetapkan pemerintah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Membayar honorarium dan kesejahteraan guru
- 2) Belanja Barang
 - a) Penerimaan murid baru
 - b) Buku materi pokok dan perpustakaan
 - c) Biaya peningkatan mutu guru

- d) THB, ulangan harian dan UAS
 - e) Belanja habis pakai
 - f) Pengadaan alat-alat olahraga
- 3) Belanja Pemeliharaan
- a) Perawatan ringan/rehab ringan
- 4) Belanja lain-lain
- a) Membiayai kegiatan kesiswaan
 - b) Pengambilan dana BOS
 - c) Percetakan RAPBS
 - d) Percetakan LPJ BOS
 - e) Konsumsi sekolah

Terdapat beberapa kegiatan yang sesuai dengan panduan BOS tetapi tidak dibiayai oleh BOS di SDN 07 Lubuk Nibung seperti kegiatan pembiayaan langganan daya dan jasa serta pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin. Pembayaran langganan daya (listrik) telah di biayai oleh anggaran rutin yang diperoleh dari pemerintah sedangkan pemberian bantuan transportasi bagi siswa miskin tidak dilakukan karena lokasi sekolah masih dapat dengan mudah dijangkau oleh siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 100% responden mengetahui bahwa setiap kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS adalah kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah.

b. Besarannya sesuai dengan jumlah siswa

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Kebijakan dasar dalam pelaksanaan BOS telah menetapkan jumlah biaya satuan termasuk BOS buku untuk setiap siswa pertahun. Mulai Januari 2009 mengalami kenaikan secara signifikan menjadi :

- a) SD di kota Rp. 400.000,00
- b) SD di kabupaten Rp. 397.000,00
- c) SMP di kota Rp. 575.000,00
- d) SMP di kabupaten Rp. 570.000,00

Adanya kenaikan dana BOS dan kenaikan kesejahteraan guru, maka semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah. Untuk sekolah swasta, Pemerintah daerah wajib mengendalikan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan pada siswa mampu. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan masalah pemberian dana BOS sesuai dengan jumlah siswa.

“Pemberian dana BOS terhadap sekolah penerima bantuan telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk SD negeri di kota Rp. 400.000,00 sedangkan untuk SD negeri di kabupaten Rp. 397.000,00. Untuk SD negeri di daerah Ketungau termasuk SD negeri kabupaten sehingga dana yang diterima Rp. 397.000,00 siswa/sekolah. Jika dana BOS yang diterima sekolah lebih besar dari yang seharusnya, misalnya

akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke rekening tim manajemen BOS provinsi dan memberitahukan pengembalian tersebut dengan mengirim salinan bukti transfer ke tim manajemen BOS provinsi.” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Jumlah dana BOS yang diterima sekolah penerima bantuan dihitung berdasarkan jumlah siswa di sekolah yang bersangkutan. Untuk sekolah di kota jumlah bantuan lebih banyak dibanding dengan jumlah yang diterima sekolah di kabupaten. Untuk sekolah negeri baik SD maupu SMP negeri di kabupaten Sintang memperoleh dana sebesar Rp. 397.000,00 untuk SD dan Rp. 570.000,00 untuk SMP. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan kondisi dan jumlah siswa terakhir di sekolah tersebut. Jika terdapat siswa yang mutasi maka akan diperhitungkan ulang lagi.” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Dana BOS yang akan diterima sekolah telah ditetapkan pemerintah yaitu Rp. 397.000,00 untuk SD negeri dan Rp. 570.000,00 untuk SMP negeri. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sebagai komitmen dari pemerintah yang sangat konsen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa pemberian dana BOS kepada sekolah penerima jumlahnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Di kabupaten Sintang jumlah bantuan untuk SD negeri sebesar Rp. 397.000,00 sedangkan untuk SMP negeri berjumlah Rp. 570,000,00 persiswa/tahun. Jika terdapat kelebihan dana yang disalurkan akibat terdapat kesalahan data jumlah siswa maka dana tersebut harus dikembalikan lagi ke pemerintah melalui

rekening tim manajemen BOS provinsi. Berikut ini wawancara terkait dengan pemberian dana BOS berdasarkan jumlah siswa di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Jumlah bantuan BOS yang kami terima dari pemerintah berjumlah Rp. 397.000,00 siswa/tahun. Dengan jumlah siswa di SD N 07 Lubuk Nibung yang berjumlah 112 orang maka total sekolah kami menerima dana BOS sebesar Rp. 44.464.000,00 untuk tahun anggaran 2009/2010. Dana tersebut masuk ke rekening sekolah secara bertahap yaitu sebanyak empat periode. Setiap periodenya sekolah kami menerima dana bantuan kurang lebih sebanyak 11 jutaan” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Dana yang kami peroleh dari bantuan BOS adalah dana yang dihitung berdasarkan kondisi dan jumlah terakhir siswa di sekolah kami. Untuk tahun 2009/2010 sekolah kami menerima kurang lebih 44 juta. jumlah tersebut diperoleh sekolah selama 4 tahap. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran kami perlu mempertimbangkan besarnya dana yang akan diturunkan pemerintah dalam satu periode sehingga dapat memperkirakan kegiatan apa saja yang dilaksanakan setiap periodenya.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Jumlah dana BOS yang diterima SDN 07 Lubuk Nibung tahun anggaran 2009/2010 adalah Rp 44,4 juta. Jumlah tersebut merupakan hasil perkalian dengan jumlah siswa dengan standar bantuan yang diterima siswa pertahun. Untuk SDN 07 Lubuk Nibung satu orang siswa memperoleh bantuan sebesar 397 ribu per siswa selama setahun.” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa Jumlah dana BOS yang diterima SDN 07 Lubuk Nibung tahun ajaran 2009/2010 berjumlah Rp. 44.464.000,00 dengan standar persiswa memperoleh bantuan sebesar Rp. 397.000,00 pertahun. Jumlah bantuan tersebut disalurkan ke SDN 07 Lubuk Nibung secara bertahap selama empat periode. Pernyataan tersebut

diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 92,86% responden mengetahui bahwa perhitungan jumlah dana BOS yang diterima berdasarkan perhitungan jumlah siswa di SDN 07 Lubuk Nibung.

c. Pertanggungjawaban dilengkapi dengan dokumen administrasi

Pelaksanaan program BOS harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program BOS oleh tim manajemen pusat, provinsi dan kabupaten adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Laporan yang disampaikan tim manajemen sekolah ke tim manajemen kabupaten meliputi berkas-berkas sebagai berikut :

- 1) Nama-nama siswa miskin
- 2) Jumlah dana yang dikelola oleh sekolah
- 3) Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran
- 4) Laporan pembelian buku

Semua laporan tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan masalah laporan pertanggungjawaban yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen administrasi.

“Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS oleh sekolah penerima bantuan dilakukan setiap akhir pelaksanaan BOS. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-

dokumen administrasi. Seperti laporan penggunaan dana maka setiap sekolah harus melampirkan data mengenai jenis kegiatan secara detail dan jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain laporan dari pihak sekolah penerima bantuan, laporan juga diperoleh dari tim manajemen BOS baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Laporan yang sering dilaporkan adalah mengenai pengaduan terhadap pelaksanaan BOS yaitu terkait dengan penyelewengan dana BOS. Berdasarkan laporan yang kami terima jumlah penyelewengan dana BOS banyak dilakukan oleh kepala sekolah.” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Setiap pelaporan yang disampaikan sekolah penerima BOS harus selalu melampirkan bukti penggunaan dana BOS. Bukti tersebut dapat berupa kuitansi maupun laporan keuangan. Dengan adanya bukti administrasi tersebut dapat membantu tim manajemen BOS untuk melakukan penilaian dan audit terhadap kelayakan pelaksanaan BOS disekolah penerima bantuan BOS” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Setiap akhir pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dari dana BOS, pihak sekolah diharuskan membuat laporan yang dilengkapi dokumen administrasi. Laporan pertanggungjawaban disampaikan pihak penerima BOS sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana BOS.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa laporan pertanggungjawaban terhadap setiap kegiatan yang mempergunakan dana BOS untuk setiap sekolah penerima bantuan harus dilengkapi dengan dokumen administrasi. Adanya dokumen administrasi tersebut mempermudah tim manajemen BOS baik kabupaten, provinsi maupun pusat untuk mengadakan audit dan penilaian terhadap pelaksanaan BOS di sekolah tersebut. Laporan tidak

hanya diterima dari pihak sekolah yang menerima bantuan BOS tetapi juga diperoleh dari tim manajemen BOS. Laporan tersebut biasanya berupa laporan pengaduan masalah terhadap pelaksanaan BOS di setiap sekolah, untuk tahun anggaran 2008/2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menerima laporan terhadap penyalahgunaan dana BOS di SD dan SMP di kabupaten Sintang. Berikut data terkait dengan pelaporan penyimpangan penggunaan dana BOS di kabupaten Sintang:

Tabel 4.4. Data Penyimpangan Penggunaan dana BOS di Kabupaten Sintang

NO	NAMA	PROSENTASE (%)
1	Kepala Sekolah	80
2	Bendahara BOS	20
3	Guru	10
4	Komite Sekolah	10
5	Dinas Pendidikan Kabupaten	0

sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang (2009)

Berikut ini wawancara terkait dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung kami buat pada akhir pelaksanaan program BOS di sekolah kami. Laporan tersebut kami lengkapi dengan data-data pendukung seperti data nama-nama siswa miskin, laporan jumlah dana yang dikelola, laporan terhadap pencatatan terhadap kritik dan saran serta laporan pembelian buku. Laporan pertanggungjawaban tersebut kami sampaikan ke tim manajemen BOS kabupaten

untuk kemudian di limpahkan ke pihak lebih tinggi untuk di adakan audit mengenai kesesuaian pelaksanaan BOS” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Setahu kami setiap laporan pertanggungjawaban terhadap setiap kegiatan yang mempergunakan dana BOS selalu dibuat selengkap mungkin dengan didukung dengan data-data dan dokumen administrasi yang mendukung. Kelengkapan data dan dokumen tersebut membantu memberikan kemudahan tim penilai menilai kesesuaian pelaksanaan BOS di sekolah kami.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung disampaikan ke tim manajemen BOS di kabupaten. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilengkapi dengan dokumen administrasi pendukung.” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan BOS di sekolah penerima bantuan dilengkapi dengan data data atau dokumen administrasi pendukung. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung di sampaikan ke tim manajemen BOS kabupaten Sintang untuk kemudian di tindaklanjuti. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- 1) Data-data tentang jumlah siswa termasuk siswa miskin
- 2) Jumlah dana BOS yang dikelola oleh sekolah dilengkapi dengan RAPBS
- 3) Laporan pencatatan pertanyaan/kritik/saran
- 4) Laporan pembelian buku pelajaran dan perpustakaan

Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat dan diketahui oleh semua dewan guru dan juga komite sekolah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 85,71% responden mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat sekolah dilengkapi dengan data-data dan dokumen administrasi pendukung..

d. Pengawasan dan Pemeriksaan

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan dan pemeriksaan program BOS meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional internal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat, serta pemeriksaan BPK.

Pengawasan dan pemeriksaan program BOS meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional internal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat, serta pemeriksaan BPK.

1) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.

2) Pengawasan Fungsional Internal

Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3) Pengawasan Eksternal

Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

4) Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap program BOS.

5) Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam

pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

Berikut ini hasil wawancara terkait dengan masalah pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS di sekolah penerima bantuan BOS.

“Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS di setiap sekolah melibatkan berbagai pihak seperti dinas pendidikan, BPKP, BPK dan juga masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa pentingnya pelaksanaan BOS tersebut untuk kemajuan dunia pendidikan. Pemerintah berusaha menjamin pelaksanaan program BOS bebas dari penyelewengan oleh karena itu pengawasan dan pemeriksaan melibatkan pihak terkait dan kompeten. Keterlibatan masyarakat dilakukan karena masyarakat merupakan pihak yang langsung berhubungan dengan pihak sekolah sehingga dapat selalu mengawasi pelaksanaan BOS di setiap sekolah yang bedekatan dengan tempat tinggal mereka” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Pelaksanaan program BOS di sekolah langsung diawasi oleh dinas pendidikan dan juga masyarakat. Jika terdapat kecurigaan terhadap penyimpangan pelaksanaan BOS, masyarakat dapat menyampaikan aduannya kepada tim manajemen BOS atau langsung ke dinas pendidikan. Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam pengawasan terhadap pelaksanaan BOS di sekolah penerima bantuan” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten yang melibatkan dinas pendidikan dan masyarakat umum sebagai pengawas dan BPKP dan BPK sebagai pihak yang akan memeriksa dan mengaudit pelaksanaan BOS di setiap sekolah penerima ” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS di sekolah penerima bantuan BOS dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten seperti dinas pendidikan, BPKP, BPK dan masyarakat umum. Berikut ini wawancara terkait dengan masalah pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan juga masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan lebih terkait dengan masalah administrasi. Sedangkan yang dilakukan oleh masyarakat lebih kearah pelaksanaan dilapangan seperti pembawaan kegiatan siswa, pembelian buku pelajaran dan lainnya yang berkenaan dengan masyarakat yang sebagian merupakan orang tua siswa yang sekolah di SD ini.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“*Pengawasan pelaksanaan BOS di sekolah kami melibatkan berbagai pihak salah satunya adalah masyarakat umum. Keterlibatan masyarakat ini karena kedekatan masyarakat terhadap sekolah yang berada di lingkungannya. Karena setiap informasi mengenai sekolah maka masyarakat dapat langsung mengetahuinya.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Kami sebagai komite dan juga masyarakat umum belum berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan BOS di SDN Lubuk Nibung ini selain dari pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan BPK. Karena kami belum memperoleh sosialisasi yang mendalam tentang BOS dan penggunaannya. Karena tidak dilibatkan maka kami belum bisa berbuat apa-apa terkait dengan penyimpangan penggunaan dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung. Jika terjadi penyimpangan kami juga tidak tahu harus melaporkan kemana” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

“Sebagai masyarakat umum kami memang berdekatan dengan lingkungan sekolah karena di sekolah tersebut anak kami belajar. Namun kegiatan seperti bantuan BOS kami tidak berusaha mencari tahu mengenai kegiatan tersebut dan apa manfaatnya bagi siswa dan sekolah. Yang terpenting anak kami datang ke sekolah dan belajar setiap hari.” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa peran serta masyarakat sangat minim dalam pengawasan pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung karena masyarakat belum terlalu peduli dengan lingkungan sekolah. Setiap ada permasalahan yang dihadapi sekolah masyarakat tidak berusaha mengetahui lebih dahulu. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 86,36% responden tidak mengetahui siapa saja yang berperan dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan pelaksanaan BOS..

Berdasarkan analisis terhadap tahapan penggunaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan pelaksanaan dana BOS di SDN 07 belum terimplementasikan dengan baik. Indikatornya sesuai dengan teori Edward (2003) yang menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Keempat variabel tersebut belum terdapat dalam pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung. Indikator komunikasi terlihat dari beberapa parameter seperti :

- 1) Belum adanya komunikasi dan koordinasi antara pihak SDN 07 Lubuk Nibung dengan tim manajemen BOS dalam penentuan jumlah dana BOS yang dibutuhkan sekolah.

- 2) Belum adanya koordinasi antara kepala sekolah, guru dan komite SDN 07 Lubuk Nibung dalam menentukan alokasi dana terhadap kegiatan yang dibiayai oleh BOS
- 3) Belum adanya komunikasi dan kerjasama antara kepala sekolah, guru dan komite SDN 07 Lubuk Nibung dalam membuat laporan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan BOS
- 4) Belum adanya komunikasi antara komite sekolah, masyarakat dan tim manajemen dalam pengawasan pelaksanaan BOS di sekolah.

Indikator sumber daya terlihat dari beberapa parameter seperti :

- 1) Kepala sekolah belum melibatkan dewan guru SDN 07 Lubuk Nibung dalam merumuskan dan menentukan jenis kegiatan yang akan didanai oleh BOS
- 2) Kemampuan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung untuk melengkapi data-data dengan dokumen administrasi hanya dilakukan oleh Kepala Sekolah.
- 3) Belum adanya kemampuan pihak-pihak yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam melaksanakan tugasnya untuk menemukan permasalahan dalam pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.

Indikator disposisi terlihat dari beberapa parameter seperti :

- 1) Tidak adanya persetujuan dari dewan guru dan juga komite SDN 07 Lubuk Nibung terkait dengan pengajuan jenis kegiatan yang akan didanai oleh BOS ke tim manajemen BOS

- 2) Persetujuan hanya dari tim manajemen BOS kabupaten terhadap pengajuan jumlah dana yang diajukan oleh pihak SDN 07 Lubuk Nibung

Indikator struktur organisasi terlihat dari beberapa parameter seperti :

- 1) Adanya hubungan birokrasi antara pihak SDN 07 Lubuk Nibung dengan tim manajemen BOS kabupaten terkait pengajuan usulan dana BOS
- 2) Adanya hubungan birokrasi dalam pelaporan hasil pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung terhadap tim manajemen kabupaten, provinsi dan pusat.

4. Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan BOS pada penelitian ini akan melihat dampak pelaksanaan BOS terhadap peningkatan kualitas pendidikan di SDN 07 Lubuk Nibung. Hasil pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung akan melihat beberapa indikator antara lain :

- a) Kelulusan tiga tahun terakhir yang bisa menembus angka seratus persen
- b) Menangkal naiknya indeks prestasi siswa dari tahun ke tahun
- c) Berkurangnya siswa putus sekolah
- d) Pengadaan buku pelajaran
- e) Kegiatan ekstra kurikuler

Hasil pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dapat dikatakan berjalan lancar apabila indikator-indikator tersebut menunjukkan hasil yang positif. Berikut ini penjelasan terhadap indikator-indikator tersebut.

a. Jumlah Bantuan untuk Siswa Miskin

Salah satu sasaran dari pelaksanaan program BOS adalah untuk memberi bantuan kepada siswa miskin untuk dapat bersekolah seperti siswa-siswa lainnya. Perhitungan jumlah dana BOS yang diterima setiap sekolah tidak berdasarkan jumlah siswa miskin tetapi jumlah seluruh siswa di sekolah, sehingga bantuan untuk siswa miskin secara langsung dapat dianggarkan oleh pihak sekolah penerima bantuan. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan jumlah bantuan terhadap siswa miskin.

“Pelaksanaan program BOS yang dilakukan oleh pemerintah secara tegas bertujuan untuk memberikan kesempatan semua anak usia sekolah dapat melanjutkan sekolah sampai jenjang setinggi-tingginya. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dari keluarga yang tergolong tidak mampu untuk melanjutkan sekolah karena ada program sekolah gratis. Kesempatan untuk melanjutkan sekolah bagi siswa miskin dapat membantu mengurangi jumlah anak putus sekolah dan mensukseskan program wajib belajar sembilan tahun” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Kesempatan bersekolah bagi siswa miskin dapat dirasakan setelah pemerintah mengeluarkan program BOS yang memgratiskan biaya sekolah untuk siswa SD dan SMP. Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh siswa miskin. Dengan adanya kesempatan tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Adanya program BOS sangat membantu masyarakat yang termasuk dalam golongan kurang mampu karena dengan adanya program BOS ini mengurangi beban mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang SMP. Hal ini dapat terjadi karena biaya sekolah yang digratiskan dan juga siswa mendapat bantuan buku pelajaran dan juga memungkinkan mendapatkan biaya transportasi untuk siswa

yang tinggal jauh dari sekolah” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa program BOS yang dicanangkan oleh pemerintah secara tidak langsung memberi keringanan terhadap siswa miskin untuk tetap melanjutkan sekolah karena biaya untuk sekolah gratis. Secara tidak langsung BOS dapat meringankan beban siswa miskin tetapi pada pelaksanaannya menjadi kebijakan masing-masing sekolah untuk menetapkan pemberian bantuan untuk siswa yang tergolong tidak mampu. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan dana transportasi, seragam sekolah, perlengkapan sekolah dan lainnya sesuai dengan kebutuhan siswa miskin tersebut. Berikut ini wawancara terkait dengan jumlah bantuan program BOS untuk siswa miskin di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Jumlah bantuan untuk siswa miskin dalam program BOS tidak secara jelas kami cantumkan dalam anggaran yang tertuang dalam RAPBS. Tetapi untuk kegiatan semua siswa tanpa terkecuali yang miskin akan mendapatkan bantuan BOS tersebut seperti untuk membiayai penerimaan siswa baru, pembelian buku pelajaran, penyelenggaraan ujian dan lain-lainnya. Dengan adanya kegiatan tersebut kami berharap siswa miskin di daerah Lubuk Nibung dapat merasakan bangku sekolah lagi pula sekolah sekarang sudah gratis.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Program BOS bertujuan untuk memberi bantuan dan keringanan kepada siswa yang tidak mampu untuk dapat terus bersekolah karena bantuan BOS membebaskan biaya untuk sekolah dan juga membantu sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah penerima bantuan dengan mendanai kegiatan-kegiatan yang menunjang pembelajaran di sekolah.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Sebagai perwakilan masyarakat di sekolah kami merasa bantuan BOS yang diterima alokasi penganggaran lebih mengarah untuk perbaikan dan pengadaan secara fisik seperti pengadaan ATK dan renovasi ringan terhadap bangunan sekolah. Sedangkan untuk bantuan secara langsung untuk siswa yang tidak mampu seperti bantuan transportasi dan seragam sekolah tidak dianggarkan. Sehingga siswa yang miskin hanya merasakan bantuan BOS hanya dari pembebasan biaya sekolah. Pembebasan biaya sekolah tidak hanya dirasakan oleh siswa miskin saja tetapi seluruh siswa yang bersekolah di SDN 07 Lubuk Nibung” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

“Dana BOS yang diterima sekolah hanya kami rasakan dengan pembebasan biaya sekolah di SDN 07 Lubuk Nibung. Untuk bantuan yang lainnya kami tidak merasakannya secara langsung.” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)

“Sejak adanya BOS kami sangat senang karena teman-teman yang kurang mampu sekarang dapat bersekolah lagi, selain itu kami merasakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar semakin bertambah dengan adanya penambahan buku pelajaran dan perpustakaan.” (Siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung secara tidak langsung membantu memberikan keringanan bagi siswa miskin melalui pembebasan biaya sekolah. Bantuan secara langsung kepada siswa miskin tidak dirasakan hal ini terjadi karena masih banyak kebutuhan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan observasi beberapa siswa kurang mampu membutuhkan biaya secara langsung untuk membeli perlengkapan sekolah seperti sepatu dan alat tulis dan juga sebagian membutuhkan biaya transportasi karena jarak tempuh yang

jauh bisa mencapai 1,5 jam perjalanan dengan jalan kaki untuk menuju sekolah.. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 56,67% responden mengetahui pemberian bantuan BOS untuk memberikan keringanan terhadap siswa yang kurang mampu..

b. Berkurangnya Siswa Putus Sekolah

Pelaksanaan BOS yang ditetapkan oleh pemerintah berdampak juga terhadap berkurangnya siswa putus sekolah terutama karena alasan biaya. Program BOS ini menggratiskan biaya sekolah sampai SMP sehingga memungkinkan untuk setiap orang dari berbagai kalangan untuk tetap melanjutkan sekolah sesuai dengan tingkatannya. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan program BOS dalam rangka mengurangi siswa putus sekolah.

“Pelaksanaan program BOS secara tidak langsung akan menurunkan anak putus sekolah. Hal ini dapat terjadi karena biaya untuk sekolah gratis sehingga anak yang putus sekolah dipastikan memiliki permasalahan di luar permasalahan biaya. Diharapkan tidak adalagi anak usia sekolah tidak berada di sekolah pada saat jam sekolah.” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Program BOS yang dilasanakan dapat membantu pemerintah untuk mngurangi jumlah anak putus sekolah. Program BOS akan menggratiskan biaya sekolah sehingga semua orang dapat melanjutkan sekolahnya” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Dampak dari program BOS adalah mengurangi jumlah siswa putus sekolah melalui pembebasan biaya untuk bersekolah. sehingga diharapkan setiap orang dapat bersekolah” (Kepala

Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa program BOS yang dicanangkan oleh pemerintah berdampak terhadap berkurangnya jumlah siswa putus sekolah. Hal ini dapat terjadi karena tidak dipungutnya biaya untuk bersekolah baik SD maupun SMP. Berikut ini wawancara terkait dengan dampak program BOS terhadap berkurangnya siswa putus sekolah di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Pelaksanaan BOS berdampak pula terhadap berkurangnya siswa yang putus sekolah. Berdasarkan data yang ada disekolah semakin tahun siswa yang putus sekolah semakin berkurang untuk tahun ini saja tidak terdapat siswa yang putus sekolah.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Sejak dilaksanakannya program BOS, jumlah siswa yang putus sekolah jauh berkurang jika dibanding sebelum ada program BOS hal ini disebabkan adanya sekolah gratis bagi para siswa.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Dampak pelaksanaan program BOS yang kami rasakan adalah berkurangnya siswa putus sekolah karena sejak adanya program BOS biaya sekolah menjadi gratis. Semua biaya terkait dengan kegiatan pembelajaran sudah dianggarkan melalui bantuan BOS tersebut”(Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

“Program BOS yang ada di SDN 07 Lubuk Nibung sangat membantu kami terutama siswa yang miskin untuk dapat terus melanjutkan sekolah karena semua biaya sekolah sudah gratis dan tidak ada pungutan lainnya yang dapat memberatkan kami sebagai warga yang kurang mampu.” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)

“Sejak adanya bantuan BOS kami dan teman-teman kami dapat selalu belajar bersama tidak ada teman kami yang berhenti sekolah karena alasan biaya. karena semua biaya untuk pendidikan disekolah ini sudah ditanggung BOS.”
(Siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung berdampak terhadap berkurangnya jumlah siswa yang putus sekolah. Selama tahun anggaran 2009/2010 ini saja tidak terdapat siswa yang putus sekolah. Kalaupun ada yang berhenti bukan semata-mata persoalan biaya tetapi kebanyakan disebabkan oleh faktor lain. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 83,33% responden mengetahui dampak dari pelaksanaan program BOS dapat mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah.

c. **Pengadaan Buku Pelajaran**

Salah satu target dari program pelaksanaan BOS adalah pengadaan buku pelajaran. Buku teks pelajaran menjadi salah satu target yang harus dipenuhi oleh sekolah penerima bantuan BOS. Membeli buku teks pelajaran yang diprioritaskan dalam kegiatan belajar mengajar disekolah dan digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun. Buku yang dibeli harus buku baru bukan buku bekas. buku pelajaran tersebut digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Buku teks pelajaran yang sudah dibeli merupakan koleksi perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah, harus dipinjamkan secara cuma-cuma kepada siswa dan boleh dibawa pulang.

Berikut ini hasil wawancara terkait dengan pengadaan buku teks pelajaran dalam program BOS.

“Salah satu program BOS adalah pengadaan buku teks pelajaran. Buku teks tersebut merupakan buku teks wajib yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan menjadi inventaris sekolah dan harus dipinjamkan kepada siswa sebagai buku pengangan” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Pengadaan buku teks pelajaran mempergunakan dana BOS. Buku pelajaran tersebut nantinya menjadi buku wajib disekolah dan setiap siswa mempunyai hak untuk mempergunakan buku tersebut” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Pengadaan buku pelajaran merupakan salah satu sasaran dari program BOS dan setiap sekolah penerima bantuan BOS harus menganggarkan pembelian buku pelajaran dalam RAPBS yang dibuat” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa pengadaan buku teks pelajaran merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh setiap sekolah penerima bantuan BOS. Buku tersebut menjadi buku wajib dalam kegiatan belajar mengajar dan wajib dipinjamkan kepada para siswa.

Berikut ini wawancara terkait dengan pengadaan buku teks pelajaran di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Dalam membuat RAPBS kami mencantumkan poin untuk pengadaan buku teks pelajaran. Buku tersebut menjadi buku teks wajib seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Buku tersebut nantinya dapat dipinjamkan kepada siswa” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Setiap pelajaran yang kami ajarkan selalu menggunakan buku dari pengadaan dari program BOS. untuk kesamaan semua maka buku tersebut menjadi acuan dalam kegiatan belajar mengajar dan setiap siswa wajib dipinjami buku tersebut” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Pengadaan buku pelajaran oleh pihak sekolah kami sambut dengan antusias dan kami selalu berharap buku tersebut dapat bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan di SDN 07 Lubuk Nibung”(Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

“Kami melihat anak-anak kami selalu mepergunakan buku teks yang dibagikan oleh pihak sekolah. Hal ini dapat meringankan kami karena kami tidak perlu membelikan buku teks pelajaran untuk anak kami” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)

“Buku teks pelajaran yang dipergunakan disekolah kami merupakan buku teks pembagian oleh pihak sekolah. Setiap pelajaran kami selalu memperoleh buku teks pelajaran sesuai mata pelajarannya” (Siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa buku teks pelajaran yang dipergunakan di SDN 07 Lubuk Nibung merupakan buku teks pelajaran yang bersumber dari pengadaan dari bantuan BOS. Buku tersebut menjadi pegangan wajib dalam kegiatan belajar mengajar di SDN 07 Lubuk Nibung. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuisisioner yang menyatakan 76,67% responden mengetahui bahwa buku teks pelajaran yang dipergunakan di SDN 07 Lubuk Nibung merupakan buku hasil dari pengadaan dari dana bantuan BOS..

d. Kegiatan Ekstrakurikuler

Program BOS yang dikeluarkan pemerintahan berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah penerima. Penggunaan dana BOS diarahkan untuk mendukung hal tersebut. Selain mendanai terkait dengan kegiatan belajar mengajar, penggunaan dana BOS juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan siswa salah satunya kegiatan ekstrakurikuler. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dibiayai oleh dana BOS.

“Dana BOS dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah dengan membiayai kegiatan atau program yang berkaitan dengan peningkatan mutu tersebut. Selain kegiatan belajar mengajar dana BOS juga dapat difungsikan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Fungsi BOS didanai adalah untuk mendanai segala macam kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kualitas pendidikan seperti kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Setiap kegiatan yang didanai oleh dana BOS dibuat laporan pertanggungjawaban termasuk kegiatan ekstrakurikuler.” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Setiap sekolah yang mendapatkan dana BOS diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana tersebut sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan siswa baik secara akademik maupun non akademik. Salah satu kegiatan yang dapat dibiayai oleh BOS adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa penggunaan dana BOS dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa terhadap bidang tertentu sesuai dengan minat dan bakatnya. Berikut ini wawancara terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang didanai oleh program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Kegiatan ekstrakurikuler yang dibiayai oleh program BOS di sekolah kami antara lain kegiatan pramuka dan olah raga. Kedua kegiatan tersebut kami pilih untuk didanai oleh BOS karena kedua kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan bidang tersebut. Kegiatan tersebut sebelum ada program BOS sudah ada tetapi tidak intens pelaksanaannya karena terkendala masalah biaya untuk membeli perlengkapan dan membayar honor pelatih atau pembina” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Sejak adanya bantuan BOS kegiatan ekstrakurikuler di SDN 07 Lubuk Nibung dapat berjalan lagi sesuai dengan rencana. Kegiatan tersebut berupa kegiatan pramuka dan kegiatan olahraga. Untuk kegiatan olahraga dapat terlaksana lagi karena perlengkapan olahraga seperti bola voly, bola kaki, net dan lain-lainnya sudah terbeli mempergunakan dana BOS” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari pihak sekolah dana BOS juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan siswa seperti pramuka dan ekstrakurikuler olahraga.”(Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

“Setahu kami kegiatan ekstrakurikuler di SDN 07 Lubuk Nibung hanya kegiatan olah raga. Sedangkan yang lainnya kami tidak pernah melihatnya. Setahu kami kegiatan olah raga pun di SDN 07 Lubuk Nibung sama waktunya dengan mata pelajaran penjaskes” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)

“Kegiatan Ekstrakurikuler yang kami ikuti adalah kegiatan olah raga itupun tidak rutin. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga jarang kami lakukan biasanya gabung dengan mata pelajaran penjaskes dan kegiatan senam pagi setiap jumat” (Siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SDN 07 Lubuk Nibung hanya kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga juga jarang dilaksanakan dan biasanya digabung dengan mata pelajaran penjaskes. Kegiatan tersebut dapat terlaksana karena didanai oleh dana BOS. Dana BOS yang dipergunakan untuk membeli perlengkapan dan peralatan serta untuk membayar honor pelatih atau pembina. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 63,33% responden mengetahui bahwa kegiatan ekstrakurikuler di SDN 07 Lubuk Nibung dibiayai dari dana bantuan BOS.

e. Pengembangan Profesi Guru

BOS yang diberikan kepada setiap sekolah selain bertujuan untuk peningkatan kemampuan siswa juga dapat dipergunakan untuk peningkatan kemampuan guru dan kepala sekolah. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dibiayai oleh dana BOS.

“Program BOS dapat juga dimanfaatkan oleh sekolah untuk peningkatan kualitas guru melalui pembiayaan kegiatan perkumpulan, KKG, pelatihan dan penataran. Harapan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kompetensi guru sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan pertemuan atau kelompok belajar, pelatihan dan pendidikan. Semua biaya tersebut dapat mempergunakan dana BOS.” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“BOS yang diterima sekolah dapat dianggarkan untuk pengembangan profesi guru melalui kegiatan penataran dan pelatihan yang diikuti guru yang bersangkutan.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa dana BOS dapat dimanfaatkan untuk membiayai pengembangan profesi guru supaya guru di sekolah penerima BOS memiliki kompetensi terhadap bidangnya. Pengembangan profesi guru dapat berupa kelompok belajar, penataran, pelatihan dan pendidikan. Berikut ini wawancara terkait dengan pengembangan profesi guru di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Adanya program BOS membantu kami dalam usaha mengembangkan profesi guru di SDN 07 Lubuk Nibung karena untuk semua kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu guru dibiayai oleh dana BOS. Seperti KKG atau KKS, penataran, pelatihan dan pendidikan.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Dengan adanya program BOS kami berharap dapat melaksanakan KKG dan dapat mengikuti penataran, pelatihan dan pendidikan karena ada alokasi dana yang direncanakan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan semuanya besumber dari dana BOS tetapi itu jarang dilakukan ” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Penggunaan dana BOS untuk pengembangan mutu guru di SDN 07 Lubuk Nibung kami rasakan belum efisien hal ini terlihat dari jaranganya keterlibatan guru dalam setiap penataran

disebabkan karena jauhnya lokasi ke pusat kota dan juga terbatasnya tenaga guru sehingga agak susah untuk meninggalkan sekolah untuk mengikuti kegiatan penataran yang biasanya diadakan di kota.”(Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa penggunaan dana BOS dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan profesi guru melalui kegiatan kelompok belajar, pendidikan dan pelatihan serta penataran. Pengembangan profesi ini masih belum optimal karena sebagian guru jarang menghadiri kegiatan kelompok belajar, pendidikan, pelatihan dan penataran karena terkendala masalah jarak dan keterbatasan tenaga guru. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 71,43% responden mengetahui bahwa kegiatan peningkatan profesi guru dapat mempergunakan dana dari bantuan BOS.

Berdasarkan analisis terhadap tahapan hasil pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan dana BOS di SDN 07 belum sepenuhnya sesuai dengan rencana dan belum berjalan lancar. Indikatornya sesuai dengan teori Edward (2003) yang menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Variabel yang terlihat dari hasil pelaksanaan BOS adalah variabel komunikasi dan sumber daya. Indikator komunikasi terlihat dari kurangnya komunikasi yang dilakukan pihak sekolah dengan siswa dan orang tua serta komite

sekolah mengenai penggunaan dana BOS untuk membiayai kegiatan atau program yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di SDN 07 Lubuk Nibung. Variabel Sumber daya, meskipun terlihat semakin meningkatnya kemampuan siswa dari tahun ke tahun belum juga bisa disimpulkan berbanding lurus dengan sumberdaya sebab pada kenyataannya pengelolaan BOS hanya bertumpu pada kepala sekolah seorang diri saja.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung

Keberhasilan Implementasi kebijakan publik dapat ditentukan oleh banyak variabel atau faktor. Menurut Edward (2003), keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Berdasarkan analisa terhadap pelaksanaan program BOS mulai dari tahapan perencanaan sampai hasil yang diperoleh, keempat variabel tersebut ditemukan dalam pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.

1. Komunikasi

Komunikasi dapat menjadi penentu implementasi kebijakan publik jika komunikasi tersebut dapat berlangsung dua arah. Hal ini belum difungsikan di SDN 07 Lubuk Nibung karena belum adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan tim manajemen BOS terkait dengan perencanaan program BOS atau pihak sekolah dengan masyarakat terkait tentang pelaksanaan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan BOS.

Komunikasi antara pihak sekolah dengan tim manajemen BOS belum dilakukan sehingga belum menghasilkan kesepakatan pengalokasian program BOS. Sedangkan komunikasi dengan masyarakat juga belum terkoordinasi dengan baik sehingga belum menghasilkan masukan dan penilaian terhadap pelaksanaan BOS.

2. Sumber Daya

Variabel sumber daya dalam pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dapat dilihat dari parameter sumber daya pengelola program BOS dan sumber daya sasaran pelaksanaan program BOS. Sumber daya pengelola program BOS ini adalah pihak yang merencanakan dan mengalokasikan program BOS agar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pihak yang terkait dengan perencanaan dan pengalokasian tersebut kepala sekolah dan dewan guru. Sedangkan sumber daya sasaran pelaksanaan BOS adalah siswa dan guru. Hal ini tidak terealisasi dengan baik karena dewan guru belum sepenuhnya terlibat.

Pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung hanya mengandalkan kemampuan kepala sekolah, tanpa melibatkan dewan guru dan komite sekolah dalam merencanakan dan mengalokasikan program BOS sesuai dengan kebutuhan. Indikator keberhasilannya dapat terlihat dari peningkatan kemampuan siswa berupa kenaikan nilai UASBN dalam tiga tahun terakhir, tetapi belum maksimal karena sumberdaya yang ada belum dikelola dengan baik. Kemampuan siswa meningkat didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran seperti ketersediaan buku pelajaran, peralatan dan perlengkapan kegiatan pembelajaran.

Meskipun ada bukti keberhasilan yang dicapai dari penggunaan dana BOS, sebagaimana dipaparkan di atas, tapi belum maksimal, karena sumber daya belum diberdayakan secara maksimal dalam perencanaan dan pengelolaan, seperti: dewan guru, komite dan siswa. Padahal Program BOS dalam perencanaan dan pengelolaan seharusnya melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan tindakan untuk menyetujui suatu bentuk kegiatan dan pelaporan. Kaitannya dengan pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung adalah adanya persetujuan setiap tahapan pelaksanaan BOS mulai dari perencanaan sampai hasil yang diperoleh. Persetujuan pada tahapan awal terjadi antara pihak sekolah dengan tim manajemen BOS terkait dengan pengalokasian BOS untuk setiap kegiatan. Persetujuan yang dimaksud di atas belum terjadi di lingkungan sekolah yaitu persetujuan antara kepala sekolah, guru dan komite sekolah terhadap pengalokasian dana BOS. Tidak terjadinya disposisi secara horizontal di setiap tahapan dapat menjadi penghambat pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah tahapan atau prosedur yang harus dilalui untuk menyampaikan usulan atau rencana. Pada pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung kemudahan birokrasi dapat dirasakan dalam pengajuan rencana

pengalokasian program BOS yang tidak menemui kendala. Sedangkan untuk penyaluran dana BOS yang dipergunakan adalah birokrasi langsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Adanya kemudahan birokrasi ini sangat membantu kelancaran pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung, Kecamatan Ketungau Tengah dalam perumusan rancangan anggaran biaya pendapatan dan belanja sekolah belum sepenuhnya merujuk pada peraturan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota karena:
 - a. Perumusan belum melibatkan komite sekolah dan pemangku kepentingan yang relevan.
 - b. Penyusunan rencana keuangan sekolah belum dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel.
 - c. Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan dan penggunaan keuangan kepada pemerintah sebagaimana yang diminta dalam laporan penggunaan dana BOS tetapi tidak transparan karena tidak diketahui oleh komite sekolah.
 - d. Masih terdapat penggunaan keuangan Negara yang sudah dialokasikan untuk anggaran pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah baik dari APBN maupun APBD

belum tepat sasaran, karena masih dikelola apa adanya oleh kepala sekolah, pada sisi lain kurangnya kepedulian dari orang tua dan masyarakat karena minimnya informasi yang mereka ketahui tentang BOS itu sendiri, lemahnya SDM sekolah dan masyarakat sehingga masalah pendidikan dibuat semacam '*pembiaran*' untuk berjalan apa adanya.

- e. Belum adanya pengawasan yang komprehensif dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan tentang BOS sehingga pihak sekolah belum merasa ditantang untuk berbuat maksimal untuk membuat korelasi positif antara standar pengelolaan dan pembiayaan. Padahal menurut Indra Bastian (2007:192) Berdasarkan sejumlah penelitian telah mengungkapkan antara pendidikan yang berkualitas dengan aspek pembiayaan mempunyai korelasi positif.
- f. Sangat diperlukan untuk memberikan sosialisasi sampai pada tingkat akar rumput oleh pihak sekolah atau Dinas Pendidikan kepada Komite Sekolah dan masyarakat pemilik sekolah agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang pendidikan itu sendiri dan tentang BOS, karena selama ini hanya baru kalangan tertentu saja yang sedikit paham sementara masih banyak pihak yang sama sekali belum memahaminya.
- g. Belum berperannya Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator sehingga fungsi Komite Sekolah yang seharusnya menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat tidak tersampaikan kepada pihak sekolah. Belum mendapat ruang untuk memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam hal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

2. Faktor-faktor penghambat keberhasilan program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung adalah :
 - a. Dengan melihat data usia sekolah untuk SD (7 tahun – 12 tahun) yang baru mencapai 72,25 % dan masih tersisa 27,75 % yang belum mengenyam bangku pendidikan memberikan gambaran meskipun sudah ada dana BOS belum sepenuhnya memberikan kesadaran kepada orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
 - b. Kurangnya motivasi dari orang tua kepada anak dan lemahnya komunikasi dari pihak sekolah kepada masyarakat dan orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan belum disosialisasikan dengan baik tentang adanya sekolah gratis bagi anak usia SD, menjadikan banyak anak memilih tinggal di rumah dan bekerja membantu orang tua daripada belajar di sekolah.
3. Pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dari segi administrasi dan penatausahaan sudah tercatat dan disusun dengan baik sesuai dengan standar

prosedur karena sudah ada RAPBS/RKS dan dilaporkan kepada dinas secara berkala. Meskipun terlihat adanya perbaikan dari tahun ke tahun yang dapat diukur dengan tingkat kelulusan tiga tahun terakhir yang selalu seratus persen dari sudut pandang kuantitas dan ada perbaikan kualitas dengan merangkak naiknya kualitas kelulusan dalam tiga tahun terakhir, tetapi soal pengelolaan yang mengharuskan adanya keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas belum terlihat karena semua bentuk pengelolaan hanya ditangani kepala sekolah dan belum melibatkan guru, komite dan orang tua siswa. Belum terlihat adanya melibatkan berbagai pihak dalam bentuk musyawarah untuk mencapai kata sepakat (kearifan lokal) hal ini tergambar dari hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua dan komite sekolah yang menyatakan belum dilibatkan oleh pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOS.

4. Dengan adanya program BOS sangat dirasakan secara umum sebagai berikut:
 - a. Ditinjau dari sudut kuantitas memperluas kesempatan belajar dan mempercepat pencapaian program wajib belajar 9 tahun bagi mereka yang berusia 11-15 tahun.
 - b. Ditinjau dari sudut pandang manfaat yang dihasilkan BOS berkontribusi besar sebagai stimulus untuk peningkatan mutu (kualitas) pendidikan dasar bagi manusia Indonesia.

- c. Dipandang dari sudut komitmen, dengan adanya program BOS sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang untuk mengelola pendidikan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tersebut, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan BOS mulai dari tahap perencanaan sampai hasil yang diperoleh harus bersifat transparan dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak terkait seperti orang tua dan masyarakat umum untuk terlibat dalam pengawasan sehingga dapat memberikan masukan, kritik, saran dan laporan terhadap pelaksanaan BOS.
2. Perlu pertimbangan faktor di luar faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi seperti, letak geografis sekolah dan tingkat kesulitan hidup masyarakat dalam mempertimbangkan pelaksanaan BOS.
3. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) hendaknya memuat ketentuan yang jelas mengenai: kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan serta rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada

- peningkatan dan pengembangan mutu. Dalam penyusunan RKS dan RKAS hendaknya memperhatikan beberapa faktor seperti transparansi, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.
4. Kelemahan BOS belum mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan siswa usia pendidikan dasar yang tinggal di lokasi yang sulit dalam berbagai aspek kehidupan karena hanya dihitung berdasarkan jumlah siswa, dengan demikian tentu tidak berkontribusi besar bagi mereka yang tinggal di pedalaman dan perbatasan ataupun kepulauan yang jarak tempuh jauh dan sulit karena letak geografis dan biaya hidup tinggi maka diperlukan regulasi dan kebijakan yang bisa mengakomodir kepentingan mereka dengan membuat regulasi dan kebijakan yang memungkinkan BOS yang diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di pedalaman, perbatasan ataupun kepulauan bisa lebih besar indeksinya agar keberadaan mereka bisa setara dengan siswa yang tinggal di perkotaan.
 5. Perlu adanya pengawasan yang komprehensif dari semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan tentang BOS, agar sekolah merasa tertantang untuk mau meningkatkan mutu dengan menggunakan anggaran tepat guna dan tepat sasaran agar efektif dan efisien.
 6. Perlu adanya sosialisasi yang menjangkau akar rumput tentang pentingnya masyarakat untuk menikmati layanan pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memberikan penjelasan yang luas dan mendalam tentang peran dan fungsi mereka dalam memajukan pendidikan.

7. Perlu adanya sosialisasi yang luas dan mendalam dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan kepada masyarakat tentang BOS dan manfaatnya sampai ke akar rumput, agar Program BOS tidak hanya 'dimonopoli' oleh Kepala Sekolah atau hanya oleh Kepala Sekolah dan Sekolah agar ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah, komite, orang tua dan masyarakat. Dengan demikian program dapat disusun bersama, diawasi dengan baik tanpa ada rasa kecurigaan satu sama lain yang pada akhirnya berkontribusi memajukan dan meningkatkan kualitas sekolah dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP).
8. Sekolah hendaknya mendorong dan memberi ruang gerak kepada orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2005). *UU No 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- , (2008). *Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*
- , (2009). *Permendiknas No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009.*
- Cheema, G.S., & Rondinelli D.A. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills, California: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
- Edward, G. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Eriza, F. (2006). *Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut*. Medan: Pascasarjana USU
- Gustina, I. (2008). *Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun*. Medan: Pascasarjana USU.
- Harahap, J.S. (2004). *Implementasi Proyek jalan dan Jembatan*. Medan: Pascasarjana USU.
- Jones, C.O. (1991). *An Introduction to The Study of Public Policy*. California: Duxbury Press.
- Kemendiknas. (2010). *Buku Panduan BOS*. Jakarta: Dikdasmen.
- Martin, L.L. & Kettner, M.P. (1996). *Measuring The Peformance of Human Service Programs*. London: International Educational and Professional Publisher.

- Meter, V., Donald S. & Horn, C.V.E. (1975). *The Policy Implementation Proceess A Conceptual Framework in Administration and Society, Volume, 6 No. 4.* Beverly Hills: Sage.
- Moleong, L.J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Parsons, W. (2005). *Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan).* Jakarta: Prenada Media.
- Salusu. (1996). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit.* Jakarta: Grasindo.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suyanto. (2009). *Bantuan Operasional Sekolah (EO) Tahun 2009.* Jakarta: Dirjen Dikdasmen
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Solo: UNS Press.
- Tangkllisan H.N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Lukman Offset.
- Wahab, A.S. (2001). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, S. (1989). *Pengantar Penelitian Ilmiah.* Bandung: Tarsito.
- Herry, S. (2006). *Oragnisasi dan Manajemen Pemerintahan.* Universitas Terbuka.
- Kemendiknas (2011) *Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah.*
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi Pendidikan.* Jakarta : Erlangga.
- Ikhsan,M. dkk. (2007). *Administrasi Keuangan Publik.*Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ridwan, A.N. (2007) *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Jurnal Studi Islam dan Budaya.*

Djalil,A. (2009). *Meningkatkan Kinerja Ujian Akhir Nasional : Saran bagi Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Orang Tua Siswa dan Komite Sekolah*. LPKP.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 1
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
SDN 07 LUBUK NIBUNG

SUMBER DANA		PENGGUNAAN			
No	URAIAN	JUMLAH	No	URAIAN	JUMLAH
I	RUTIN 1. Belanja Pegawai 2. Belanja OPS 3. Belanja SBPP 4. Belanja lain-lain	Rp. 104.233.600,00	I	PENGELUARAN OPERASIONAL 1. Belanja Pegawai 2. Belanja OPS 3. Belanja SBPP 4. Belanja lain-lain	Rp. 104.233.600,00
II	BANTUAN 1. BOS 2. BOSDA	Rp. 44.464.000,00 Rp. 8.332.800,00	II	PENGELUARAN BANTUAN 1. BOS 2. BOSDA	Rp. 44.464.000,00 Rp. 8.332.800,00
III	DANA KOMITE 1. Iuran Orang Tua 2. Sumbangan Sukarela 3. Usaha lain-lain		II.1	BOS MELIPUTI : 1. BELANJA PEGAWAI 1.1. Membayar honorarium & fees 1.1.1. Honor GT 1.1.2. Honor guru 1.1.3. Keselamatan dan guru	Rp. 5.400.000,00
IV	PENERIMAAN LAIN-LAIN: 1. Iuran 2. Iuran		2. BELANJA BARANG 2.1. Penerimaan Murid Baru 2.1.1. Fc. Edaran dan formulir 2.1.2. Operasional PMB 2.1.3. Pelaporan 2.1.4. Membahas kelengkapan MB 2.2. Buku Materi Pokok dan perust. 2.2.1. Buku Pelajaran Kelas I s/d VI 2.2.2. Buku Pegangan guru/referensi 2.2.3. Buku koleksi perpustakaan 2.3. Biaya peningkatan Mutu Guru 2.3.1. Dana Kegiatan KKG 2.3.2. Dana Kegiatan K3S 2.3.3. Dana Pelatihan dan Penataran 2.4. THB, Ulangan Harian dan UAS 2.4.1. Pelaksanaan UAS 2.4.2. Biaya THB Semester I dan II 2.4.3. Pelaksanaan Ulangan Harian 2.5. Belanja Habis Pakai 2.5.1. Pembelian kertas 2.5.2. Pembelian buku tulis 2.5.3. Pembelian balpoin 2.5.4. Pembelian mistar 2.5.5. Pembelian spidol 2.5.6. Pembelian kapur tulis 2.5.7. Pembelian pensil 2.5.8. Penghapus papan tulis 2.5.9. Pembelian stapler 2.5.10. Pembelian buku absensi 2.5.11. Pembelian cartridge warna 2.5.12. Pembelian cartridge hitam 2.5.13. Pembelian tinta warna komp. 2.5.14. Pembelian tinta hitam komp. 2.6. Pengadaan alat-alat olah raga 2.6.1. Pengadaan bola kaki 2.6.2. Pengadaan bola volley 2.6.3. Pengadaan net volley 2.6.4. Pengadaan shuttle cock 2.6.5. Pengadaan raket 2.6.6. Pengadaan bola pимpong 2.6.7. Pengadaan bet pимpong 2.6.8. Pengadaan net pимpong 2.6.9. Pengadaan net badminton 2.6.10. Pengadaan bola kasti 2.6.11. Pengadaan peluit	Rp. 60.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 230.000,00 Rp. 466.000,00 Rp. 450.000,00 Rp. 450.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 120.000,00 Rp. 1.200.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 2.080.000,00 Rp. 800.000,00 Rp. 1.350.000,00 Rp. 670.000,00 Rp. 314.000,00 Rp. 930.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 90.000,00 Rp. 108.000,00 Rp. 216.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 720.000,00 Rp. 540.000,00 Rp. 350.000,00 Rp. 756.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 34.000,00 Rp. 45.000,00 Rp. - Rp. -	

			2.6.12. Pengadaan tali peluit	Rp.	-
			BELANJA PEMELIHARAAN		
		3	3.1. Perawatan ringan/rehab ringan		
			3.1.1. Perbaikan meja	Rp.	2.250.000,00
			3.1.2. Perbaikan kursi	Rp.	1.000.000,00
			3.1.3. Perawatan halaman dan parit	Rp.	1.020.000,00
			3.1.4. Perbaikan atap	Rp.	1.200.000,00
			3.1.5. Perbaikan lantai	Rp.	400.000,00
			3.1.6. Perbaikan papan tulis	Rp.	260.000,00
			3.1.7. Perbaikan pintu jendela	Rp.	400.000,00
			BELANJA LAIN-LAIN		
		4	4.1. Membiayai kegiatan kesiswaan		
			4.1.1. Kegiatan remedial	Rp.	4.200.000,00
			4.1.2. Kegiatan pengayaan	Rp.	2.400.000,00
			4.1.3. Ekstrakurikuler pramuka	Rp.	1.200.000,00
			4.1.4. Ekstrakurikuler olah raga	Rp.	1.200.000,00
			4.2. Pengambilan dana BOS ke Stg	Rp.	3.200.000,00
			4.3. Percetakan RAPBS 2009/2010	Rp.	400.000,00
			4.4. Percetakan LPJ BOS	Rp.	800.000,00
			4.5. Konsumsi di sekolah	Rp.	3.600.000,00
			BOS DAERAH (BOSDA)		
		II.2	2.5. Belanja Habis Pakai		
			2.5.1. Pembelian Kertas	Rp.	900.000,00
			2.5.2. Pembelian Buku Tulis	Rp.	658.000,00
			2.5.3. Pembelian Ballpoint	Rp.	450.000,00
			2.5.4. Pembelian Map	Rp.	329.000,00
			2.5.5. Pembelian Spidol	Rp.	140.000,00
			2.5.6. Pembelian Kapur Tulis	Rp.	1.280.000,00
			2.5.7. Pembelian Pensil	Rp.	137.800,00
			2.5.8. Penghapusan papan tulis	Rp.	48.000,00
			2.5.9. Pembelian karbon	Rp.	720.000,00
			2.5.10. Pembelian kertas sampul	Rp.	280.000,00
			2.5.11. Pembelian pita mesin tik	Rp.	315.000,00
			2.5.12. Pembelian tip ex	Rp.	165.000,00
			2.5.13. Pembelian staples	Rp.	60.000,00
			2.5.14. Tinta computer	Rp.	540.000,00
			2.5.15. Pembelian lakban	Rp.	210.000,00
			2.5.16. Pembelian cartrigde warna	Rp.	1.100.000,00
			2.5.17. Pembelian cartrigde hitam	Rp.	1.000.000,00
			JUMLAH	Rp.	157.020.400,00
			JUMLAH	Rp.	157.020.400,00

LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN

A. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana gambaran kelengkapan administrasi yang diajukan sekolah dalam rangka pengajuan permohonan BOS?
2. Bagaimana gambaran pembuatan RKS/RAPBS untuk melengkapi persyaratan permohonan BOS.
3. Bagaimana gambaran pembuatan proposal permohonan untuk kelengkapan pengajuan permohonan BOS.

B. Tahapan Penyaluran

1. Bagaimana gambaran proses penyaluran dana BOS ke sekolah penerima?

C. Tahapan Penggunaan

1. Bagaimana gambaran penggunaan BOS terkait penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan dan panduan yang ada?
2. Bagaimana gambaran penggunaan BOS terkait kesesuaian jumlah besarnya bantuan BOS dengan jumlah siswa?
3. Bagaimana gambaran penggunaan BOS terkait dengan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan BOS?

4. Bagaimana gambaran pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS?

D. Hasil Pelaksanaan BOS

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS terkait pemberi bantuan dan keringanan bagi siswa miskin.
2. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS berpengaruh terhadap berkurangnya siswa putus sekolah?
3. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS terkait dengan pengadaan buku pelajaran?
4. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler?
5. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS terkait dalam pengembangan profesi guru?

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 3

HASIL PELAKSANAAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN

A. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana gambaran kelengkapan administrasi yang diajukan sekolah dalam rangka pengajuan permohonan BOS?

- *“Program BOS merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Program ini merupakan program berskala nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh daerah. Oleh karena itu, persyaratan dan kelengkapan yang harus disiapkan oleh calon sekolah penerima BOS sama untuk setiap daerahnya. Kelengkapan Administrasi awal sangat penting untuk menentukan layak tidaknya sekolah menerima bantuan tersebut. Saya selalu menekankan kepada setiap kepala sekolah untuk memperhatikan masalah kelengkapan administrasi dan saya menginginkan kelengkapan administrasi tersebut dibuat sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan.” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)*
- *“Kelengkapan administrasi merupakan persyaratan sekolah untuk pengajuan dan usulan untuk menerima BOS. Kelengkapan administrasi ini diajukan sebelum program BOS dilaksanakan. Informasi untuk melengkapi administrasi untuk pengajuan BOS akan disampaikan langsung oleh pihak sekolah melalui dinas pendidikan. Pihak sekolah diberi waktu untuk menyelesaikan kelengkapan administrasi tersebut. Kelengkapan administrasi tersebut berisikan mengenai gambaran dan kondisi sekolah, jumlah siswa dan beberapa formulir isian dari tim manajemen BOS” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)*
- *“Bagi sekolah calon penerima BOS yang pertama perlu disiapkan adalah masalah kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi ini merupakan persyaratan yang harus disiapkan oleh pihak sekolah. Kepala sekolah, para guru dan komite dapat bermusyawarah dan bekerjasama untuk melengkapi semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Karena begitu pentingnya kelengkapan administrasi ini maka pihak sekolah harus serius dan benar-benar mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi ini.*

Kelengkapan administrasi ini biasanya terkait dengan format isian yang harus diisi dan dilengkapi oleh pihak sekolah. Biasanya waktu yang direncanakan untuk melengkapi administrasi ini relatif pendek kami selalu mengimbau kepada setiap sekolah untuk melengkapi administrasi tersebut tepat waktu.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

- *“Sebelum sekolah kami menerima dana BOS, kami diinformasikan untuk melengkapi persyaratan yang diajukan oleh tim manajemen BOS pusat. Salah satu persyaratan tersebut adalah terkait dengan kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi ini mencakup mengenai data tentang sekolah kami termasuk di dalamnya jumlah siswa, guru dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Antusias kami sangat tinggi terhadap program BOS ini sehingga kami bersama dewan guru selalu berusaha untuk memberikan data-data yang akurat dan kami saling bekerja sama untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan program BOS ini. Hal ini kami lakukan karena program BOS ini sangat penting untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kami yang berada di pelosok Kalimantan ini.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)*
- *“Dana BOS di sekolah kami terima karena sekolah kami sangat layak untuk menerima bantuan dana tersebut untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah kami. Dana BOS yang kami terima melalui proses yang panjang, pertama kali kami dituntut untuk melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh dinas pendidikan. Kelengkapan administrasi tersebut kami kerjakan atas perintah kepala sekolah. Kami diberi tugas dan tanggungjawab untuk melengkapi administrasi tersebut karena lengkap tidaknya administrasi tersebut sangat berpengaruh terhadap bisa tidaknya sekolah kami menerima dana BOS tersebut. Oleh karena itu, kami selalu bekerja sama untuk menyelesaikan administrasi tersebut. kelengkapan administrasi tersebut berkaitan dengan data mengenai kondisi sekolah kami termasuk jumlah siswa dan guru.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)*

2. Bagaimana gambaran pembuatan RKS/RAPBS untuk melengkapi persyaratan permohonan BOS.

- *“Salah satu pertimbangan pemberian dana BOS ke setiap sekolah adalah adanya rencana penggunaan dana BOS tersebut untuk kepentingan sekolah. Rencana tersebut dapat dibuktikan dengan pembuatan RKS dan RAPBS yang diajukan oleh pihak sekolah. Melalui RKS dan RAPBS tersebut kita dapat melihat dan mengaudit seberapa penting pemberian dana BOS tersebut kepada sekolah tersebut. RAPBS*

tersebut merupakan informasi bagi kami tentang rencana pihak sekolah dalam memanfaatkan penggunaan dana BOS yang akan diterima sehingga kami memiliki gambaran dan dapat menilai layak tidaknya sekolah tersebut memperoleh bantuan. Pentingnya RAPBS tersebut terhadap kelayakan persyaratan penerimaan BOS mengharuskan setiap sekolah merencanakan dan membuat RAPBS dengan sebaik mungkin dan juga logis" (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

- "Penggunaan dana BOS akan dapat maksimal penggunaannya jika dalam penggunaannya sesuai dan mengacu terhadap RKS dan RAPBS yang telah dibuat pihak sekolah yang melibatkan pihak-pihak terkait. RKS dan RAPBS merupakan elemen penting dalam perencanaan dana BOS sehingga dalam perencanaannya harus mempertimbangkan skala prioritas kegiatan yang akan diwadahi. RKS dan RAPBS ini juga sebagai alat audit bagi pihak terkait untuk melihat pelaksanaan dan penggunaan dana BOS tersebut di setiap sekolah. Dalam RKS dan RAPBS akan menggambarkan secara detail alokasi dana untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut selama satu tahun anggaran." (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)
- "Langkah awal yang harus dilakukan sekolah penerima bantuan BOS adalah membuat perencanaan dan pengalokasian rencana penggunaan dana BOS. Perencanaan dan pengalokasian tersebut akan tertuang di dalam RKS dan RAPBS sekolah yang akan diajukan ke dinas sebagai tim penilai. Penilaian terhadap RKS dan RAPBS tersebut menentukan layak tidaknya sekolah tersebut menerima bantuan BOS tersebut. Jika tidak layak kami memerintahkan pihak sekolah untuk memperbaiki dan menyempurnakan RKS dan RAPBS tersebut. Kami berharap dengan adanya RKS dan RAPBS tersebut bantuan BOS yang diberikan pemerintah terhadap sekolah-sekolah tersalurkan sesuai dengan yang diinginkan dan dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana BOS tersebut oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, kami berharap pembuatan RKS dan RAPBS tersebut melibatkan pihak-pihak yang ada di sekolah seperti para dewan guru dan juga komite sekolah sehingga akan lebih bersifat terbuka." (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)
- "Pembuatan RKS dan RAPBS yang kami lakukan selalu menyesuaikan dengan kondisi sekolah kami dan selalu melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah ini seperti guru dan komite sekolah. Dalam RKS dan RAPBS yang kami buat menggambarkan rencana penggunaan dana yang kami peroleh baik dari dana BOS maupun dana lainnya. Dalam kaitannya dengan penggunaan dana BOS kami mengalokasikan dan merencanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengalokasian dan penggunaan dana BOS kami selalu

arahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan dan mendukung kualitas pendidikan di sekolah kami. Dana BOS yang kami terima harus habis terpakai sehingga dalam merencanakan kami harus mempertimbangkan kegiatan yang harus dan penting untuk dilaksanakan dan kami juga harus membuat skala prioritas mengingat kegiatan yang harus diakomodasi relatif banyak” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

- “Dalam setiap penyusunan RKS dan RAPBS yang dilakukan pihak sekolah kami selalu dilibatkan dan pendapat dan usulan kami selalu dipertimbangkan. RKS dan RAPBS yang dibuat pihak sekolah sebagai dasar bagi kami untuk melakukan perencanaan dan penggunaan dan yang diperoleh oleh pihak sekolah termasuk dana BOS. Dana BOS yang masuk ke pihak sekolah kami buat dan masukan dalam RKS dan RAPBS sehingga penggunaan dana BOS tersebut dapat terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberi bantuan tersebut. Dalam perencanaan dan pembuatan RAPBS untuk bantuan dana BOS kami selalu mengacu sesuai dengan pedoman yang telah dibuat dengan membuat prioritas kegiatan dan keadaan dan kondisi sekolah kami sehingga dana BOS tersebut dapat dengan optimal terealisasi” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)
- “Sebagai pihak yang seharusnya selalu berhubungan dengan pihak sekolah, kami tidak mendapatkan informasi tentang perencanaan setiap kegiatan yang tertuang di RAPBS sekolah. Kami tidak dilibatkan dalam perencanaan RAPBS tersebut meskipun merupakan wadah bagi kami untuk menyampaikan aspirasi orang tua murid dalam setiap kegiatan yang dilakukan pihak sekolah. Padahal perencanaan RAPBS sangat penting dan harus melibatkan komite agar dapat meningkatkan kualitas sekolah. Meskipun kami tidak terlibat kami cukup memahami bahwa Dana BOS sangat bermanfaat salah satunya untuk menyediakan buku bagi siswa, untuk perbaikan fasilitas sekolah yang tidak layak dan juga untuk membiayai kegiatan siswa di sekolah.” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

3. Bagaimana gambaran pembuatan proposal permohonan untuk kelengkapan pengajuan permohonan BOS.

- “Sebagai bukti keseriusan sekolah untuk memperoleh bantuan BOS, setiap sekolah dipersilahkan untuk mengajukan proposal permohonan dana BOS. Proposal tersebut berisikan mengenai gambaran dan kondisi sekolah serta rencana penggunaan dana BOS tersebut jika dana tersebut diperoleh. Proposal yang diajukan oleh pihak sekolah calon penerima BOS dilengkapi dengan administrasi pendukung seperti

kondisi dan keadaan sekolah, jumlah murid dan guru serta RAPBS sekolah masing-masing. Proposal tersebut diajukan kepada tim manajemen kabupaten untuk dinilai dan selanjutnya ditindaklanjuti untuk segera diproses. Sebagai syarat permohonan dana BOS, proposal sangat penting sehingga harus dibuat dengan sebaik-baiknya untuk kemudahan dan kelancaran permohonan dana BOS" (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

- "Proposal pengajuan dan permohonan dana bantuan BOS merupakan persyaratan awal yang diperlukan setiap sekolah untuk mendapat bantuan BOS tersebut. Proposal tersebut menggambarkan keinginan sekolah untuk memperoleh BOS serta rencana penggunaan dana BOS tersebut. Proposal yang diajukan harus mendapat persetujuan oleh pihak-pihak terkait disekolah seperti dewan guru dan komite sekolah. Pengajuan proposal tersebut langsung diajukan kepada tim manajemen BOS yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Selanjutnya proposal tersebut dipelajari dan di nilai layak tidaknya sekolah tersebut menerima bantuan BOS. Jika sekolah tersebut layak maka proposal tersebut akan diajukan ke tim manajemen BOS provinsi" (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)
- "Proposal permohonan dana BOS yang diajukan pihak sekolah merupakan permohonan dari pihak sekolah untuk menerima, merencanakan, mengelola dan menggunakan dana bantuan BOS untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran pemberian bantuan BOS tersebut. Setiap proposal yang diajukan oleh masing-masing sekolah dilengkapi dengan data-data dan dokumen-dokumen yang akurat termasuk keadaan jumlah siswa miskin dan rencana penggunaan dana bantuan BOS yang terlampir di RAPBS setiap sekolah. Proposal yang diajukan setiap sekolah akan segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang untuk diambil keputusan." (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)
- "Setelah ada informasi pemberian dana BOS kami sangat tertarik untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan BOS tersebut karena kami sangat membutuhkan dana tersebut untuk perbaikan dan peningkatan pendidikan di sekolah kami. Permohonan pengajuan dana BOS kami sampaikan melalui proposal yang kami buat bersama dewan guru dan juga pihak komite sekolah. Proposal tersebut merupakan gambaran kondisi sekolah kami saat ini dan dilengkapi oleh data-data pendukung seperti data tentang siswa miskin dan juga fasilitas di sekolah kami. Melalui proposal tersebut kami berharap dapat memperoleh bantuan dana tersebut. Proposal tersebut kami ajukan ke tim manajemen BOS di dinas pendidikan untuk diteliti lebih lanjut.

Setelah disetujui kami tinggal mempersiapkan kelengkapan data-data lainnya.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

- “Untuk mendapatkan bantuan BOS pihak sekolah diperintahkan untuk membuat pengajuan proposal permohonan. Untuk merespon hal tersebut pihak sekolah dengan segera mengadakan rapat untuk membahas proposal permohonan bantuan. Proposal tersebut berisikan gambaran kondisi sekolah dan rencana pengelolaan dan penggunaan dana BOS. Pembuatan proposal tersebut juga melibatkan pihak lain yaitu dari orang tua murid yang diwakili oleh komite sekolah. Proposal tersebut segera diajukan kepada tim penilai yang ada di dinas pendidikan kabupaten Sintang” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)
- “Persyaratan dalam memperoleh bantuan BOS adalah dengan pengajuan permohonan berupa proposal permohonan kepada pemerintah. Di SDN 07 Lubuk Nibung ini kami sebagai komite sekolah tidak dilibatkan dalam pembuatan dan pengajuan proposal. Kami tidak diundang rapat, kami juga tidak diminta pendapat dan persetujuan terhadap proposal yang akan diajukan. Tapi kami menyambut baik adanya proposal permohonan tersebut karena sebagai bukti keseriusan pihak sekolah untuk memperoleh dan mengelola bantuan BOS yang diterima nanti sehingga kami berharap kualitas pendidikan di SDN 07 Lubuk Nibung semakin meningkat walaupun berada di daerah terpencil” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

B. Tahapan Penyaluran

1. Bagaimana gambaran proses penyaluran dana BOS ke sekolah penerima?

- “Penyaluran dana BOS dilakukan beberapa periode melalui rekening atas nama sekolah bukan atas nama pribadi atau kepala sekolah. Prosedur yang harus dilakukan pihak sekolah adalah dengan mengirim nomor rekening sekolah kepada tim manajemen BOS kabupaten kemudian dilakukan verifikasi dan kompilasi dan selanjutnya dikirim kepada tim manajemen BOS provinsi. Tim manajemen provinsi kemudian mengajukan surat permohonan pembayaran langsung. Setelah dana BOS cair, dana tersebut selanjutnya disalurkan bank pemerintah atau kantor pos yang ditunjuk langsung ke rekening sekolah penerima dan tim manajemen BOS kabupaten akan mengecek kesesuaian dana yang disalurkan. Jika terdapat kelebihan maka dana tersebut harus dikembalikan” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)
- “Penyaluran dana BOS harus dilakukan secara transparan sehingga penyaluran dilakukan melalui rekening atas nama sekolah bukan atas

nama pribadi seperti kepala sekolah atau bendahara. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan terhadap dana BOS. Penyaluran dana BOS dilakukan secara langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah tanpa melalui perantara sehingga akan terjamin transparansinya. Pihak dinas dan tim manajemen kabupaten hanya sebagai pengawas yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian dana BOS yang diterima oleh sekolah penerima” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

- “Penyaluran dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah dilakukan secara langsung ke rekening atas nama sekolah. Penyaluran tidak melalui perantara maupun pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dana BOS dan yang terpenting untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana BOS tersebut. Oleh karena itu, penyaluran dana BOS juga harus mendapat pengawasan dari berbagai pihak seperti tim manajemen BOS kabupaten dan provinsi serta dari dinas pendidikan.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)
- “Dana bantuan BOS yang kami terima merupakan dana yang kami terima langsung dari rekening atas nama sekolah. Pada awalnya kami belum memiliki rekening sekolah kami dipersilahkan untuk membuat rekening atas nama sekolah. Setelah kami mempunyai rekening atas nama sekolah, rekening tersebut kami beritahukan ke tim manajemen BOS kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke pusat. Setelah dana BOS tersebut masuk kami bersama tim manajemen BOS kabupaten mengecek kesesuaian nominalnya sesuai dengan data yang kami ajukan. Jika terdapat kelebihan kami diharapkan segera mengembalikannya.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)
- “Dana BOS yang sekolah kami terima langsung dari pemerintah tanpa ada perantara. Dana tersebut masuk ke rekening sekolah bukan rekening kepala sekolah atau bendahara sekolah. Setelah dana tersebut masuk kami diinformasikan oleh kepala sekolah untuk melihat dan tidak ada unsur tertutupan dalam publikasi dana BOS semuanya bersifat transparan dan terbuka sehingga semua orang dapat mengetahui jumlah dana BOS yang diterima beserta perincian alokasi penggunaannya” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)
- “Penyaluran dana BOS dilakukan melalui rekening atas nama sekolah. Dana yang diperoleh tersebut sangat disayangkan karena tidak dipublikasikan dan diumumkan oleh pihak sekolah supaya masyarakat dapat melihat dan mencocokkan sesuai dengan alokasi penggunaan. Dengan belum adanya keterbukaan tersebut menyulitkan kami dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS yang diterima sekolah. Publikasi tersebut walaupun ada juga tidak dilengkapi dengan rencana pengalokasiannya secara detail dan jelas

sehingga sulit untuk dicermati. Penyaluran dana BOS dilakukan tanpa melalui perantara dan langsung ke rekening sekolah” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

C. Tahapan Penggunaan

1. Bagaimana gambaran penggunaan BOS terkait penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan dan panduan yang ada?

- *“Penggunaan dana BOS untuk setiap sekolah penerima bantuan telah diatur. Kegiatan yang diperbolehkan untuk dibiayai oleh dana BOS adalah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan seperti pembiayaan dalam rangka penerimaan murid baru, pembelian buku pelajaran, pembiayaan kegiatan ulangan, pembiayaan perawatan sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan tidak diperkenankan untuk menggunakan dana bantuan BOS. Jika hal ini dilanggar pihak sekolah kami akan bertindak tegas. Kami selalu mengawasi setiap penggunaan dana BOS yang dilakukan sekolah penerima bantuan hal ini kami lakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana BOS” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)*
- *“Setiap penggunaan dana BOS yang diterima oleh masing-masing sekolah penerima bantuan, ketentuan penggunaannya telah diatur. kegiatan apa saja yang boleh dibiayai dana BOS dan kegiatan apa yang dilarang. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh dana BOS adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kependidikan lainnya. sedangkan kegiatan yang cenderung bersifat untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu tidak diperkenankan untuk menggunakan dana BOS tersebut. Untuk kelancaran penggunaan dana BOS tersebut diharapkan setiap sekolah membuat laporan perencanaan anggaran dan laporan penggunaan anggaran BOS supaya dapat kita monitoring dan awasi sehingga setiap penggunaan dana BOS akan dapat sesuai dengan ketentuan yang ada pada panduan penggunaan dana BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)*
- *“Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan panduan yang telah tertuang dalam buku panduan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan RAPBS yang diajukan sekolah. RAPBS yang diajukan juga harus sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Setiap sekolah harus membuat laporan kegiatan penggunaan dana BOS. Laporan ini sebagai bukti tertulis dari pihak sekolah telah*

melaksanakan kegiatan yang didanai oleh BOS. ” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

- “Penggunaan dana BOS di sekolah kami disesuaikan dengan panduan yang tertulis di buku panduan pelaksanaan BOS. Kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS kami cantumkan di RAPBS yang kami ajukan ke tim manajemen BOS kabupaten. Kegiatan yang dibiayai oleh BOS antara lain membayar honor guru, kegiatan penerimaan murid baru, pembelian buku pokok, peningkatan mutu guru, THB, ulangan harian, UAS, belanja habis pakai, pengadaan alat-alat olahraga, perawatan renovasi ringan, dan pembiayaan kegiatan siswa. Laporan terhadap setiap kegiatan tersebut kami laporkan kepada tim manajemen BOS kabupaten untuk dinilai” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)
- “Penggunaan dana BOS di sekolah kami disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada di buku panduan BOS yang dikeluarkan pemerintah. Kegiatan yang didanai oleh BOS adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan yang berkaitan dengan kependidikan seperti kegiatan kesiswaan, renovasi ringan sekolah, peningkatan mutu guru melalui KKG, K3S, pelatihan dan penataran serta pembelian buku pelajaran.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)
- “Setahu kami penggunaan dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung telah tertera di RAPBS sekolah yang telah diajukan ketika pengajuan permohonan dana BOS dikucurkan. Penggunaan dana BOS sejauh ini masih sesuai dengan yang tercantum dalam panduan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan yang dibiayai merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Sebagai pihak yang mewakili orang tua murid di sekolah meskipun kami tidak selalu diberi informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah, kami berpikir yang positif bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan yang direncanakan .” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

2. Bagaimana gambaran penggunaan BOS terkait kesesuaian jumlah besarnya bantuan BOS dengan jumlah siswa?

- “Pemberian dana BOS terhadap sekolah penerima bantuan telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk SD negeri di kota Rp. 400.000,00 sedangkan untuk SD negeri di kabupaten Rp. 397.000,00. Untuk SD negeri di daerah Ketungau termasuk SD negeri kabupaten sehingga dana yang diterima Rp. 397.000,00 siswa/sekolah. Jika dana BOS yang diterima sekolah lebih besar dari yang seharusnya,

misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke rekening tim manajemen BOS provinsi dan memberitahukan pengembalian tersebut dengan mengirim salinan bukti transfer ke tim manajemen BOS provinsi.” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

- *“Jumlah dana BOS yang diterima sekolah penerima bantuan dihitung berdasarkan jumlah siswa di sekolah yang bersangkutan. Untuk sekolah di kota jumlah bantuan lebih banyak dibanding dengan jumlah yang diterima sekolah di kabupaten. Untuk sekolah negeri baik SD maupun SMP negeri di kabupaten Sintang memperoleh dana sebesar Rp. 397.000,00 untuk SD dan Rp. 570.000,00 untuk SMP. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan kondisi dan jumlah siswa terakhir di sekolah tersebut. Jika terdapat siswa yang mutasi maka akan diperhitungkan ulang lagi.” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)*
- *“Dana BOS yang akan diterima sekolah telah ditetapkan pemerintah yaitu Rp. 397.000,00 untuk SD negeri dan Rp. 570.000,00 untuk SMP negeri. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sebagai komitmen dari pemerintah yang sangat konsen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)*
- *“Jumlah bantuan BOS yang kami terima dari pemerintah berjumlah Rp. 397.000,00 siswa tahun. Dengan jumlah siswa di SD N 07 Lubuk Nibung yang berjumlah 112 orang maka total sekolah kami menerima dana BOS sebesar Rp. 44.464.000,00 untuk tahun anggaran 2009/2010. Dana tersebut masuk ke rekening sekolah secara bertahap yaitu sebanyak empat periode. Setiap periodenya sekolah kami menerima dana bantuan kurang lebih sebanyak 11 jutaan” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)*
- *“Dana yang kami peroleh dari bantuan BOS adalah dana yang dihitung berdasarkan kondisi dan jumlah terakhir siswa di sekolah kami. Untuk tahun 2009/2010 sekolah kami menerima kurang lebih 44 juta. jumlah tersebut diperoleh sekolah selama 4 tahap. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran kami perlu mempertimbangkan besarnya dana yang akan diturunkan pemerintah dalam satu periode sehingga dapat memperkirakan kegiatan apa saja yang dilaksanakan setiap periodenya.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)*
- *“Jumlah dana BOS yang diterima SDN 07 Lubuk Nibung tahun anggaran 2009/2010 kami tidak tahu persis. Jumlah tersebut menurut informasi merupakan hasil perkalian jumlah siswa dengan standar bantuan yang diterima siswa pertahun. Untuk SDN 07 Lubuk Nibung*

satu orang siswa memperoleh bantuan sebesar 397 ribu per siswa selama setahun.” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

3. Bagaimana gambaran penggunaan BOS terkait dengan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan BOS?

- *“Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS oleh sekolah penerima bantuan dilakukan setiap akhir pelaksanaan BOS. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen administrasi. Seperti laporan penggunaan dana maka setiap sekolah harus melampirkan data mengenai jenis kegiatan secara detail dan jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain laporan dari pihak sekolah penerima bantuan, laporan juga diperoleh dari tim manajemen BOS baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Laporan yang sering dilaporkan adalah mengenai pengaduan terhadap pelaksanaan BOS yaitu terkait dengan penyelewengan dana BOS. Berdasarkan laporan yang kami terima jumlah penyelewengan dana BOS banyak dilakukan oleh kepala sekolah.” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)*
- *“Setiap pelaporan yang disampaikan sekolah penerima BOS harus selalu melampirkan bukti penggunaan dana BOS. Bukti tersebut dapat berupa kuitansi maupun laporan keuangan. Dengan adanya bukti administrasi tersebut dapat membantu tim manajemen BOS untuk melakukan penilaian dan audit terhadap kelayakan pelaksanaan BOS di sekolah penerima bantuan BOS” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)*
- *“Setiap akhir pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dari dana BOS, pihak sekolah diharuskan membuat laporan yang dilengkapi dokumen administrasi. Laporan bertanggungjawab disampaikan pihak penerima BOS sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana BOS.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)*
- *“Laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung kami buat pada akhir pelaksanaan program BOS di sekolah kami. Laporan tersebut kami lengkapi dengan data-data pendukung seperti data nama-nama siswa miskin, laporan jumlah dana yang dikelola, laporan terhadap pencatatan terhadap kritik dan saran serta laporan pembelian buku. Laporan pertanggungjawaban tersebut kami sampaikan ke tim manajemen BOS kabupaten untuk kemudian di limpahkan ke pihak lebih tinggi untuk di adakan audit mengenai*

kesesuaian pelaksanaan BOS” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

- *“Setahu kami setiap laporan pertanggungjawaban terhadap setiap kegiatan yang mempergunakan dana BOS selalu dibuat selengkap mungkin dengan didukung dengan data-data dan dokumen administrasi yang mendukung. Kelengkapan data dan dokumen tersebut membantu memberikan kemudahan tim penilai menilai kesesuaian pelaksanaan BOS di sekolah kami.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)*
- *“Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung disampaikan ke tim manajemen BOS di kabupaten. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilengkapi dengan dokumen administrasi pendukung.” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)*

4. Bagaimana gambaran pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS?

- *“Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS di setiap sekolah melibatkan berbagai pihak seperti dinas pendidikan, BPKP, BPK dan juga masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa pentingnya pelaksanaan BOS tersebut untuk kemajuan dunia pendidikan. Pemerintah berusaha menjamin pelaksanaan program BOS bebas dari penyelewengan oleh karena itu pengawasan dan pemeriksaan melibatkan pihak terkait dan kompeten. Keterlibatan masyarakat dilakukan karena masyarakat merupakan pihak yang langsung berhubungan dengan pihak sekolah sehingga dapat selalu mengawasi pelaksanaan BOS di setiap sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)*
- *“Pelaksanaan program BOS di sekolah langsung diawasi oleh dinas pendidikan dan juga masyarakat. Jika terdapat kecurigaan terhadap penyimpangan pelaksanaan BOS, masyarakat dapat menyampaikan acuannya kepada tim manajemen BOS atau langsung ke dinas pendidikan. Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam pengawasan terhadap pelaksanaan BOS di sekolah penerima bantuan” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)*
- *“Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten yang melibatkan dinas pendidikan dan masyarakat umum sebagai pengawas dan BPKP dan BPK sebagai pihak yang akan memeriksa dan mengaudit pelaksanaan BOS di setiap sekolah penerima ” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)*

- *“Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan juga masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan lebih terkait dengan masalah administrasi. Sedangkan yang dilakukan oleh masyarakat lebih kearah pelaksanaan dilapangan seperti pembiayaan kegiatan siswa, pembelian buku pelajaran dan lainnya yang berkenaan dengan masyarakat yang sebagian merupakan orang tua siswa yang sekolah di SD ini.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)*
- *“*Pengawasan pelaksanaan BOS di sekolah kami melibatkan berbagai pihak salah satunya adalah masyarakat umum. Keterlibatan masyarakat ini karena kedekatan masyarakat terhadap sekolah yang berada di lingkungannya. Karena setiap informasi mengenai sekolah maka masyarakat dapat langsung mengetahuinya.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)*
- *“Kami sebagai komite dan juga masyarakat umum juga berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan BOS di SDN Lubuk Nibung ini selain dari pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan BPK. Pengawasan yang kami lakukan untuk melihat terjadi atau tidaknya penyimpangan penggunaan dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung. Jika terjadi penyimpangan kami akan melaporkan ke tim manajemen BOS atau pihak yang terkait” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)*
- *“Sebagai masyarakat umum kami tidak selalu berdekatan dengan lingkungan sekolah meskipun di sekolah tersebut anak kami sekolah. Setiap ada kegiatan seperti bantuan BOS kami juga tidak berusaha mencari tahu mengenai kegiatan tersebut dan apa manfaatnya bagi siswa dan sekolah, dan jika ada dana yang dipergunakan kami juga tidak berusaha untuk mencari tahu dari mana sumber dana dan bagaimana penggunaannya yang penting bagi kami anak bisa belajar secara rutin setiap hari” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)*

D. Hasil Pelaksanaan BOS

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS terkait pemberi bantuan dan keringanan bagi siswa miskin?

- *“Pelaksanaan program BOS yang dilakukan oleh pemerintah secara tegas bertujuan untuk memberikan kesempatan semua anak usia sekolah dapat melanjutkan sekolah sampai jenjang setinggi-tingginya. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dari keluarga yang tergolong tidak mampu untuk melanjutkan sekolah karena ada program*

sekolah gratis. Kesempatan untuk melanjutkan sekolah bagi siswa miskin dapat membantu mengurangi jumlah anak putus sekolah dan mensukseskan program wajib belajar sembilan tahun” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

- *“Kesempatan bersekolah bagi siswa miskin dapat dirasakan setelah pemerintah mengeluarkan program BOS yang menggratiskan biaya sekolah untuk siswa SD dan SMP. Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh siswa miskin. Dengan adanya kesempatan tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)*
- *“Adanya program BOS sangat membantu masyarakat yang termasuk dalam golongan kurang mampu karena dengan adanya program BOS ini mengurangi beban mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang SMP. Hal ini dapat terjadi karena biaya sekolah yang digratiskan dan juga siswa mendapat bantuan buku pelajaran dan juga memungkinkan mendapatkan biaya transportasi untuk siswa yang tinggal jauh dari sekolah” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)*
- *“Jumlah bantuan untuk siswa miskin dalam program BOS tidak secara jelas kami cantumkan dalam anggaran yang tertuang dalam RAPBS. Tetapi untuk kegiatan semisal siswa tanpa terkecuali yang miskin akan mendapatkan bantuan BOS tersebut seperti untuk membiayai penerimaan siswa baru, pembelian buku pelajaran, penyelenggaraan ujian dan lain-lainnya. Dengan adanya kegiatan tersebut kami berharap siswa miskin di daerah Lubuk Nibung dapat merasakan bangku sekolah lagi pula sekolah sekarang sudah gratis.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)*
- *“Program BOS bertujuan untuk memberi bantuan dan keringanan kepada siswa yang tidak mampu untuk dapat terus bersekolah karena bantuan BOS membebaskan biaya untuk sekolah dan juga membantu sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah penerima bantuan dengan mendanai kegiatan-kegiatan yang menunjang pembelajaran di sekolah.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)*
- *“Sebagai perwakilan masyarakat di sekolah kami merasa bantuan BOS yang diterima alokasi penganggaran lebih mengarah untuk perbaikan dan pengadaan secara fisik seperti pengadaan ATK dan renovasi ringan terhadap bangunan sekolah. Sedangkan untuk bantuan secara langsung untuk siswa yang tidak mampu seperti bantuan transportasi dan seragam sekolah tidak dianggarkan. Sehingga siswa yang miskin hanya merasakan bantuan BOS hanya dari pembebasan biaya sekolah. Pembebasan biaya sekolah tidak hanya dirasakan oleh siswa miskin*

saja tetapi seluruh siswa yang bersekolah di SDN 07 Lubuk Nibung” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

- *“Dana BOS yang diterima sekolah hanya kami rasakan dengan pembebasan biaya sekolah di SDN 07 Lubuk Nibung. Untuk bantuan yang lainnya kami tidak merasakannya secara langsung.” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)*
- *“Sejak adanya BOS kami sangat senang karena teman-teman yang kurang mampu sekarang dapat bersekolah lagi, selain itu kami merasakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar semakin bertambah dengan adanya penambahan buku pelajaran dan perpustakaan.” (Siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)*

2. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS berpengaruh terhadap berkurangnya siswa putus sekolah?

- *“Pelaksanaan program BOS secara tidak langsung akan menurunkan anak putus sekolah. Hal ini dapat terjadi karena biaya untuk sekolah gratis sehingga anak yang putus sekolah dipastikan memiliki permasalahan di luar permasalahan biaya. Diharapkan tidak adalagi anak usia sekolah tidak berada disekolah pada saat jam sekolah.” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)*
- *“Program BOS yang dilaksanakan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah. Program BOS akan menggratiskan biaya sekolah sehingga semua orang dapat melanjutkan sekolahnya” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)*
- *“Dampak dari program BOS adalah mengurangi jumlah siswa putus sekolah melalui pembebasan biaya untuk bersekolah. sehingga diharapkan setiap orang dapat bersekolah” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)*
- *“Pelaksanaan BOS berdampak pula terhadap berkurangnya siswa yang putus sekolah. Berdasarkan data yang ada disekolah semakin tahun siswa yang putus sekolah semakin berkurang untuk tahun ini saja tidak terdapat siswa yang putus sekolah.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)*
- *“Sejak dilaksanakannya program BOS, jumlah siswa yang putus sekolah jauh berkurang jika dibanding sebelum ada program BOS hal ini disebabkan adanya sekolah gratis bagi para siswa.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)*
- *“Dampak pelaksanaan program BOS yang kami rasakan adalah berkurangnya siswa putus sekolah karena sejak adanya program BOS*

biaya sekolah menjadi gratis. Semua biaya terkait dengan kegiatan pembelajaran sudah dianggarkan melalui bantuan BOS tersebut” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

- *“Program BOS yang ada di SDN 07 Lubuk Nibung sangat membantu kami terutama siswa yang miskin untuk dapat terus melanjutkan sekolah karena semua biaya sekolah sudah gratis dan tidak ada pungutan lainnya yang dapat memberatkan kami sebagai warga yang kurang mampu.” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)*
- *“Sejak adanya bantuan BOS kami dan teman-teman kami dapat selalu belajar bersama tidak ada teman kami yang berhenti sekolah karena alasan biaya. karena semua biaya untuk pendidikan di sekolah ini sudah ditanggung BOS.” (Siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)*

3. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS terkait dengan pengadaan buku pelajaran?

- *“Salah satu program BOS adalah pengadaan buku teks pelajaran. Buku teks tersebut merupakan buku teks wajib yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan menjadi inventaris sekolah dan harus dipinjamkan kepada siswa sebagai buku pengangan” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)*
- *“Pengadaan buku teks pelajaran mempergunakan dana BOS. Buku pelajaran tersebut nantinya menjadi buku wajib disekolah dan setiap siswa mempunyai hak untuk mempergunakan buku tersebut” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)*
- *“Pengadaan buku pelajaran merupakan salah satu sasaran dari program BOS dan setiap sekolah penerima bantuan BOS harus menanggarkan pembelian buku pelajaran dalam RAPBS yang dibuat” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)*
- *“Dalam Membuat RAPBS kami mencantumkan poin untuk pengadaan buku teks pelajaran. Buku tersebut menjadi buku teks wajib seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Buku tersebut nantinya dapat dipinjamkan kepada siswa” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)*
- *“Setiap pelajaran yang kami ajarkan selalu menggunakan buku dari pengadaan dari program BOS. untuk kesamaan semua maka buku tersebut menjadi acuan dalam kegiatan belajar mengajar dan setiap siswa wajib dipinjami buku tersebut” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)*

- *“Pengadaan buku pelajaran oleh pihak sekolah kami sambut dengan antusias dan kami selalu berharap buku tersebut dapat bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan di SDN 07 Lubuk Nibung” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)*
- *“Kami melihat anak-anak kami selalu mepergunakan buku teks yang dibagikan oleh pihak sekolah. Hal ini dapat meringankan kami karena kami tidak perlu membelikan buku teks pelajaran untuk anak kami” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)*
- *“Buku teks pelajaran yang dipergunakan disekolah kami merupakan buku teks pembagian oleh pihak sekolah. Setiap pelajaran kami selalu memperoleh buku teks pelajaran sesuai mata pelajarannya” (Siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)*

4. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler?

- *“Dana BOS dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan membiayai kegiatan atau program yang berkaitan dengan peningkatan mutu tersebut. Selain kegiatan belajar mengajar dana BOS juga dapat difungsikan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)*
- *“Fungsi BOS di sekolah adalah untuk memdanai segala macam kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kualitas pendidikan seperti kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Setiap kegiatan yang didanai oleh dana BOS dibuat laporan pertanggungjawaban termasuk kegiatan ekstrakurikuler.” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)*
- *“Setiap sekolah yang mendapatkan dana BOS diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana tersebut sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan siswa baik secara akademik maupun non akademik. Salah satu kegiatan yang dapat dibiayai oleh BOS adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)*
- *“Kegiatan ekstrakurikuler yang dibiayai oleh program BOS di sekolah kami antara lain kegiatan pramuka dan olah raga. Kedua kegiatan tersebut kami pilih untuk didanai oleh BOS karena kedua kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan bidang tersebut. Kegiatan tersebut sebelum ada program BOS sudah ada tetapi tidak intens pelaksanaannya karena terkendala masalah biaya*

untuk membeli perlengkapan dan membayar honor pelatih atau pembina” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

- “Sejak adanya bantuan BOS kegiatan ekstrakurikuler di SDN 07 Lubuk Nibung dapat berjalan lagi sesuai dengan rencana. Kegiatan tersebut berupa kegiatan pramuka dan kegiatan olahraga. Untuk kegiatan olahraga dapat terlaksana lagi karena perlengkapan olahraga seperti bola voly, bola kaki, net dan lain-lainnya sudah terbeli menggunakan dana BOS” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)
- “Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari pihak sekolah dana BOS juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan siswa seperti pramuka dan ekstrakurikuler olahraga.” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)
- “Setahu kami kegiatan ekstrakurikuler di SDN 07 Lubuk Nibung hanya kegiatan pramuka. Sedangkan yang lainnya kami tidak pernah melihatnya seperti kegiatan olahraga. Setahu kami kegiatan olahraga di SDN 07 Lubuk Nibung sama waktunya dengan mata pelajaran penjaskes” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)
- “Kegiatan Ekstrakurikuler yang kami ikuti adalah kegiatan pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga jarang kami lakukan biasanya gabung dengan mata pelajaran penjaskes dan kegiatan senam pagi setiap jumat” (Siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)

5. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS terkait dalam pengembangan profesi guru?

- “Program BOS dapat juga dimanfaatkan oleh sekolah untuk peningkatan kualitas guru melalui pembiayaan kegiatan perkumpulan, pelatihan dan penataran. Harapan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kompetensi guru sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)
- “Pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan pertemuan atau kelompok belajar, pelatihan dan pendidikan. Semua biaya tersebut dapat mempergunakan dana BOS.” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)
- “BOS yang diterima sekolah dapat dianggarkan untuk pengembangan profesi guru melalui kegiatan penataran dan pelatihan yang diikuti guru yang bersangkutan.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)
- “Adanya program BOS membantu kami dalam usaha mengembangkan profesi guru di SDN 07 Lubuk Nibung karena untuk semua kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu guru dibiayai oleh dana BOS. Seperti

KKG atau KKS, penataran, pelatihan dan pendidikan.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

- *“Dengan adanya program BOS kami berharap dapat melaksanakan KKG dan dapat mengikuti penataran, pelatihan dan pendidikan karena ada dana alokasi yang direncanakan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan semuanya bersumber dari dana BOS tapi sampai saat ini belum terealisasi” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)*
- *“Penggunaan dana BOS untuk pengembangan mutu guru di SDN 07 Lubuk Nibung kami rasakan belum efisien hal ini terlihat dari jarangya keterlibatan guru dalam setiap penataran disebabkan karena jauhnya lokasi ke pusat kota dan juga terbatasnya tenaga guru sehingga agak susah untuk meninggalkan sekolah untuk mengikuti kegiatan penataran yang biasanya diadakan di kota. Apalagi informasi yang diterima sering terlambat” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)*

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 4
LEMBAR KERJA INDIVIDU SEKOLAH
Data Sekolah Tahun Ajaran 2009/2010

1. Nama Sekolah : SDN Nomor 07 Lubuk Nibung
 2. NSS : 101130402011
 3. Status Sekolah : Negeri
 4. Alamat Sekolah : Lubuk Nibung
 5. Kecamatan : Ketungau Tengah
 6. Kabupaten : Sintang
 7. Provinsi : Kalimantan Barat

MURID	JUMLAH MURID PER KELAS									J M L
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laki-laki	15	13	10	10	4	3				55
Perempuan	15	9	6	14	8	5				57
Total	30	22	16	24	12	8				112

8. Apakah melaksanakan KTSP (Ya / Tidak)
 9. Apakah memiliki ruang perpustakaan (Ya / Tidak)
 10. Apakah memiliki sarana computer untuk pembelajaran murid
 (Ya / Tidak)
 11. Kondisi Ruangan Kelas

Kondisi Ruangan Kelas			Total ruangan kelas
Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	

LAMPIRAN 5

DAFTAR NILAI RATA-RATA UASBN DALAM KURUN WAKTU 2008/2009-2010/2011
SDN NO.07 LUBUK NIBUNG

KECAMATAN KETUNGAU TENGAH

NO	JUMLAH SISWA		TAHUN AJARAN	NILAI	MATA PELAJARAN										JUMLAH	KELULUSAN	PENINGKATAN
	L	P			Agrib	Pkn	BI	MAT	IPA	IPS	SBK	PENJAS	MULOK				
1	4	6	2008/2009	RATA-RATA	7,03	6,6	5,78	3,68	3,9	5,78	7,5	7,8	7,7	13,36	100 %		
				TERTINGGI	8	7,25	7	4,5	4,75	7	7,5	8	8	63			
				TERENDAH	6,5	5,75	2	3,25	4,25	7	7,5	7	7	47,25			
2	3	5	2009/2010	RATA-RATA	5,71	4,64	5,2	4,79	5,39	4,64	8	7,57	8	53,97	100 %	2,05	
				TERTINGGI	8,5	6,25	7,2	5,5	7	5,25	8	8	8	63,7			
				TERENDAH	3,75	3,25	3,4	3,4	4,5	4,25	8	7	8	45,9			
3	2	8	2010/2011	RATA-RATA	7,5	7,81	7,16	6,51	7,13	7,16	6,51	7,13	7,01	63,92	100 %	5,39	
				TERTINGGI	7,86	8,08	7,6	7,6	7,6	7,46	7,78	7,4	7,7	69,08			
				TERENDAH	6,97	7,38	6,76	6	6,8	6,1	7,28	7,12	7,1	62,11			

Sumber data : SDN No.7 Lubuk Nibung

LAMPIRAN 6

REKAPITULASI KUISIONER

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				RESPONDEN
		YA	%	TIDAK	%	
1.	Apakah Bapak/Ibu setuju kelengkapan administrasi diperlukan untuk melengkapi persyaratan permohonan BOS?	14	100	0	0	14
2.	Apakah RKS dan RAPBS yang dibuat sekolah dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan dan penggunaan dana bantuan BOS?	12	85,71	2	14,29	14
3.	Apakah Bapak/Ibu tahu persyaratan awal untuk memperoleh dana BOS adalah dengan pengajuan proposal permohonan?	9	64,29	5	35,71	14
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui penyaluran dana BOS	11	78,57	3	21,43	14

	melalui rekening atas nama sekolah tanpa perantara?						
5.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui penggunaan dana BOS untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh sekolah?	5	35,71	9	64,29	14	
6.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui perhitungan jumlah dana BOS disesuaikan dengan jumlah siswa?	13	92,86	1	7,14	14	
7.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS dilengkapi dengan dokumen administrasi?	12	85,71	2	14,29	14	
8.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa saja yang berperan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOS di sekolah penerimaan bantuan?	3	13,64	19	86,36	22	
9.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui pemberian bantuan BOS untuk memberikan keringanan siswa kurang mampu untuk terus melanjutkan sekolah?	17	56,52	13	43,33	30	
10.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak pelaksanaan						

	program BOS dapat mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah?	25	83,33	5	16,67	30
11.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui buku teks pelajaran yang dipergunakan bersumber dari dana BOS?	23	76,67	7	23,33	30
12.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa kegiatan ekstrakurikuler didanai dari dana BOS?	19	63,33	11	36,67	30
13	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa kegiatan peningkatan profesi guru didanai dari dana BOS?	10	71,43	4	28,57	14

UNIVERSITAS TERBUKA